



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



L K I P

2023



L a p o r a n
K i n e r j a
I n s t a n s i
P e m e r i n t a h

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan RI



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



L K I P

2023

L a p o r a n
K i n e r j a
I n s t a n s i
P e m e r i n t a h

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan RI

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN KINERJA



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Sumatera Utara Tahun 2023

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Roma Uli Saragih,	Penyusun Rencana dan Pelaporan	19/01/2024	
		Tri Fani Tega Safia, A.Md Tra	Pegelola Kepegawaian	19/01/2024	
2.	Diperiksa	Andy Parulian, SE	Kepala Subbagian Tata Usaha	19/01/2024	
3.	Disetujui	Andy Parulian, SE	Kepala Subbagian Tata Usaha	19/01/2024	
		Dasmilijanto Tjatur Putro, A. Md	Kepala Seksi Lalu Lintas, Sungai, Danau, Penyeberangan, Dan Pengawasan	19/01/2024	
		Indah Novianty, A.Md LLASDP., M.M.Tr	Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	19/01/2024	
		Ferdy Sukananda, A.TD	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	19/01/2024	



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat.

Sebagai institusi publik, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2023 serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja Tahun 2023.

Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Medan, 20 Januari 2024

Kepala BPTD Kelas II Sumatera Utara


DADAN M. RAMDAN, A.TD., M.Si
NIP. 19671206 199003 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



RINGKASAN EKSEKUTIF

RINGKASAN EKSEKUTIF

Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma'aruf Amin melanjutkan kepemimpinannya melalui Kabinet Indonesia Maju periode Tahun 2019-2024 mengusung Visi “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Visi tersebut diterjemahkan lebih lanjut ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN periode 2020-2024. Pencapaian visi Kabinet Kerja tersebut dapat terwujud apabila segenap jajaran pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara Tahun 2020-2024, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara telah menetapkan Visi yang merupakan pengejawantahan dari visi Kementerian Perhubungan 2020-2024 dalam rangka mendukung terwujudnya visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024, yaitu: Perhubungan Darat yang andal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.

Renstra memuat 5 (lima) tujuan Pembangunan sub sektor Perhubungan Darat, yakni:

1. Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi;
2. Meningkatnya pelayanan transportasi darat;
3. Meningkatnya keselamatan transportasi darat;
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat;
5. Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel.

Dari tujuan di atas, dapat dijabarkan secara konkret ke dalam Sasaran Kegiatan. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Pada tahun 2023,

ditetapkan 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) dan 14 (Empat Belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), beserta targetnya. Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan evaluasi kinerja tahun 2023, secara keseluruhan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara sudah baik.

Dari 14 (Empat Belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara tahun 2023 Terdapat 12 (dua belas) Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$) dan 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq IKK < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada triwulan IV tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan terealisasi sebesar 100 (target 100%) tercapai 100%;
2. Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda terealisasi sebesar 5 Lokasi (target 6 Lokasi) tercapai 83,33%;
3. Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi terealisasi sebesar 5 Lokasi (target 5 Lokasi) tercapai 100%;
4. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan terealisasi sebesar 100 (target 100%) tercapai 100%;
5. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi sebesar 6 Lokasi (target 6 Lokasi) tercapai 100%;
6. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal Tipe-A terealisasi sebesar 100 (target 100%) tercapai 100%;
7. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP terealisasi sebesar 93,37 (target 100%) tercapai 93,37%;
8. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi sebesar 20 (target 20%) tercapai 100%;
9. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 35 (target 35%) tercapai 100%;

10. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi sebesar 1000 orang (target 1.000 orang) tercapai 100%;
11. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terealisasi sebesar 65,63 (target 90%) tercapai 72,92%;
12. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP terealisasi sebesar 1 Lokasi (target 1 Lokasi) tercapai 100%;
13. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terealisasi sebesar 90 (target 90) tercapai 100%;
14. Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 90 (target 90) tercapai 100%.

Nilai Kinerja Organisasi dengan perhitungan hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasaran kinerja adalah sebesar 96,40%, dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara Tahun 2020-2024.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), pelaksanaan program reformasi birokrasi, serta adaptasi terhadap teori/praktik terbaik dan terkini.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN KINERJA	1
KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	6
DAFTAR TABEL.....	8
DAFTAR GAMBAR.....	13
DAFTAR LAMPIRAN.....	17
BAB I PENDAHULUAN	18
I.1. Latar Belakang.....	18
I.2. Tugas Pokok dan Fungsi	18
I.2.1. Bagan Struktur Organisasi BPTD Kelas II Sumatera Utara	21
I.3. Sumber Daya Manusia	23
I.4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	25
I.5. Sistematika Laporan	26
BAB II PERENCANAAN KINERJA	34
II.1. Uraian Singkat Perencanaan Strategis	34
II.1.1. Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023	36
II.2. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2023	37
II.2.1 Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	40
II.2.2 Uraian Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023	41
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	44
III.1. Tahapan Pengukuran Kinerja	44
III.2. Pengukuran Capaian Kinerja	44
III.2.1. SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	52
III.2.2. SK2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat.....	97

III.2.3. SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	114
III.2.4. SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	156
III.2.5. SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	167
III.3. Realisasi Anggaran.....	177
III.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2023	177
III.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2023	186
III.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	191
III.3.4. Hambatan dan Kendala.....	196
BAB IV PENUTUP	197
IV.1. Ringkasan Capaian	197
IV.2. Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab	199
LAMPIRAN	203
Lampiran 1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023	203
Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023.....	204
Lampiran 3 Rencana Aksi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Tahun 2023.....	205
Lampiran 4 Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023	206
Lampiran 5 Revisi I Rencana Aksi BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023	207
Lampiran 6 Revisi II Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023.....	208
Lampiran 7 Revisi II Rencana Aksi BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023.....	209
Lampiran 8 Monitoring Rencana Aksi BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023.....	210

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Rekapitulasi Jumlah Pegawai BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023	24
Tabel II.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPTD Kelas II Sumatera Utara Sesuai Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2020 – 2024.....	35
Tabel II.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023.....	36
Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	38
Tabel II.4 Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2023	40
Tabel II.5 Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023	42
Tabel III.1 Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara Tahun 2020-2023	47
Tabel III.2 Capaian Seluruh Sasaran Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023.....	50
Tabel III. 3 Trayek Layanan Angkutan Jalan Perintis Tahun 2023.....	53
Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan BPTD Kelas II Sumut Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	55
Tabel III.5 Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.....	56
Tabel III.6 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian pada Tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023.....	59
Tabel III.7 Realiasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024	61
Tabel III.8 Benchmark Nasional	62
Tabel III.9 Target dan Realisasi Kinerja Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda BPTD Kelas II Sumut Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023	64
Tabel III.10 Jaringan Trayek Subsidi Angkutan Jalan pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba Tahun 2023	65
Tabel III.11 Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020	68

Tabel III.12 Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024	70
Tabel III.13 Benchmark Nasional	71
Tabel III.14 Target dan Realisasi Kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi BPTD Kelas II Sumut Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023	73
Tabel III.15 Data Produksi 5 Terminal Tipe-A	75
Tabel III.16 Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020	77
Tabel III.17 Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024	78
Tabel III.18 Benchmark Nasional	79
Tabel III.19 Target dan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan BPTD Kelas II Sumut Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023	81
Tabel III.20 Lintasan Perintis Angkutan Penyeberangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023	83
Tabel III.21 Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020	86
Tabel III.22 Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024	87
Tabel III.23 Benchmark Nasional	88
Tabel III.24 Target dan Realisasi Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi di BPTD Kelas II Sumut Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023	90
Tabel III.25 Pelabuhan yang Dikelola BPTD Kelas II Sumatera Utara	91
Tabel III.26 Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020	95
Tabel III.27 Benchmark Nasional	96
Tabel III.28 Target dan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A BPTD	

Kelas II Sumut Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	98
Tabel III.29 Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020	102
Tabel III.30 Realiasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024	104
Tabel III.31 Benchmark Nasional	104
Tabel III.32 Target dan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP BPTD Kelas II Sumut Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	106
Tabel III.33 Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020	111
Tabel III.34 Realiasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024	112
Tabel III.35 Benchmark Nasional	113
Tabel III.36 Target dan Realisasi Kinerja Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal BPTD Kelas II Sumut Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023	115
Tabel III. 37 Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020	120
Tabel III. 38 Realiasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024	121
Tabel III.39 Benchmark Nasional	122
Tabel III.40 Target dan Realisasi Kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat BPTD Kelas II Sumut Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023	124
Tabel III.41 Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020	128
Tabel III.42 Realiasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024	129
Tabel III.43 Benchmark Nasional	130
Tabel III.44 Target dan Realisasi Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan BPTD Kelas II Sumut Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023	132

Tabel III.45	Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020	136
Tabel III.46	Realiasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024	137
Tabel III.47	Benchmark Nasional	138
Tabel III.48	Target dan Realisasi Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor BPTD Kelas II Sumut Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	140
Tabel III.49	Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020	145
Tabel III.50	Realiasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024	146
Tabel III.51	Benchmark Nasional	147
Tabel III.52	Target dan Realisasi Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP BPTD Kelas II Sumut Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023	149
Tabel III.53	Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020	154
Tabel III.54	Realiasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024	155
Tabel III.55	Benchmark Nasional	156
Tabel III.56	Target dan Realisasi Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat BPTD Kelas II Sumut Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	158
Tabel III.57	Perhitungan Realisasi Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	161
Tabel III.58	Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020	165
Tabel III.59	Realiasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024	166
Tabel III.60	Benchmark Nasional	167
Tabel III.61	Target dan Realisasi Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat BPTD Kelas II Sumut Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	169

Tabel III.62 Perhitungan Realisasi Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	171
Tabel III.63 Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020	175
Tabel III.64 Realiasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024	176
Tabel III.65 Benchmark Nasional	176
Tabel III.66 Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2023 ...	177
Tabel III.67 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2023....	177
Tabel III.68 Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu per Triwulan IV TA. 2023.....	177
Tabel III.69 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu per Triwulan IV TA. 2023.....	178
Tabel III.70 Rincian Revisi per Sumber Dana TA 2023.....	180
Tabel III.71 Rincian Revisi per Jenis Belanja TA 2023.....	180
Tabel III.72 Rincian Realokasi per Sumber Dana dan per Jenis Belanja TA 2023.....	182
Tabel III.73 Rincian Program-Program Kegiatan DIPA TA 2023.....	183
Tabel III.74 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2017- 2023.....	184
Tabel III.75 Kegiatan yang ada Dalam DIPA 2023.....	186
Tabel III.76 Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Triwulan IV Tahun 2023	187
Tabel III.77 Realisasi Anggaran per Jenis Sumber Dana Triwulan IV Tahun 2023	188
Tabel III.78 Sisa Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2023	189
Tabel III.79 Sisa Anggaran per Sumber Dana Tahun 2023	189
Tabel III.80 Rincian Sisa Anggaran Tahun 2023.....	189
Tabel III. 81 Tabel Persebaran Jabatan Penguji Kendaraan Bermotor 2023.....	191
Tabel III.82 Tabel Efisiensi Anggaran	194
Tabel IV.1 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab	199

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1 Grafik Capaian IKK Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2023.....	54
Gambar III.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020	59
Gambar III.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2023 dalam Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2020-2024	61
Gambar III.4 Grafik Capaian IKK Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda Tahun 2023	63
Gambar III.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020	68
Gambar III.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024	70
Gambar III.7 Grafik Capaian IKK Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi.....	72
Gambar III.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020	77
Gambar III.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024	78
Gambar III.10 Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Tahun 2023	81
Gambar III.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020	85
Gambar III.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024	87

Gambar III.13 Grafik Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Tahun 2023	90
Gambar III.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020	94
Gambar III.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024	96
Gambar III.16 Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A.....	98
Gambar III.17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020	101
Gambar III.18 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024	103
Gambar III.19 Grafik Capaian IKK Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2023.....	106
Gambar III.20 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020	110
Gambar III.21 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024	112
Gambar III.22 Grafik Capaian IKK Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Tahun 2023	115
Gambar III.23 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020	119
Gambar III.24 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024	121
Gambar III.25 Grafik Capaian IKK Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2023	123

Gambar III.26 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020	127
Gambar III.27 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024	129
Gambar III.31 Grafik Capaian IKK Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2023.....	132
Gambar III.32 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020	135
Gambar III.33 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024.....	137
Gambar III.34 Grafik Capaian IKK Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2023.....	140
Gambar III.35 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020	144
Gambar III.36 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024	146
Gambar III.37 Grafik Capaian IKK Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Pelayaran Alur Pelayaran SDP Tahun 2023	149
Gambar III.38 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020	153
Gambar III.39 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024.....	155
Gambar III.40 Grafik Capaian IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2023	158
Gambar III.41 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020	164

Gambar III.42 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024	166
Gambar III.43 Grafik Capaian IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2023	168
Gambar III.44 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020	174
Gambar III.45 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024	175
Gambar III.46 Grafik Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2023	185

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rencana Kinerja Tahunan 2023	187
Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	188
Lampiran 3 Rencana Aksi Tahun 2023	189
Lampiran 4 Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2023	190
Lampiran 5 Revisi I Rencana Aksi Tahun 2023	191
Lampiran 6 Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023	192
Lampiran 7 Revisi II Rencana Aksi Tahun 2023	193
Lampiran 8 Monitoring Rencana Aksi Tahun 2023	194



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



BAB I PENDAHULUAN

BAB II
PERENCANAAN
KINERJA

BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA

BAB IV
PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara dituntut untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sehingga itu diperlukan Akuntabilitas Publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraanya.

I.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tahun 2016 UPT Ditjen Darat sebelumnya, yaitu: Balai LLAJSDP, KOPP, Pelabuhan Penyeberangan dilebur dan disempurnakan nomenklaturnya untuk mengakomodir Pengelola Terminal Tipe A dan UPPKB menjadi 33 UPT Balai Pengelola Transportasi Darat. Dengan dasar hukum Peraturan Menteri Perhubungan No PM 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

1. Tugas

Balai Pengelola Transportasi Darat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPTD menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;

- b. Pelaksanaan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan;
- c. Pelaksanaan pengendalian keselamatan sarana dan angkutan jalan, keselamatan dan keamanan pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, serta melaksanakan kegiatan keperintisan;
- d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
- e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Tipologi (BPTD) terdiri atas:

- a. BPTD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian, dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau, dan penyeberangan disebut BPTD Kelas I;
- b. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Kelas II;
- c. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik kepulauan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Kelas III.

Susunan Organisasi BPTD Kelas I terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Prasarana;
- c. Bidang Sarana dan Angkutan;
- d. Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

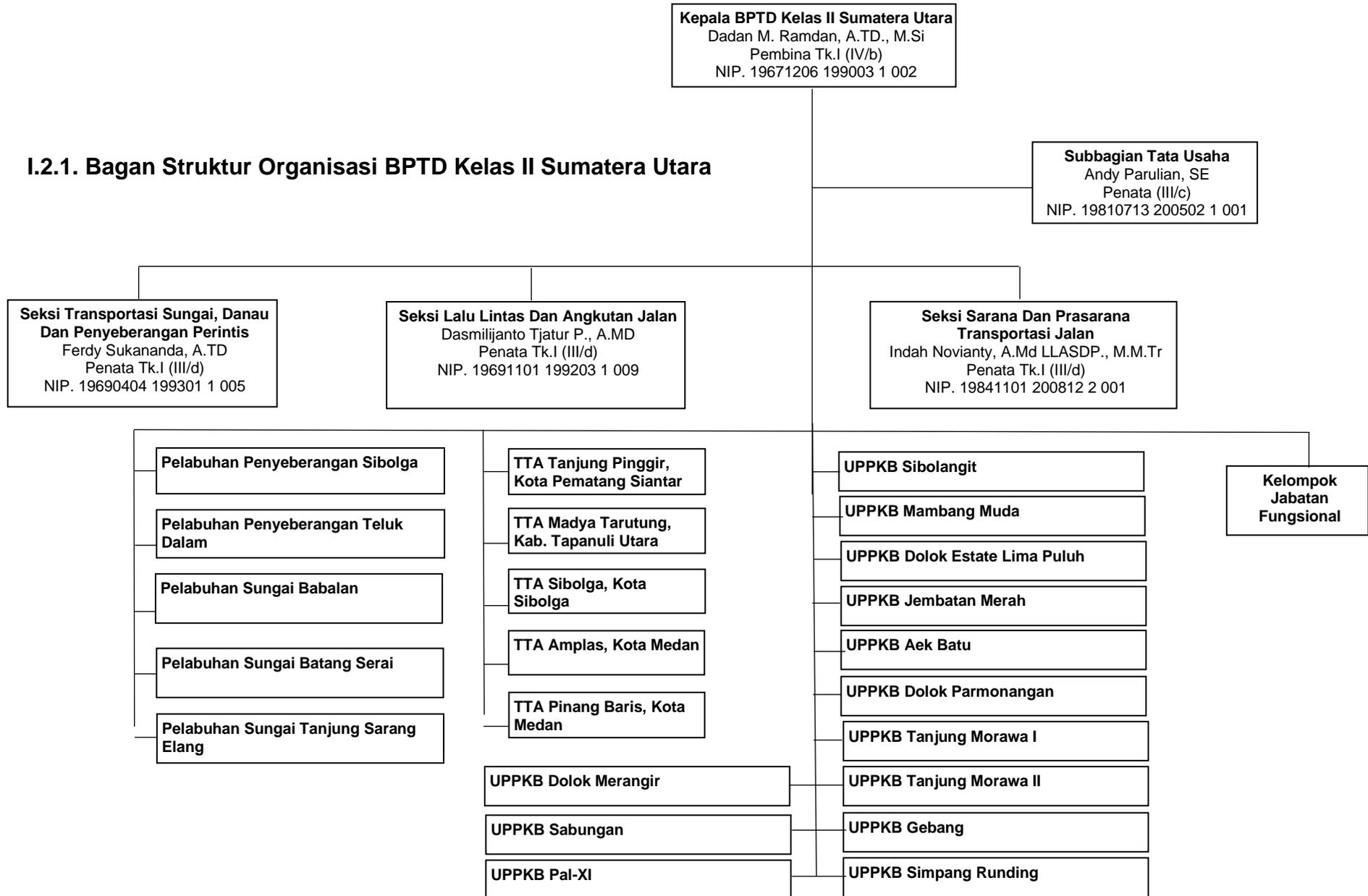
Susunan Organisasi BPTD Kelas II terdiri atas:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
- c. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
- d. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi BPTD Kelas III terdiri atas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional

I.2.1. Bagan Struktur Organisasi BPTD Kelas II Sumatera Utara



Tugas dan tanggung jawab masing-masing seksi, sub bagian dan kelompok jabatan adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja, pengelolaan urusan keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta pelaporan Sistem Akuntansi Instansi, urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

2. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengoperasian terminal tipe A, terminal barang untuk umum, dan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis fasilitas pendukung dan integrasi.

3. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Mempunyai tugas melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala dan pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor, pemeriksaan dan sertifikasi kelaiklautan kapal, analisis trayek angkutan jalan antar kota antar provinsi dan angkutan jalan yang disubsidi oleh pemerintah pusat, penetapan jadwal operasi, pemberian subsidi angkutan jalan dan pelayaran perintis sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis penyediaan sarana jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.

4. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan

Mempunyai tugas melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan untuk jaringan jalan nasional, penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau, sarana bantu navigasi pelayaran, dan sistem informasi manajemen lalu lintas sungai, danau, dan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai dan danau, pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non-tol, pemberian bantuan teknis perlengkapan jalan, halte, dan rambu sungai danau,

pengamatan dan pemantauan perusahaan angkutan jalan, kegiatan karosesi, penyelenggara pengujian berkala kendaraan bermotor, pelabuhan dan penyelenggara pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersil, operator kapal sungai, danau, dan penyeberangan, kendaraan bermotor di jalan, tarif angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, pemberian subsidi angkutan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemenuhan perlengkapan jalan, persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas, pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan, pemenuhan kelaiklautan kapal sungai, danau, dan penyeberangan, ketepatan waktu pelayanan, dan pemberian subsidi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, sarana bantu navigasi pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, rambu, alur, dan halte sungai danau, kegiatan pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai danau, dan pemanfaatan bantuan teknis, pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran pada pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta patroli dan pengamanan pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

I.3. Sumber Daya Manusia

Kebutuhan Pegawai Unit Kerja Mandiri di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara. Pembentukan Balai Pengelola Transportasi Darat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat perlu didukung oleh penambahan jumlah pegawai dalam rangka pelaksanaan tupoksi BPTD.

Data sumber daya manusia pada satuan kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara pada tahun 2023 meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 211 orang, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 9 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 8 orang dan Pegawai Pemerintah

Non Pegawai Negeri (PPNPN) 175 orang. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I.1 Rekapitulasi Jumlah Pegawai BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023

No.	Unit Kerja	PNS	CPNS	PPPK	PPNPN	Jumlah
1	Subbag Tata Usaha	23	-	-	18	41
2	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	16	-	1	1	18
3	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan	14	1	1	8	24
4	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	9	1	1	7	18
5	Satpel UPPKB Mambang Muda	15	-	-	10	25
6	Satpel UPPKB Sibolangit	14	-	-	13	27
7	Satpel UPPKB Dolok Estate Lima Puluh	15	-	1	10	26
8	Satpel UPPKB Aek Batu	9	-	1	8	18
9	Satpel UPPKB Jembatan Merah	10	-	-	7	17
10	Satpel UPPKB Dolok Pardomuan	8	1	-	9	18
11	Satpel TTA Tanjung Pinggir	15	1	-	10	26
12	Satpel TTA Madya Tarutung	7	1	-	11	19
13	Satpel TTA Sibolga	5	1	-	7	13
14	Satpel TTA Amplas	19	-	1	16	36
15	Satpel TTA Pinang Baris	15	1	2	18	36
16	Satpel Pelabuhan Sibolga	4	1	-	6	11
17	Satpel Pelabuhan Sibolga (Gunungsitoli)	1	-	-	1	2
18	Satpel Pelabuhan penyeberanga Teluk Dalam	1	1	-	1	3
19	Satpel Pelabuhan penyeberanga Teluk Dalam (Pulau Tello)	1	-	-	1	2
20	Satpel Pelabuhan Sungai Batang Serai	2	-	-	3	5
21	Satpel Pelabuhan Sungai Babalan	4	-	-	2	6
22	Satpel Pelabuhan Sungai Tanjung Sarang Elang	4	-	-	4	8
23	UPPKB Tanjung Morawa II	-	-	-	-	-
24	UPPKB Tanjung Morawa I	-	-	-	-	-
25	UPPKB Gebang	-	-	-	1	1
26	UPPKB Simpang Dolok Merangir	-	-	-	1	1
27	UPPKB Sabungan	-	-	-	1	1
28	UPPKB PaIXI	-	-	-	1	1
	TOTAL	211	9	8	175	403

I.4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

1. Kewenangan

a. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

- 1) terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
- 2) terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).

b. Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009

Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat petunjuk teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.

c. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

- 1) Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
- 2) Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.

d. PM No. 122 Tahun 2018

Yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dalam Transportasi Penyeberangan adalah sebagai berikut:

- 1) Keselamatan dan Keamanan Pelayanan TSDP;
- 2) Keselamatan dan Keamanan Angkutan di Perairan, Pelabuhan, Perlindungan Lingkungan Maritim.

2. Anggaran

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Balai Pengelola Transportasi

Darat Kelas II Sumatera Utara hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat.

3. Isu Strategis

Isu Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara adalah:

1. Pengoperasian Terminal Penumpang;
2. Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Penyeberangan;
3. Penataan dan pembinaan SDM transportasi darat;
4. Perubahan *Mindset* dan *Cultureset* masyarakat, operator terkait prioritas angkutan jalan dan angkutan umum;
5. Perencanaan anggaran dan proses pengadaan;
6. Uji berkala kendaraan bermotor oleh pemerintah dan swasta.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023 adalah:

1. Rencana Strategis;
2. Perjanjian Kinerja;
3. Indikator Kinerja Kegiatan;
4. Pengukuran Kinerja;
5. Evaluasi Kinerja.

I.5. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

I.2. Tugas Pokok dan Fungsi

I.2.1. Bagan Struktur Organisasi

I.3. Sumber Daya Manusia

I.4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

I.5. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1. Uraian Singkat Perencanaan Strategis

II.1.1. Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

II.2. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

II.2.1. Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2023

II.2.2. Uraian Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Tahapan Pengukuran Kinerja

III.2. Pengukuran Capaian Kinerja

III.2.1. SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi

III.2.1.1. IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan

- a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4). Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, dan 2020
- a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara 2020-2024
- a.7). *Benchmark* Nasional

III.2.1.2. IKK 1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda

- a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4). Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

- a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, dan 2020
- a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara 2020-2024
- a.7). *Benchmark* Nasional

III.2.1.3. IKK 1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi

- a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4). Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, dan 2020
- a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara 2020-2024
- a.7). *Benchmark* Nasional

III.2.1.4. IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan

- a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4). Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, dan 2020
- a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara 2020-2024
- a.7). *Benchmark* Nasional

III.2.1.4. IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi

- a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- a.4). Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, dan 2020
- a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara 2020-2024
- a.7). *Benchmark* Nasional

III.2.2. SK2 Meningkatkan pelayanan transportasi darat

III.2.2.1. IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) di terminal tipe-A

- a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4). Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, dan 2020
- a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara 2020-2024
- a.7). *Benchmark* Nasional

III.2.2.2. IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) di pelabuhan SDP

- a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4). Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, dan 2020
- a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara 2020-2024
- a.7). *Benchmark* Nasional

III.2.3. SK4 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat

III.2.3.1. IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

- a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4). Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, dan 2020
- a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara 2020-2024
- a.7). *Benchmark* Nasional

III.2.3.2. IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

- a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4). Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, dan 2020
- a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara 2020-2024
- a.7). *Benchmark* Nasional

III.2.3.3. IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan

- a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4). Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, dan 2020
- a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara 2020-2024
- a.7). *Benchmark* Nasional

III.2.3.4. IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor

- a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4). Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, dan 2020
- a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara 2020-2024
- a.7). *Benchmark* Nasional

III.2.3.5. IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP

- a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4). Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, dan 2020
- a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara 2020-2024
- a.7). *Benchmark* Nasional

III.2.4. SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

III.2.4.1. IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

- a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4). Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, dan 2020

- a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara 2020-2024
- a.7). *Benchmark* Nasional

III.2.5. SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

III.2.5.1. IKK 1 Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

- a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4). Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, dan 2020
- a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara 2020-2024
- a.7). *Benchmark* Nasional

III.3. Realisasi Anggaran

III.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2023

1. Pagu Anggaran
 - a. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2023
 - b. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2023
 - c. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran
2. Refocusing Anggaran Tahun 2023
 - a. Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2023
 - b. Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2023
 - c. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2023
 - d. Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2023
3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2017-2023

III.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2023

1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2023
2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023
3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2023
4. Analisis Dana yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

III.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

III.3.4. Hambatan dan Kendala

BAB IV PENUTUP

IV.1. Penutup

IV.1.1. Ringkasan Capaian

IV.2. Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023;
3. Rencana Aksi Tahun 2023;
4. Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2023;
5. Revisi Rencana Aksi I Tahun 2023;
6. Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2023;
7. Revisi Rencana Aksi II Tahun 2023;
8. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2023;
9. Lain-lain yang dianggap perlu.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



BAB I
PENDAHULUAN

BAB II
PERENCANAAN
KINERJA

BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA

BAB IV
PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1. Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara Tahun 2020 – 2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara dalam kurun waktu 2020 - 2024 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara 2020 - 2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Ditjen Hubdat.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel II.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPTD Kelas II Sumatera Utara Sesuai Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2020 – 2024

No	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET					
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi							
		IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	-	-	90	100	100
		IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-	-	-	6	3
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	5	5	5	-	5
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	90	90	90	100	100
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	12	12	15	4	5
2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat							
		IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	90	90	85	100	100
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	90	90	85	100	100
3	SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat							
		IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	10	10	9	75	29
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	80	80	35	35	30
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas Kecepatan	Lokasi	13	13	13	1	-
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	2000	2000	1000	1000	1000
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	90	90	90	40	90
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	12	12	-	-	-
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat							
		IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	90	90	90	90
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel							
		IKK1	Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	-	-	-	90	90

II.1.1. Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahunan adalah dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target Kinerja berupa output dan/atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. Rencana Kinerja Tahunan dapat direvisi atau dilakukan penyesuaian terhadap Renstra yang telah direvisi atau disesuaikan.

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan, maka dibuat Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara Tahun 2020 – 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel II.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	PIC
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(7)
1.	SK 1 : Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Kepala Seksi LLAJ
		IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	LOKASI	6	Kepala Seksi LLAJ
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	LOKASI	0	Kepala Seksi LLAJ
		IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	LOKASI	0	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Kepala Seksi SDP
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	LOKASI	4	Kepala Seksi SDP
2.	SK 2 : Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Kepala Subbag Tata Usaha dan Kepala Seksi LLAJ
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	0	Kepala Seksi LLAJ

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	PIC
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(7)
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Kepala Subbag Tata Usaha dan Kepala Seksi SDP
3.	SK 4 : Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	75	Kepala Seksi LLAJ
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	LOKASI	0	Kepala Seksi LLAJ
		IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	LOKASI	0	Kepala Seksi LLAJ
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	ORANG	1000	Kepala Seksi LLAJ
		IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	UNIT	0	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	40	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	LOKASI	0	Kepala Seksi SDP
4.	SK 5 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Kepala Subbag Tata Usaha
5.	SK 1 : Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	Kepala Subbag Tata Usaha

II.2. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara merupakan kontrak kinerja antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara dengan Direktur Jenderal

Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2023 ini. Total Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan Indikator Kinerja Kegiatan dalam mencapai Sasaran Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 230.543.482.000,-

Indikator Kinerja Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara melalui program penyelenggaraan dan pengelolaan transportasi darat dengan total anggaran **Rp. 291.508.219.000,-** adalah sebagai berikut:

Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SK 1 : Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	6
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	0
		IKK1.4 Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
2.	SK 2 : Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	100
		IKK2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	0
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
3.	SK 4 : Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	75
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	1
		IKK3.4 Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000
		IKK3.6 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	0
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	40
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	0
4.	SK 5 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5.	SK 1 : Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

Kegiatan	Anggaran
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT	Rp 105.583.119.000
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT	Rp 40.606.733.000
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT	Rp 84.758.253.000
PENUNJANG TEKNIK TRANSPORTASI DARAT	Rp 7.244.311.000
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI TRANSPORTASI DARAT	Rp 1.061.250.000
PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM TRANSPORTASI DARAT	Rp 21.494.913.000
PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEUANGAN, BMN, DAN UMUM TRANSPORTASI DARAT	Rp 30.759.640.000
Total	Rp 291.508.219.000

II.2.1 Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Pada tahun berjalan dilakukan revisi Perjanjian Kinerja dikarenakan pergantian Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang mengakibatkan disesuaikannya kembali untuk revisi Perjanjian Kinerja pada Bulan Agustus tahun 2023.

Indikator Kinerja Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara melalui Program dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp. 289.219.049.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel II.4 Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SK 1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	6
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	5
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6
		2.	SK 2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A
IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%			100
3.	SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	20
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	90
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	1
4.	SK 5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5.	SK 1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

Kegiatan	Anggaran
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT	Rp 105.583.119.000
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT	Rp 40.606.733.000
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT	Rp 84.758.253.000
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT	Rp 7.244.311.000
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI TRANSPORTASI DARAT	Rp 1.061.250.000
PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM TRANSPORTASI DARAT	Rp 21.494.913.000
PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEUANGAN, BMN, DAN UMUM TRANSPORTASI DARAT	Rp 28.470.470.000
Total	Rp 289.219.049.000

II.2.2 Uraian Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dengan dilakukannya refofusing anggaran maka mengakibatkan disesuaikan kembali untuk revisi perjanjian kinerja pada Bulan November. Indikator Kinerja Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara melalui Program dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp. 289.753.847.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel II.5 Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1)	SK 1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	6
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	5
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6
2)	SK 2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	100
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
3)	SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	20
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	90
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	1
4)	SK 5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5)	SK 1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

Kegiatan		Anggaran
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT	Rp	104.489.696.000
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT	Rp	38.937.180.000
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT	Rp	84.256.027.000
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT	Rp	11.044.311.000
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI TRANSPORTASI DARAT	Rp	1.061.250.000
PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM TRANSPORTASI DARAT	Rp	21.494.913.000
PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEUANGAN, BMN, DAN UMUM TRANSPORTASI DARAT	Rp	28.470.470.000
Total	Rp	289.753.847.000



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Tahapan Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misinya.

Mekanisme pengelolaan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara melalui aplikasi *E-performance* dimulai dari target-target yang telah ditetapkan dalam PK yang kemudian dilakukan pengukuran dan pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berkala melalui aplikasi *E-performance* yang berbasis web. Pelaksanaan pengelolaan pengukuran kinerja dilakukan sepanjang tahun yang meliputi proses penginputan, validasi, dan pelaporan secara berkala setiap awal bulan. Proses dan kegiatan tersebut dilakukan secara bersama sama antara pengelola data dan laporan kinerja di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara.

III.2. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan.

Tahapan pengukuran kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web *E-Performance* yang menyediakan fasilitas inputing, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan *reward* atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

1) Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk persentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

2) Persentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan persentase capaian kinerja sebagai berikut:

Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Apabila realisasi pencapaian semakin rendah menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

3) Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 terhadap target Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2023, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2023.

Analisis dan evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Monitoring Capaian Kinerja, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan. Untuk mewujudkan 3 (tiga) tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara 2020-2024, bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2020 – 2024.

Berikut merupakan tabel pengukuran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023 yang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya:

Tabel III.1 Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara Tahun 2020-2023

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi		100,00%			122,76%			100,00%			96,67%		
IKK 1	Jumlah (lintasan) trayek pelayanan angkutan jalan nasional	Trayek	10	10,00	100,00%	-			-			-		
IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	-	-	-	85	100,00	117,65%	90	90,00	100,00%	100	100,00	100,00%
IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	LOKASI	-	-	-	-	-	-	5	5	100,00%	6	5,00	83,33%
IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	LOKASI	5	5,00	100,00%	5	5	100,00%	5	5	100,00%	5	5,00	100,00%
IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	90	90,00	100,00%	85	86,67	101,96%	90	90,00	100,00%	100	100,00	100,00%
IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	LOKASI	12	12,00	100,00%	7	12	171,43%	6	6	100,00%	6	6,00	100,00%
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat		100,00%			103,13%			100,00%			100,00%		
IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	90	90,00	100,00%	80	85,00	106,25%	85	85,00	100,00%	100	100,00	100,00%
IKK 2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	80	80,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90	90,00	100,00%	85	85,00	100,00%	85	85,00	100,00%	100	100,00	100,00%
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat		100,00%			100,00%			100,00%			94,58%		
IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	80,00	100,00%	9	9,00	100,00%	9	9,00	100,00%	20	20,00	100,00%
IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	80	80,00	100,00%	35	35,00	100,00%	35	35,00	100,00%	35	35,00	100,00%
IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	LOKASI	13	13	100,00%	13	13	100,00%	-	-	-	-	-	-

SASARAN KEGIATAN/		SATUAN	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023				
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C		
IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	ORANG	2000	2000	100,00%	1000	1000	100,00%	1000	1000	100,00%	1000	1000	100,00%		
IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	90	90	100,00%	90	90	100,00%	90	90,00	100,00%	90	65,63	72,92%		
IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	LOKASI	12	12	100,00%	-	-	-	-	-	-	1	1	100,00%		
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat				100,00%				100,00%				107,78%			100,00%
IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	90,00	100,00%	90	90,00	100,00%	90	97,00	107,78%	90	90,00	100,00%		
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel				-				-				100,00%			100,00%
IKK1	Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	-	-	-	-	-	-	90	90,00	100,00%	90	90,00	100,00%		
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan					100,00%				106,47%				101,56%			98,25%
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan					100,00%				108,11%				100,71%			96,88%
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKK≥100%)					14				12				13			12
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0%≤IKK<100%)					0				0				0			2

4) Capaian Kinerja Organisasi

Dari hasil pengukuran kinerja, dengan menggunakan perbandingan antara target revisi perjanjian kinerja dengan capaian Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara maka diperoleh data Capaian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara pada Tahun 2023 adalah sebesar 96,40%. Nilai tersebut berasal dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel III.2 Capaian Seluruh Sasaran Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2023	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi					61,68%			74,86%			82,82%			96,67%
IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100	24,39	24,39%	100	48,82	48,82%	100	61,46	61,46%	100	100,00	100,00%
IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	LOKASI	6	6	6,00	100,00%	6	6	100,00%	6	5	83,33%	6	5,00	83,33%
IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	LOKASI	0	0	0,00	-	0	0	-	5	5	100,00%	5	5,00	100,00%
IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	100	22,34	22,34%	100	50,63	50,63%	100	69,32	69,32%	100	100,00	100,00%
IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	LOKASI	4	4	4,00	100,00%	4	4	100,00%	6	6	100,00%	6	6,00	100,00%
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat					49,13%			69,90%			91,59%			100,00%
IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	100	50,00	50,00%	100	75,00	75,00%	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%
IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	100	48,27	48,27%	100	64,80	64,80%	100	83,17	83,17%	100	100,00	100,00%
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat					46,47%			90,89%			72,29%			94,58%
IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	75	75	14,00	18,67%	75	62,73	83,64%	20	19,62	98,11%	20	20,00	100,00%
IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35	35	27,75	120,73%	35	35,65	98,15%	35	63,66	18,11%	35	35,00	100,00%

SASARAN KEGIATAN/		SATUAN	TARGET 2023	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV				
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C		
IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	LOKASI	1	1	0	0,00%	1	0	0,00%			-	-	-	-		
IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	ORANG	1000	1000	0	0,00%	1000	0	0,00%	1000	0	0,00%	1000	1000	100,00%		
IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	40	40	0	0,00%	40	0	0,00%	90	65,63	72,92%	90	65,63	72,92%		
IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	LOKASI	0	0	0	-	0	0	-	1	1	100,00%	1	1	100,00%		
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat					13,33%				50,00%				75,00%			100,00%
IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	90	12,00	13,33%	90	45,00	50,00%	90	67,50	75,00%	90	90,00	100,00%		
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel					16,67%				25,00%				75,00%			100,00%
IKK1	Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	90	15,00	16,67%	90	22,50	25,00%	90	67,50	75,00%	90	90,00	100,00%		
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan						37,46%				62,13%				79,34%			98,25%
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						39,57%				53,54%				74,03%			96,88%
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKK≥100%)						3				2				4			12
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0%≤IKK<100%)						16				17				10			2

Selama tahun 2023, terdapat 5 Sasaran Kegiatan (SK) dan di dalamnya terdapat 14 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) BPTD Kelas II Sumatera Utara. Penjelasan capaian IKK untuk setiap Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut:

III.2.1. SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Perhubungan yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara Tahun 2020 – 2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan jalan nasional.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan.
2. IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda.
3. IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi.
4. IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan.
5. IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi.

III.2.1.1. IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Angkutan Jalan Perintis adalah angkutan orang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum yang menghubungkan wilayah tertentu yang tidak tersedia atau belum cukup tersedia moda transportasi darat. Adapun keperintisan angkutan jalan nasional yang dimaksud adalah penyelenggaraan penyediaan layanan angkutan umum DAMRI pada sejumlah trayek di wilayah daerah Sumatera Utara yang belum terdapat pelayanan angkutan umum disana. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mendukung kegiatan perekonomian warga pada trayek yang dilayani. Adapun data trayek yang dilayani pada tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel III.3.

Tabel III. 3 Trayek Layanan Angkutan Jalan Perintis Tahun 2023

No	Lintasan	Jumlah Rit/Tahun	Jarak (Km)	Total Realisasi (Trip)	Persentase (%)
1	Gunung Sitoli - Teluk Dalam	730	120,0	730	100,00
2	Pematang Raya - Raya Bosi	1.460	23,0	1.460	100,00
3	Pematang Raya - Bah Bolon	730	32,0	730	100,00
4	Pematang Raya - Nagari Dolok	1.460	26,0	1.460	100,00
5	Tani Jaya - Pangkalan Brandan	1.460	36,5	1.460	100,00

No	Lintasan	Jumlah Rit/Tahun	Jarak (Km)	Total Realisasi (Trip)	Persentase (%)
6	Pantai Buaya - Pangkalan Brandan	1.095	30,0	1.095	100,00
7	Sihosar - Kabanjahe	730	25,0	730	100,00
JUMLAH		7.665	293	7.665	100,00

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel III.3, dapat diketahui bahwa untuk Tahun Anggaran 2023, terdapat 7 trayek yang dilayani pada Perum DAMRI yang ada di Sumatera Utara.

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian kinerja pelaksanaan keperintisan angkutan jalan tahun 2023 pada triwulan IV sebesar 100 jika dibandingkan dengan target revisi II PK 2023 sebesar 100 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.1** Grafik Capaian IKK Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2023.



Gambar III.1 Grafik Capaian IKK Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2023

Berikut ini rincian capain setiap triwulan untuk Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan BPTD Kelas II Sumut.

Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan BPTD Kelas II Sumut Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Rincian	TW-I Tahun 2023	TW-II Tahun 2023	TW-III Tahun 2023	TW-IV Tahun 2023
1	Target	100	100	100	100
2	Realiasi	24,39	48,82	61,46	100
3	Capaian	24,39%	48,82%	61,46%	100%

Tabel diatas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan BPTD Kelas II Sumut terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang dihitung berdasarkan rumus Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- Pada triwulan I, target persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi pelaksanaan keperintisan angkutan jalan pada triwulan I sebesar 24,39%. Sehingga capaian pelaksanaan keperintisan angkutan jalan sebesar 24,39%.
- Pada triwulan II, target persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi pelaksanaan keperintisan angkutan jalan pada triwulan II sebesar 48,82%. Sehingga capaian pelaksanaan keperintisan angkutan jalan sebesar 48,82%.
- Pada triwulan III, target persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi pelaksanaan keperintisan angkutan jalan pada triwulan III sebesar 61,46%. Sehingga capaian pelaksanaan keperintisan angkutan jalan sebesar 61,46%.
- Pada triwulan IV, target persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi pelaksanaan keperintisan angkutan jalan pada triwulan IV sebesar 100%. Sehingga capaian pelaksanaan keperintisan angkutan jalan sebesar 100%.

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 3385 Tahun 2021 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2022, menetapkan jaringan trayek angkutan jalan perintis tahun 2022 di 32 (tiga puluh dua) Provinsi di Indonesia dengan jumlah trayek sebanyak 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) trayek. **(Lampiran. 9)**

- **Kronologi target pada Perjanjian Kinerja**

Dari jumlah trayek dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 3385 Tahun 2022 sebanyak 338 diantaranya terdapat 7 (tujuh) trayek di Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel III.5 Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

NO	PROVINSI	TRAYEK YANG DILAYANI		JARAK (Km)
1	2	3		4
2	SUMATERA UTARA	1	Pematang Raya – Nagari Dolok	26
		2	Pematang Raya – Raya Bosi	23
		3	Pematang Raya – Bah Bolon	32
		4	Besitang – Tani Jaya	30
		5	Sihosar (Merek) – Kabanjahe	25
		6	Pantai Buaya – Pangkalan Berandan	30
		7	Gunung Sitoli – Teluk Dalam	120

Rata-rata capaian kinerja jaringan trayek angkutan jalan perintis tahun 2023 yang telah dilaksanakan oleh BPTD Kelas

II Sumatera Utara sampai dengan triwulan IV Tahun 2023 sebesar 100%.

- **Faktor Keberhasilan**

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan jaringan trayek angkutan jalan perintis antara lain:

- 1) Adanya dukungan penuh dari Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penyelenggaraan angkutan perintis.
- 2) Kolaborasi yang baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemda terkait usulan trayek, pengawasan dan pelaporan.
- 3) Perencanaan yang matang dalam menentukan trayek yang akan dilayani oleh angkutan perintis tersebut.
- 4) Minat masyarakat yang tinggi terhadap keberadaan angkutan perintis tersebut.

- **Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan**

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pelaksanaan jaringan trayek angkutan jalan perintis ini antara lain:

- 1) Load Factor yang rendah
- 2) Makin maraknya pengelolaan kendaraan komersil dengan kemudahan aksesnya.
- 3) Sebagian besar akses jalan menuju daerah yang dijangkau oleh angkutan perintis ini masih rusak dan sulit ditempuh.
- 4) Faktor cuaca maupun kondisi geografis dari daerah yang dijangkau angkutan perintis.

- **Perhitungan Realisasi Kinerja**

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \textit{Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan} \\ & = (\textit{Jumlah RIT realisasi pada tahun (n)}) \\ & \quad / (\textit{Jumlah RIT yang direncanakan}) \times 100\% \end{aligned}$$

Keterangan:

RIT adalah satu kali perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan atau sebaliknya

Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

$$= 7665/7665 \times 100\% = 100\%$$

- **Perhitungan Capaian Kinerja**

Capaian kinerja pelaksanaan keperintisan angkutan jalan

$$= \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

$$= 100/(100) \times 100\% = 100\%$$

- **Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan**

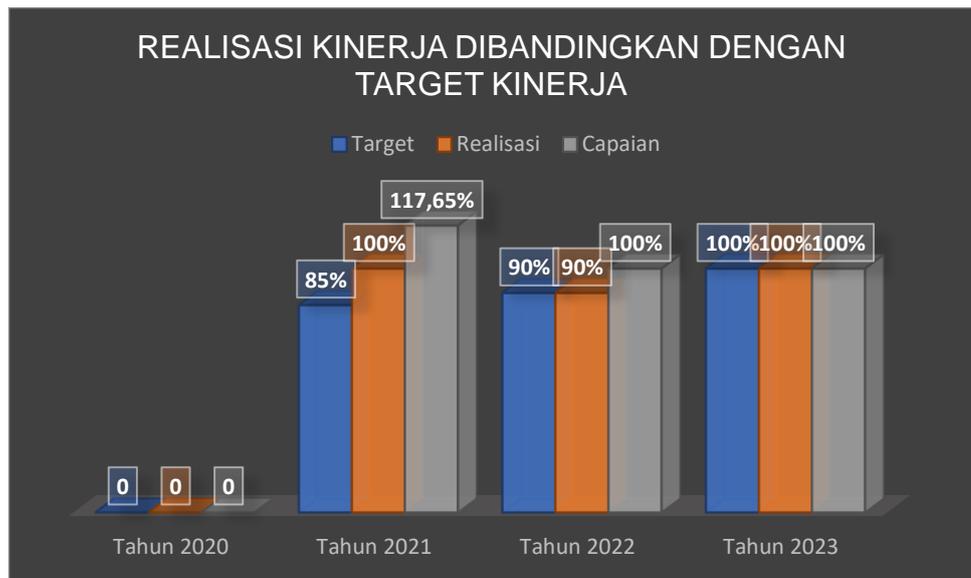
Adapun anggaran terkait pelaksanaan keperintisan angkutan jalan Tahun 2023 yaitu sebagai berikut senilai **Rp 4.096.870.000,-** dengan realisasi hingga Triwulan IV Tahun 2023 **Rp 4.054.250.023,-** atau mencapai 98,96% dengan nomenklatur POK: Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional), kode anggaran (4637.QAH.001).

a.4). Upaya untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- a. Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut.
- b. Berkolaborasi bersama Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengusulan trayek baru.
- c. Dapat terus mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam pelayanan jasa angkutan umum.
- d. Melakukan sosialisasi terkait trayek yang dilalui angkutan perintis bagi Pemda setempat dan juga masyarakat yang terjangkau oleh angkutan perintis tersebut.

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022, dan Tahun 2023



Gambar III.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020

Realisasi kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara 2020-2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100% sedangkan pada tahun 2020 belum terdapat kegiatan pelaksanaan keperintisan angkutan jalan, kegiatan tersebut baru dilaksanakan oleh BPTD Kelas II Sumatera Utara mulai pada tahun 2021 dengan realisasi mencapai 100%, sehingga nilai capaian sebesar 117,65% dan pada tahun 2022 dan 2023 memiliki nilai capaian yang sama sebesar 100%, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.6 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian pada Tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023

SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi						
No.	Tahun	IKP	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik / Turun
1.	2020	IKK 1.1	-	-	-	-
2.	2021	IKK 1.1	85%	100%	117,65	-
3.	2022	IKK 1.1	90%	90%	100	Turun
4.	2023	IKK 1.1	100%	100%	100	Naik

- **Justifikasi Narasi Realisasi Naik**

Pada tahun 2023 realisasi pelaksanaan keperintisan angkutan jalan sebesar 100% naik dari tahun 2022 sebesar 90% dikarenakan terjadi kenaikan pada target pelaksanaan keperintisan angkutan jalan pada tahun 2023 sehingga demi mencapai target tersebut maka pelaksanaan keperintisan angkutan jalan dilaksanakan lebih baik lagi.

- **Justifikasi Narasi Capaian Tetap**

Pada tahun 2023 ini, dengan nilai realisasi pelaksanaan keperintisan angkutan jalan sama dengan tahun 2022 sebesar 100%. Hal ini dikarenakan terjadinya kenaikan pada target perjanjian kinerja di tahun 2023 sehingga pada nilai capaian tahun 2023 sama dengan nilai capaian tahun 2022.

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2020-2024

Realisasi kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara Tahun 2020-2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.3** Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2023 dalam Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2020-2024.



Gambar III.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2023 dalam Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2020-2024

Berikut ini merupakan capaian tahun 2023 terhadap target Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024.

Tabel III.7 Realiasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024

	Target Renstra 2020-2024	Realisasi	Capaian
Triwulan I Tahun 2023	85,00	24,39	28,69%
Triwulan II Tahun 2023	85,00	48,82	57,44%
Triwulan III Tahun 2023	85,00	61,46	72,31%
Triwulan IV Tahun 2023	85,00	100,00	117,65%

Capaian kinerja pelaksanaan keperintisan angkutan jalan tahun 2023 dalam rencana strategis BPTD Kelas II Sumatera Utara tahun 2020-2024 sebesar 117,65% jika dibandingkan dengan capaian terhadap perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar 100%, hal ini disebabkan target pelaksanaan keperintisan angkutan jalan pada renstra lebih rendah daripada target pada perjanjian kinerja maka capaian kinerja terhadap rencana strategis lebih besar nilainya sebesar 117,65%.

a.7). **Benchmark Nasional**

Untuk *benchmark* Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2023. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023, capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2023 adalah 100%. Berikut perbandingan Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan BPTD Kelas II Sumut Tahun 2023 dengan rata-rata capaian nasional dipaparkan pada **Tabel III.4** di bawah ini.

Tabel III.8 *Benchmark Nasional*

No	Uraian	BPTD Kelas II Sumut	Rata-Rata Nasional
1	Persentase Capaian Kinerja	100%	99,80%

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian IKK Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan BPTD Kelas II Sumut memiliki nilai capaian yang lebih tinggi dari rata-rata capaian secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan keperintisan angkutan jalan di BPTD Kelas II Sumut sudah baik.

III.2.1.2.IKK 1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani

Subsidi Angkutan Antarmoda

a.1). **Definisi Indikator Kinerja Kegiatan**

Simpul transportasi tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda yang berupa terminal, stasiun keretaapi, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau dan/atau bandar udara. Adapun telah ditetapkan bahwa pada tahun 2022, akan dilaksanakan subsidi pelayanan keperintisan angkutan KSPN oleh perum Damri untuk wilayah Danau Toba. Hal ini bertujuan untuk mendukung kebijakan

pemerintah terkait ditetapkannya Danau Toba sebagai salah satu dari 10 daerah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Capaian kinerja Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda dapat dihitung berdasarkan perbandingan target simpul yang dilayani dengan realisasi simpul yang terlayani. Adapun simpul transportasi yang dimaksud adalah pelayanan Bus Damri di daerah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Danau Toba.

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian kinerja pelaksanaan jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda tahun 2023 pada triwulan IV sebesar 83,33%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.4** Grafik Capaian IKK Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda Tahun 2023 dibawah ini.



Gambar III.4 Grafik Capaian IKK Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda Tahun 2023

Berikut ini rincian capain setiap triwulan untuk Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda BPTD Kelas II Sumut tahun 2023.

Tabel III.9 Target dan Realisasi Kinerja Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda BPTD Kelas II Sumut Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Rincian	TW-I Tahun 2023	TW-II Tahun 2023	TW-III Tahun 2023	TW-IV Tahun 2023
1	Target	6	6	6	6
2	Realiasi	6	6	5	5
3	Capaian	100%	100%	83,33%	83,33%

Tabel diatas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda BPTD Kelas II Sumut terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang dihitung berdasarkan rumus jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- Pada triwulan I, target jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda yang ditetapkan sebesar 6 lokasi. Realisasi jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda pada triwulan I sebesar 6 lokasi. Sehingga capaian jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda sebesar 100%.
- Pada triwulan II, target jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda yang ditetapkan sebesar 6 lokasi. Realisasi jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda pada triwulan II sebesar 6 lokasi. Sehingga capaian jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda 100%.
- Pada triwulan III, target jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda yang ditetapkan sebesar 6 lokasi. Realisasi jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda pada triwulan III sebesar 5 lokasi. Sehingga capaian jumlah

simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda sebesar 83,33%.

- Pada triwulan IV, target jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda yang ditetapkan sebesar 6 lokasi. Realisasi jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda pada triwulan IV sebesar 5 lokasi. Sehingga capaian jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda sebesar 83,33%.

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 9842 Tahun 2022 tanggal 29 November 2022 tentang Jaringan Trayek Angkutan Jalan Pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Tahun 2023, sebanyak 12 (dua belas) KSPN ditetapkan untuk dilayani subsidi Angkutan Antarmoda. Salah satunya KSPN Danau Toba, dimana sampai dengan triwulan IV (empat) terlayani 5 (lima) bus subsidi angkutan antarmoda tahun 2023.

(Lampiran.10)

- **Kronologi target pada Perjanjian Kinerja**

Berdasarkan penetapan jaringan trayek angkutan jalan pada KSPN tahun 2022 dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 9842 Tahun 2022 diantaranya terdapat 5 (lima) subsidi di Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang tertuang dalam tabel dibawah ini:

Tabel III.10 Jaringan Trayek Subsidi Angkutan Jalan pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba Tahun 2023

No	Provinsi	Trayek Yang Dilayani		Jarak (Km)
1	2	3		
1	SUMATERA UTARA	1	Bandar Udara Silangit – Ajibata (via Sibisa/Kaldera)	79

No	Provinsi	Trayek Yang Dilayani		Jarak (Km)
1	2	3		
	(KSPN DANAU TOBA)	2	Bandar Udara Silangit – Tarutung	36
		3	Bandar Udara Silangit – Dolok Sanggul – Pakat	80
		4	Ajibata – Pematang Siantar	50
		5	Loop Pulau Samosir	120

- **Faktor Keberhasilan**

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan jaringan trayek angkutan jalan perintis antara lain:

- 1) Anggaran subsidi dan dukungan dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan penyelenggara angkutan lain yang baik.
- 2) Operasional angkutan subsidi yang baik.
- 3) Minat masyarakat dalam penggunaan angkutan subsidi pada KSPN Danau Toba cukup tinggi.
- 4) Kemudahan akses tiap trayek yang dilayaninya.

- **Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan**

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pelaksanaan jaringan trayek angkutan jalan perintis ini antara lain:

- 1) Makin maraknya angkutan komersial lain dan akses yang lebih mudah.
- 2) Waktu tempuh yang cukup lama dibandingkan dengan angkutan komersial yang lebih fleksibel.
- 3) Faktor cuaca maupun kondisi geografis dari daerah yang dijangkau angkutan perintis.
- 4) Pengetahuan masyarakat yang minim akan adanya angkutan besubsidi.

- **Perhitungan Realisasi Kinerja**

Untuk menghitung Indikator Kinerja Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antar moda digunakan rumus sebagai berikut:

IKK 1.2 = Jumlah simpul transportasi nasional yang dilayani subsidi angkutan antar moda

IKK 1.2 = 5 Lokasi

- **Perhitungan Capaian Kinerja**

Capaian kinerja jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antar moda

$$\begin{aligned} &= \text{Realisasi/Target} \times 100\% = 5/(6) \times 100\% \\ &= 83,33\% \end{aligned}$$

- **Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan**

Adapun anggaran terkait subsidi angkutan antar moda KSPN Danau Toba Tahun 2023 yaitu sebagai berikut senilai **Rp 4.618.907.000,-** dengan realisasi hingga Triwulan IV Tahun 2023 **Rp 4.529.245.864,-** atau mencapai 98,06% dengan nomenklatur POK : Layanan Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional) Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional), kode anggaran (4637.QAH.002).

a.4). Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- a. Memberikan layanan yang lebih baik.
- b. Melakukan monitoring secara rutin terhadap pelaksanaan subsidi angkutan antar moda KSPN Danau Toba apakah memenuhi target trip setiap layanan trayeknya sehingga memudahkan untuk dilakukan evaluasi dan tindak lanjut jika terjadi penurunan capaiannya.
- c. Pelaksanaan digitalisasi terhadap subsidi angkutan antar moda KSPN Danau Toba.
- d. Melakukan sosialisasi terkait trayek yang dilalui bagi Pemda setempat dan juga masyarakat yang dijangkau oleh subsidi angkutan antar moda KSPN Danau Toba.

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022, dan Tahun 2023



Gambar III.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020

Realisasi kinerja jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda tahun 2023 sebesar 5 lokasi, artinya terjadi pengurangan pada 1 trayek subsidi angkutan antarmoda yang dilayani. Jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Perjanjian kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara tahun 2023 sebesar 6 lokasi maka capaian kinerja mencapai 83,33% sedangkan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 belum terdapat kegiatan subsidi angkutan antarmoda, kegiatan tersebut baru dilaksanakan oleh BPTD Kelas II Sumatera Utara mulai pada tahun 2022 dengan realisasi mencapai 6 lokasi, sehingga nilai capaian sebesar 100%, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.11 Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020

SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi						
No.	Tahun	IKP	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik / Turun
1.	2020	IKK 1.2	-	-	-	-
2.	2021	IKK 1.2	-	-	-	-
3.	2022	IKK 1.2	-	6	100	-

SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi						
No.	Tahun	IKP	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik / Turun
4.	2023	IKK 1.2	6	5	83,33%	Turun

- **Justifikasi Narasi Realisasi Turun**

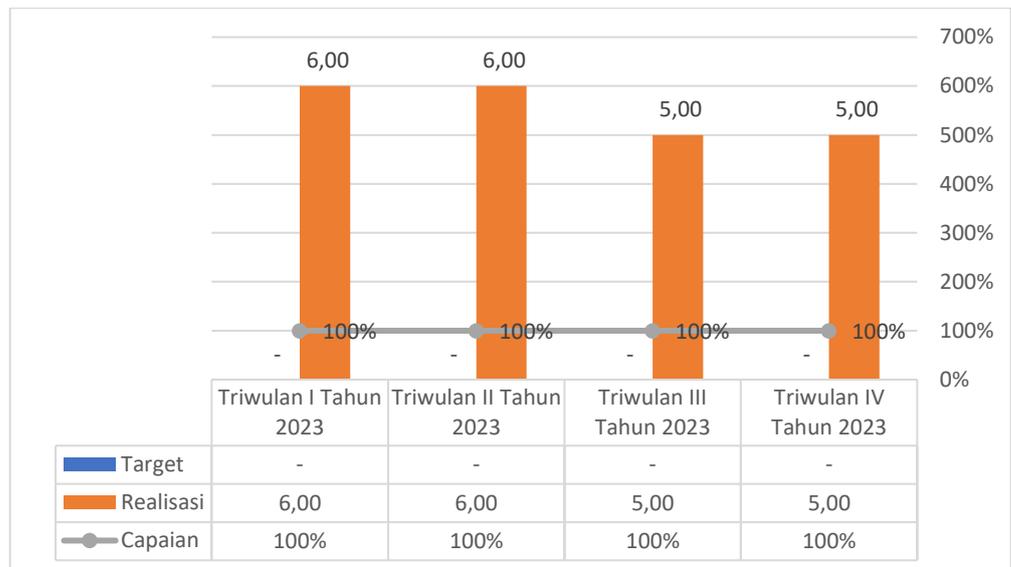
Pada tahun 2023 realisasi jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda sejumlah 5 (lima) lokasi turun dari tahun 2022 sejumlah 6 (enam) lokasi dikarenakan berdasarkan realisasi subsidi angkutan KSPN Danau Toba pada Bulan Juli mengalami perpindahan trayek dimana 3 trayek sebelumnya dialihkan menjadi 2 trayek baru sehingga pada bulan Juli hanya terdapat 5 trayek yang melayani angkutan antarmoda hal ini diakibatkan sudah sangat berkurangnya demand pada 3 trayek sebelumnya.

- **Justifikasi Narasi Capaian Turun**

Pada tahun 2023 ini, dengan jumlah realisasi simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda turun dari tahun 2022, maka capaian kinerja tahun 2023 turun menjadi 83,33%. Hal ini dikarenakan rendahnya load factor trayek sebelumnya sehingga dialihkan menjadi 2 trayek.

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2020-2024

Realisasi kinerja jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda sebesar 5 (lima) lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam rencana strategis BPTD Kelas II Sumatera Utara sebesar 0 (nol) lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada gambar berikut ini:



Gambar III.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024

Berikut ini merupakan capaian tahun 2023 terhadap target Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024.

Tabel III.12 Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024

	Target Renstra 2020-2024	Realisasi	Capaian
Triwulan I Tahun 2023	0	6	100%
Triwulan II Tahun 2023	0	6	100%
Triwulan III Tahun 2023	0	5	100%
Triwulan IV Tahun 2023	0	5	100%

Capaian kinerja jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda tahun 2023 dalam rencana strategis BPTD Kelas II Sumatera Utara tahun 2020-2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian terhadap perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar 83,33%, hal ini disebabkan karena dalam Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024 tidak ada kegiatan jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda. Kegiatan ini baru dilaksanakan pada pertengahan tahun 2022.

a.7). **Benchmark Nasional**

Untuk *benchmark* jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda Tahun 2023. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023, capaian jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda Tahun 2023 adalah 5 (lima) lokasi. Berikut perbandingan jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda BPTD Kelas II Sumut Tahun 2023 dengan rata-rata capaian secara nasional dipaparkan pada **Tabel III.12** di bawah ini.

Tabel III.13 Benchmark Nasional

No	Uraian	BPTD Kelas II Sumut	Rata-Rata Nasional
1	Persentase Capaian Kinerja	83,33%	91,71%

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian IKK jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda di BPTD Kelas II Sumut memiliki nilai capaian yang lebih rendah dari rata-rata capaian secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda di BPTD Sumut terdapat pengurangan trayek yang menyebabkan berkurang juga jumlah simpul yang dilayaninya akibat rendahnya load factor pada beberapa trayek angkutan antarmoda.

III.2.1.3. IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi

a.1). **Definisi Indikator Kinerja Kegiatan**

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta

perpindahan moda angkutan. Adapun untuk wilayah kerja BPTD Sumatera Utara, telah beroperasi Terminal Penumpang Tipe-A saat ini. Terminal Penumpang Tipe-A berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP), Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP), Angkutan Antar Kota (Angkot), dan Angkutan Pedesaan (Ades). Selanjutnya maksud dari IKK ini adalah untuk mengetahui berapa jumlah terminal yang telah beroperasi di bawah naungan BPTD Sumatera Utara pada tahun 2023.

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi di Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 sebanyak 5 Lokasi, jika dilihat pada target awal PK 2023 sebesar 0 Lokasi namun pada bulan Agustus telah dilakukan revisi I PK dimana usulan target berubah menjadi 5 Lokasi dikarenakan salah persepsi dalam penentuan target PK di awal tahun 2023 sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.7** Grafik Capaian IKK Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi dibawah ini:



Gambar III.7 Grafik Capaian IKK Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi

Berikut ini rincian capaian setiap triwulan untuk Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi BPTD Kelas II Sumut tahun 2023.

Tabel III.14 Target dan Realisasi Kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi BPTD Kelas II Sumut Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Rincian	TW-I Tahun 2023	TW-II Tahun 2023	TW-III Tahun 2023	TW-IV Tahun 2023
1	Target	0	0	5	5
2	Realiasi	0	0	5	5
3	Capaian	0%	0%	100%	100%

Tabel diatas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja jumlah Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi di BPTD Kelas II Sumut terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang dihitung berdasarkan rumus Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- Pada triwulan I, target Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi yang ditetapkan sebesar 0 lokasi. Realisasi Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi pada triwulan I sebesar 0 lokasi. Sehingga capaian Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi sebesar 0%.
- Pada triwulan II, target Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi yang ditetapkan sebesar 0 lokasi. Realisasi Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi pada triwulan II sebesar 0 lokasi. Sehingga capaian Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi 0%.
- Pada triwulan III, terjadi perubahan target pada kegiatan jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi yang ditetapkan sebesar 5 lokasi. Realisasi Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi pada triwulan III sebesar 5 lokasi. Sehingga capaian jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi sebesar 100%.
- Pada triwulan IV, jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi yang ditetapkan sebesar 5 lokasi.

Realisasi jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi pada triwulan IV sebesar 5 lokasi. Sehingga capaian jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi sebesar 100%.

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 perubahan atas PM 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, terhadap Operasional Pelayanan Terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi pada tahun 2023 di 5 Terminal tipe-A Provinsi Sumatera Utara dengan rincian sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggungjawab seluruh staf Terminal Tipe-A;
2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM;
3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggungjawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Terminal Tipe-A.

- **Kronologi target pada Perjanjian Kinerja**

Tahun 2023, Indikator Kinerja Kegiatan jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi terhadap konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 5 Lokasi yang berdasarkan pada target Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara tahun 2020-2024 sebesar 5 lokasi. Berdasarkan data produksi 5 terminal yang di kelola BPTD Kelas II Sumatera Utara sampai bulan Desember Tahun 2023 masih banyak bus yang tidak masuk ke terminal, dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada pihak organda sehingga masih banyak pool yang masih beroperasi di luar terminal. Berikut merupakan rekap data produksi 5 teminal yang dikelola BPTD Kelas II Sumatera Utara sampai dengan triwulan IV:

Tabel III.15 Data Produksi 5 Terminal Tipe-A

No.	Terminal Tipe-A	Keberangkatan		Kedatangan	
		Penumpang	Kendaraan	Penumpang	Kendaraan
1	Amplas	239.851	14.439	17.611	1.353
2	Madya Tarutung	83.781	9.160	49.238	7.676
3	Pinang Baris	117.958	9.441	83.157	8.442
4	Sibolga	91.801	8.726	89.920	7.870
5	Tanjung Pinggir	182.115	16.050	167.097	15.396

- **Faktor Keberhasilan**

Keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi tahun 2023 antara lain yaitu:

- 1) Tingginya antusias masyarakat menggunakan angkutan umum;
- 2) Informasi tentang pelayanan di terminal tersampaikan kepada masyarakat;
- 3) Banyak masyarakat yang menggunakan terminal sebagai tempat perpindahan koridor.

- **Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan**

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pelaksanaan jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi ini antara lain:

- 1) Kebersihan di terminal masih kurang maksimal;
- 2) Lokasi jauh dari jalan utama;
- 3) Fasilitas umum di terminal masih kurang memadai bagi pengguna layanan;
- 4) Kurangnya minat masyarakat terhadap penggunaan angkutan umum yang telah di sediakan.

- **Perhitungan Realisasi Kinerja**

Untuk menghitung Indikator Kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK\ 1.3 = \text{Jumlah terminal tipe A dan terminal barang yang beroperasi}$$

$$IKK\ 1.3 = 5\ \text{Lokasi}$$

- **Perhitungan Capaian Kinerja**

Capaian kinerja jumlah terminal tipe A dan terminal barang yang beroperasi = Realisasi/Target × 100% = 5/(5) x 100% = 100%

- **Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan**

Adapun anggaran terkait terminal penumpang tipe-A dikelola Tahun 2023 yaitu sebagai berikut senilai **Rp 11.769.712.000,-** dengan realisasi hingga Triwulan IV Tahun 2023 **Rp 11.737.488.163,-** atau mencapai 99,73% dengan nomenklatur POK : Terminal Penumpang Tipe-A dikelola, kode anggaran (4638.CDP.040).

a.4). Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi kepada organda serta masyarakat pengguna angkutan umum untuk turut serta meramaikan terminal yang sudah ada;
- b. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna fasilitas terminal tipe-A;
- c. Meningkatkan kemampuan pelayanan guna mengantisipasi kebutuhan dimasa yang akan datang;
- d. Meningkatkan pendapatan PNBPN di terminal tipe-A.

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022, dan Tahun 2023



Gambar III.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020

Realisasi kinerja jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi tahun 2023 sebesar 5 lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024 sebesar 5 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%, sedangkan pada tahun 2021 capaian kinerja jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi sebesar 5 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%, dan pada tahun 2020 jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi sebesar 5 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada tahun 2020, 2021, 2022, sampai dengan tahun 2023 tetap sama yaitu 1 lokasi, untuk rincian capaian pada tahun 2020, 2021, 2022, dan tahun 2023 dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel III.16 Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020

SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi						
No.	Tahun	IKP	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik / Turun

SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi

1.	2020	IKK 1.3	5	5	100%	Tetap
2.	2021	IKK 1.3	5	5	100%	Tetap
3.	2022	IKK 1.3	5	5	100%	Tetap
4.	2023	IKK 1.3	5	5	100%	Tetap

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2020-2024

Realisasi kinerja jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi tahun 2023 sebesar 5 (lima) lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024 sebesar 5 (lima) lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.9** berikut ini:



Gambar III.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024

Berikut ini merupakan realisasi tahun 2023 terhadap target Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024.

Tabel III.17 Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024

	Target Renstra 2020-2024	Realisasi	Capaian
Triwulan I Tahun 2023	5	5	100%
Triwulan II Tahun 2023	5	5	100%

	Target Renstra 2020-2024	Realisasi	Capaian
Triwulan III Tahun 2023	5	5	100%
Triwulan IV Tahun 2023	5	5	100%

Realisasi kinerja jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi tahun 2023 dalam rencana strategis BPTD Kelas II Sumatera Utara tahun 2020-2024 sebesar 5 lokasi, jika dibandingkan dengan realisasi terhadap perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar 5 lokasi, hal ini menunjukkan jumlah terminal tipe-A di Sumatera Utara tidak terjadi penambahan maupun pengurangan sampai dengan tahun 2023.

a.7). **Benchmark Nasional**

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023, capaian jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi Tahun 2023 adalah 5 (lima) lokasi. Berikut perbandingan jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi di BPTD Kelas II Sumut Tahun 2023 dengan rata-rata capaian nasional dipaparkan pada **Tabel III.16** di bawah ini.

Tabel III.18 Benchmark Nasional

No	Uraian	BPTD Kelas II Sumut	Rata-Rata Nasional
1	Persentase Capaian Kinerja	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa persentase capaian jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi di BPTD Kelas II Sumatera Utara tahun 2023 dengan rata-rata capaian nasional memiliki nilai yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh BPTD memiliki terminal tipe-A yang dioperasikan oleh masing-masing UPT di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat.

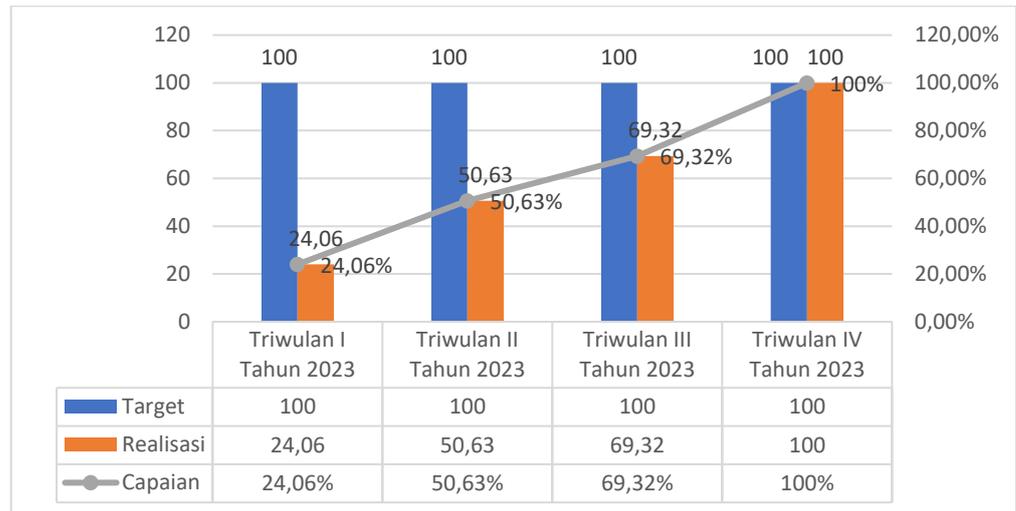
III.2.1.4. IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan adalah pelayanan angkutan penyeberangan bersubsidi guna membangun konektivitas antar pulau di Sumatera Utara. Pelayanan angkutan penyeberangan perintis menggunakan kapal ferry dari perusahaan PT.ASDP Indonesia Ferry Cabang Sibolga dan PT.Wira Jaya Logitama Lines. Kegiatan ini berguna untuk mendukung kegiatan perekonomian serta sosial politik masyarakat di wilayah Sumatera Utara.

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian kinerja persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan tahun 2023 triwulan IV sebesar 100% jika dibandingkan dengan target revisi II PK 2023 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.10** Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Tahun 2023 dibawah ini:



Gambar III.10 Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Tahun 2023

Berikut ini rincian capaian setiap triwulan untuk Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Tahun 2023.

Tabel III.19 Target dan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan BPTD Kelas II Sumut Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Rincian	TW-I Tahun 2023	TW-II Tahun 2023	TW-III Tahun 2023	TW-IV Tahun 2023
1	Target	100	100	100	100
2	Realiasi	24,06	50,63	69,32	100
3	Capaian	24,06%	50,63%	69,32%	100%

Tabel diatas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan BPTD Kelas II Sumut terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang dihitung berdasarkan rumus Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- Pada triwulan I, target Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan pada

triwulan I sebesar 24,06. Sehingga capaian Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan sebesar 24,06%.

- Pada triwulan II, target Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan pada triwulan II sebesar 50,63. Sehingga capaian Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan sebesar 50,63%.
- Pada triwulan III, target Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan pada triwulan III sebesar 69,32. Sehingga capaian Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan sebesar 69,32%.
- Pada triwulan IV, target Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan pada triwulan IV sebesar 100. Sehingga capaian Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan sebesar 100%.

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.4550/AP.204/DRJD/2019 Tanggal 04 November 2019 Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2020, terdapat 253 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga) lintas penyeberangan perintis di seluruh Indonesia.

- **Kronologi target pada Perjanjian Kinerja**

Dari jumlah lintasan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pehubungan Darat Nomor: KP.4550/AP.204/DRJD/2019 sebanyak 253 lintasan diantaranya terdapat 4 (empat) lintasan perintis angkutan penyeberangan di Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel III.20 Lintasan Perintis Angkutan Penyeberangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

No	Provinsi	Nama Lintasan		Jarak (mil)
1	2	3		4
2	Aceh – Sumatera Utara	1	Singkil – Gunung Sitoli	72
3	Sumatera Utara	2	Teluk Dalam – Pulau Tello	49
		3	Balige – Onan Runggu	9
		4	Onan Runggu – Muara	9

Berdasarkan data realisasi (Trip) dalam progres pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan yang telah dilaksanakan oleh BPTD Kelas II Sumatera Utara sampai dengan triwulan IV Tahun 2023 sebesar 100%.

- **Faktor Keberhasilan**

Keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan antara lain dipengaruhi oleh:

1. Adanya bangkitan perjalanan, peningkatan ekonomi, dan peningkatan pembangunan pada daerah yang terlayani;
2. Adanya dukungan dan pertanggungjawaban dari Pemerintah Daerah dalam memberikan jaminan keselamatan (*safety*) dan keamanan (*security*) terhadap nahkoda dan ABK;
3. Adanya jaminan keselamatan dan keamanan kapal selama di Pelabuhan;
4. Adanya kepastian ketersediaan penumpang dan barang;

5. Kepastian jam operasional keperintisan angkutan penyeberangan.

- **Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan**

Faktor kegagalan tidak tercapainya pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan yang beroperasi antara lain dipengaruhi oleh:

1. Keterbatasan kapal/sarana;
2. Belum tersedianya layanan yang tetap dan teratur;
3. Secara komersial belum menguntungkan;
4. Sebagian besar angkutan penyeberangan perintis belum terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.

- **Perhitungan Realisasi Kinerja**

Persentase capaian kinerja pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah trip penyeberangan yang terealisasi dengan target yang telah ditetapkan. Untuk menghitung Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} IKK 1.5 &= \frac{\text{Jumlah (Trip) realisasi pada bulan (n)}}{\text{Target Setahun (Trip)}} \times 100\% \\ &= \frac{3001}{3001} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

- **Perhitungan Capaian Kinerja**

$$\begin{aligned} &\text{Capaian kinerja persentase pelaksanaan} \\ &\text{keperintisan angkutan penyeberangan} \\ &= \text{Realisasi/Target} \times 100\% = 100/100 \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

- **Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan Tahun 2023 yaitu sebagai berikut senilai **Rp 9.619.431.000,-** dengan realisasi hingga Triwulan IV Tahun 2023 **Rp 9.619.429.315,-** atau mencapai 100% dengan nomenklatur POK : Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas Nasional), kode anggaran (4637.QAH.008).

a.4). Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Merencanakan angkutan multimoda untuk menunjang operasional kepererintisan angkutan penyeberangan.
2. Diperlukannya koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan dan kewenangan tarif lintas penyeberangan, penetapan lintas baru, dan evaluasi lintas eksisting.
3. Memenuhi persyaratan teknis laik laut dan SPM kapal penyeberangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022, dan Tahun 2023



Gambar III.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020

Realisasi kinerja pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 sebesar 90% maka capaian kinerja mencapai 91%, sedangkan pada tahun 2021 capaian kinerja pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan sebesar 85% maka

capaian kinerja mencapai 102%, dan pada tahun 2020 pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan sebesar 90% maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan dari 100% menjadi 102% kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 91% namun di tahun 2023 mulai mengalami kenaikan menjadi 100%, untuk rincian capaian pada tahun 2020, 2021, 2022, dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.21 Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020

SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi						
No.	Tahun	IKP	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik / Turun
1.	2020	IKK 1.5	90	90	100%	Tetap
2.	2021	IKK 1.5	85	86,67	102%	Naik
3.	2022	IKK 1.5	90	81,75	91%	Turun
4.	2023	IKK 1.5	100	100	100%	Naik

- **Justifikasi Narasi Realisasi Turun**

Pada tahun 2022 realisasi pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan sebesar 81,75% realisasi turun dari tahun 2021 sebesar 86,67% dikarenakan adanya kenaikan target pada tahun 2022 namun tidak sebanding dengan realisasi akibat dari pengurangan rit dan trayek pada pelaksanaan keperintisan angkutan penyeberangan di tahun 2022.

- **Justifikasi Narasi Capaian Turun**

Pada tahun 2022 terjadi penurunan nilai capaian pada pelaksanaan keperintisan angkutan penyeberangan menjadi 91%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 terjadi kenaikan target pada Perjanjian Kinerja namun pada kenyataannya terjadi pengurangan trayek serta trip pada pelaksanaan keperintisan angkutan penyeberangan sehingga nilai capaian pada tahun 2022 menjadi turun.

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2020-2024

Realisasi kinerja pelaksanaan keperintisan angkutan penyeberangan tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024 sebesar 85% maka capaian kinerja mencapai 118%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.12** berikut ini:



Gambar III.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024

Berikut ini merupakan realisasi tahun 2023 terhadap target Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024.

Tabel III.22 Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024

	Target Renstra 2020-2024	Realisasi	Capaian
Triwulan I Tahun 2023	85	24,06	28%
Triwulan II Tahun 2023	85	50,63	60%
Triwulan III Tahun 2023	85	69,32	82%
Triwulan IV Tahun 2023	85	100	118%

Realisasi kinerja pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan tahun 2023 dalam rencana strategis

BPTD Kelas II Sumatera Utara tahun 2020-2024 sebesar 100 sehingga capaian pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan sebesar 118%, jika dibandingkan dengan realisasi terhadap perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar 100% sehingga capaian pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan sebesar 100%, hal ini menunjukkan semakin tinggi target dengan realisasi yang sama maka nilai capaian kinerja akan semakin kecil.

a.7). Benchmark Nasional

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023, capaian pelaksanaan keperintisan angkutan penyeberangan Tahun 2023 adalah 100%. Berikut perbandingan pelaksanaan keperintisan angkutan penyeberangan di BPTD Kelas II Sumut Tahun 2023 dengan rata-rata capaian nasional dipaparkan pada **Tabel III.21** di bawah ini.

Tabel III.23 Benchmark Nasional

No	Uraian	BPTD Kelas II Sumut	Rata-Rata Nasional
1	Persentase Capaian Kinerja	100%	97,06%

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian IKK persentase pelaksanaan keperintisan angkutan penyeberangan BPTD Kelas II Sumut memiliki nilai yang lebih tinggi dari rata-rata capaian secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan keperintisan angkutan penyeberangan di BPTD Kelas II Sumatera Utara sudah baik.

III.2.1.5. IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan. Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan penyeberangan kelas I, kelas II, dan kelas III. Sedangkan, pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan pengumpul dan pengumpan. Pelabuhan SDP yang beroperasi merupakan Pelabuhan SDP yang dibangun melalui APBN.

BPTD Kelas II Sumatera Utara memiliki Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan SDP yang memiliki fungsi melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Pelabuhan Penyeberangan terhadap keselamatan transportasi angkutan umum di darat berjalan dengan benar serta mengevaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM.

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi di Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 sebanyak 6 Lokasi, jika dilihat pada target PK 2023 sebesar 4 Lokasi namun pada bulan Agustus telah dilakukan revisi I PK dimana usulan target berubah menjadi 6 Lokasi dikarenakan kesalahan persepsi dalam penentuan jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi di awal tahun 2023 sehingga capaian kinerja mencapai 100% sampai dengan Triwulan IV. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.13** Grafik Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Tahun 2023 sebagai berikut:



Gambar III.13 Grafik Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Tahun 2023

Berikut ini rincian capaian setiap triwulan untuk jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi tahun 2023 di BPTD Kelas II Sumatera Utara.

Tabel III.24 Target dan Realisasi Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi di BPTD Kelas II Sumut Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Rincian	TW-I Tahun 2023	TW-II Tahun 2023	TW-III Tahun 2023	TW-IV Tahun 2023
1	Target	4	4	6	6
2	Realiasi	4	4	6	6
3	Capaian	100%	100%	100%	100%

Tabel diatas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi di BPTD Kelas II Sumut tahun 2023 terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang dihitung berdasarkan rumus jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- Pada triwulan I, target jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi yang ditetapkan sebesar 4 lokasi. Realisasi jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi pada triwulan I sebesar 4 lokasi. Sehingga capaian jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi sebesar 100%.
- Pada triwulan II, target jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi yang ditetapkan sebesar 4 lokasi. Realisasi

jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi pada triwulan II sebesar 4 lokasi. Sehingga capaian jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi sebesar 100%.

- Pada triwulan III, target jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi yang ditetapkan sebesar 6 lokasi akibat adanya perubahan target Perjanjian Kinerja pada Revisi I Perjanjian Kinerja tahun 2023. Realisasi jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi pada triwulan III sebesar 6 lokasi. Sehingga capaian jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi sebesar 100%.
- Pada triwulan IV, target jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi yang ditetapkan sebesar 6 lokasi. Realisasi jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi pada triwulan IV sebesar 6 lokasi. Sehingga capaian jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi sebesar 100%.

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

Tabel III.25 Pelabuhan yang Dikelola BPTD Kelas II Sumatera Utara

No	Pelabuhan Penyeberangan	Dasar Hukum
1.	Pelabuhan Penyeberangan Sibolga	PM 6 Tahun 2023
2.	Pelabuhan Penyeberangan Teluk Dalam	PM 6 Tahun 2023
3.	Pelabuhan Sungai Babalan	PM 6 Tahun 2023
4.	Pelabuhan Sungai Batang Serai	PM 6 Tahun 2023
5.	Pelabuhan Sungai Tanjung Sarang Elang	PM 6 Tahun 2023

- **Kronologi target pada Perjanjian Kinerja**

Tahun 2023, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi terhadap konektivitas transportasi darat

dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 4 terhadap PK di awal tahun dengan berdasarkan arahan pimpinan sesuai dengan DIPA 2023 pelabuhan yang sedang terbangun. Namun pada tahun berjalan dilakukan kesepakatan bersama atasan bahwa jumlah pelabuhan yang dikelola oleh BPTD Kelas II Sumatera Utara tidak hanya pelabuhan yang sedang terbangun namun pelabuhan yang sudah terbangun sehingga dilakukannya revisi I PK tahun 2023 dengan merubah target pada PK tahun berjalan.

- **Faktor Keberhasilan**

Keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi antara lain dipengaruhi oleh:

1. Operasional pelabuhan yang baik;
2. Ketepatan jadwal;
3. Selalu melaksanakan evaluasi kerja.

- **Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan**

Faktor kegagalan atau potensi kegagalan sehingga tidak tercapainya pelaksanaan Pelabuhan SDP yang beroperasi antara lain dipengaruhi oleh:

1. Cuaca yang tidak bisa diprediksi.
2. SDM yang kurang memadai.
3. Pemeliharaan dan perawatan fasilitas di pelabuhan yang tidak maksimal sehingga banyak fasilitas di pelabuhan yang rusak dan tidak berfungsi dengan baik.

- **Perhitungan Realisasi Kinerja**

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi digunakan rumus sebagai berikut:

IKK 1.6

*= Jumlah Pelabuhan SDP yang telah selesai dibangun
dan dioperasikan s. d tahun (n)*

= 6

- **Perhitungan Capaian Kinerja**

$$\begin{aligned} & \text{Capaian kinerja jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi} \\ & = \text{Realisasi/Target} \times 100\% = 6/(6) \times 100\% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

- **Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan pelabuhan SDP yang beroperasi Tahun 2023 yaitu sebagai berikut senilai **Rp 103.909.418.000,-** dengan realisasi hingga triwulan IV Tahun 2023 **Rp 102.156.915.562,-** atau mencapai 98,31% dengan nomenklatur POK : Prasarana Bidang Konektivitas Darat dengan kode anggaran (4637.RBP), Pelabuhan Penyeberangan direhabilitasi dengan kode anggaran (4638.CDP.042.061.A533111), dan Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dikelola dengan kode anggaran (4638.CDP.045.051).

a.4). Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang.

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Pembenahan operasional dan perbaikan bisnis proses yang makin efektif dan efisien.
2. Digitalisasi ticketing di seluruh pelabuhan SDP.
3. Adanya penyesuaian tarif sebagai bukti komitmen Pemerintah dalam mendukung keberlanjutan bisnis angkutan penyeberangan perintis pasca kenaikan beberapa komponen penyusun tarif, harga energi dan juga untuk peningkatan layanan pelanggan.
4. Melakukan pemantauan dan pengecekan secara rutin terhadap fasilitas yang ada di pelabuhan.
5. Mengadakan diklat untuk meningkatkan kompetensi para pegawai.
6. Mewujudkan pembangunan pelabuhan yang terpadu dengan moda transportasi lainnya.

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022, dan Tahun 2023



Gambar III.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020

Realisasi kinerja jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi tahun 2023 sebesar 6 lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 sebesar 6 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100% sedangkan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebesar 6 lokasi jika dibandingkan terhadap target kinerja tahun 2022 sebesar 3 lokasi maka capaian kinerja jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi sebesar 50%. Realisasi kinerja jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi pada tahun 2021 sebesar 12 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2021 sebesar 7 lokasi, maka capaian kinerja jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi sebesar 171% dan realisasi kinerja pada tahun 2020 sebesar 12 lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2020 sebesar 12 lokasi, maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan dari 100% menjadi 171% kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 50% namun di tahun 2023 mulai mengalami kenaikan menjadi 100%,

untuk rincian capaian pada tahun 2020, 2021, 2022, dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.26 Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020

SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi						
No.	Tahun	IKP	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik / Turun
1.	2020	IKK 1.6	12	12	100%	Tetap
2.	2021	IKK 1.6	7	12	171%	Naik
3.	2022	IKK 1.6	6	3	50%	Turun
4.	2023	IKK 1.6	6	6	100%	Naik

- **Justifikasi Narasi Realisasi Turun**

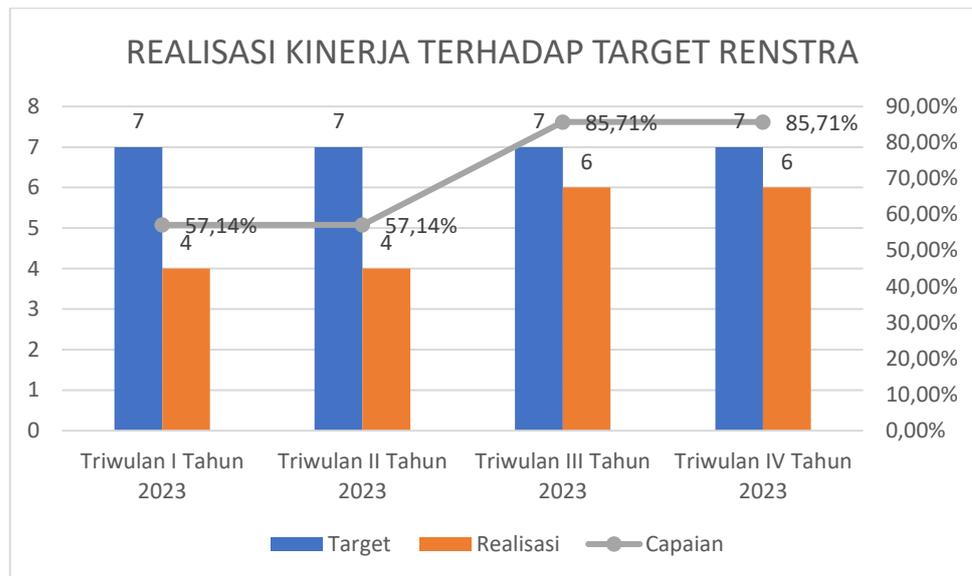
Pada tahun 2022 realisasi jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi sebesar 3 lokasi, realisasi turun dari tahun 2021 sebesar 12 lokasi dikarenakan adanya penyerahan Pelabuhan yang berada di Danau Toba kepada KSOPP Danau Toba pada tahun 2022 sehingga pada akhir tahun 2022 hanya 3 pelabuhan yang dikelola oleh BPTD Kelas II Sumatera Utara.

- **Justifikasi Narasi Capaian Turun**

Pada tahun 2022 terjadi penurunan nilai capaian pada jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi menjadi 3 lokasi. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 terbentuk KSOPP Danau Toba, sehingga dilakukan penyerahan Pelabuhan yang semula dikelola BPTD Kelas II Sumatera Utara diserahkan kepada KSOPP Danau Toba. Sehingga nilai capaian pada tahun 2022 menjadi turun.

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2020-2024

Realisasi kinerja pelaksanaan jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi tahun 2023 sebesar 6 lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024 sebesar 7 lokasi maka capaian kinerja mencapai 85,71%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.15** berikut ini:



Gambar III.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024

a.7). Benchmark Nasional

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023, capaian jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi Tahun 2023 sebesar 6 lokasi sehingga nilai capaian sebesar 100%. Berikut perbandingan jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi di BPTD Kelas II Sumut Tahun 2023 dengan rata-rata capaian nasional dipaparkan pada **Tabel III.27** di bawah ini.

Tabel III.27 Benchmark Nasional

No	Uraian	BPTD Kelas II Sumut	Rata-Rata Nasional
1	Persentase Capaian Kinerja	100%	99,30%

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian IKK Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi di BPTD Kelas II Sumut memiliki nilai yang lebih tinggi dari rata-rata capaian secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua BPTD memiliki Pelabuhan SDP sehingga dapat mempengaruhi nilai rata-rata secara nasional.

III.2.2. SK2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kinerja 2: Meningkatnya pelayanan transportasi darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara menggunakan 2 (dua) IKK, yaitu:

- IKK 2.1: Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A;
- IKK 2.3: Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP.

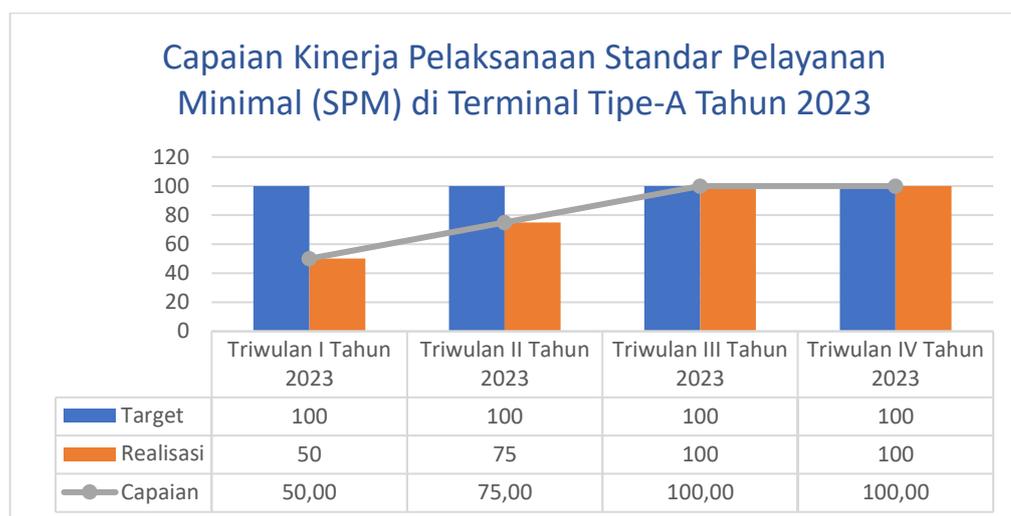
III.2.2.1. IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup (1) pelayanan keselamatan, (2) pelayanan keamanan, (3) pelayanan kehandalan/keteraturan, (4) pelayanan kenyamanan, (5) pelayanan kemudahan/keterjangkauan, dan (6) pelayanan kesetaraan. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A dihitung pada Terminal Tipe-A yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A tahun 2023 pada triwulan IV sebesar 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.16** Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2023 sebagai berikut:



Gambar III.16 Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A

Berikut ini rincian capaian setiap triwulan untuk kegiatan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2023.

Tabel III.28 Target dan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A BPTD Kelas II Sumut Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Rincian	TW-I Tahun 2023	TW-II Tahun 2023	TW-III Tahun 2023	TW-IV Tahun 2023
1	Target	100	100	100	100
2	Realiasi	50	75	100	100
3	Capaian	50%	75%	100%	100%

Tabel diatas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A BPTD Kelas II Sumut tahun 2023 terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang dihitung berdasarkan rumus kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- Pada triwulan I, target kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A pada

triwulan I sebesar 50%. Sehingga capaian kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A sebesar 50%.

- Pada triwulan II, target kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A pada triwulan II sebesar 75%. Sehingga capaian kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A sebesar 75%.
- Pada triwulan III, target kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A pada triwulan III sebesar 100%. Sehingga capaian kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A sebesar 100%.
- Pada triwulan IV, target kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A pada triwulan IV sebesar 100%. Sehingga capaian kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A sebesar 100%.

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Terminal Penumpang Tipe A bisa dipedomani melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

- **Kronologi target pada Perjanjian Kinerja**

Target persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A dalam Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2020-2024 sebesar 80%, namun pada

kenyataannya tiap tahun mengalami kenaikan pada nilai capaiannya sehingga dibuat target dalam PK BPTD Kelas II Sumatera Utara tahun 2023 sebesar 100% supaya dalam pelaksanaan SPM di terminal diharapkan semakin optimal.

- **Faktor Keberhasilan**

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A antara lain:

- 1) Komitmen pemerintah pusat dalam program pengembangan dan peningkatan pelayanan terminal penumpang tipe A;
- 2) Pelaksanaan operasional terminal Tipe-A sesuai Standar Operasional Prosedur Pengoperasian Terminal Penumpang Tipe A yang telah ditetapkan;
- 3) Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan.

- **Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan**

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A antara lain:

- 1) Ketidakpuasan masyarakat saat menggunakan layanan transportasi yang digunakan;
- 2) Pelaksanaan operasional terminal Tipe-A yang belum sesuai Standar Operasional Prosedur Pengoperasian Terminal Penumpang Tipe A yang telah ditetapkan;
- 3) Kurangnya monitoring terhadap fasilitas di terminal dan operasional kendaraan yang beroperasi.

- **Perhitungan Realisasi Kinerja**

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A digunakan rumus sebagai berikut:

IKK 2.1

$$= \frac{\text{Jumlah Nilai Indikator Jenis Pelayanan Terminal Tipe A yang memenuhi SP}}{\text{Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan SP}} \times 100\%$$

- **Perhitungan Capaian Kinerja**

Capaian kinerja pelaksanaan SPM di Terminal Tipe – A

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

- **Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan SPM di terminal tipe-A Tahun 2023 yaitu sebagai berikut senilai **Rp 11.737.488.163,-** dengan realisasi hingga Triwulan IV Tahun 2023 **Rp 11.737.488.163,-** atau mencapai 99,73%.

a.4). Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan monitoring dan pengecekan secara rutin terhadap fasilitas yang ada di terminal;
2. Melakukan peningkatan kompetensi kepada petugas Terminal Penumpang Tipe A;
3. Mengadakan kegiatan/acara yang bisa menarik minat masyarakat/operator bus untuk masuk ke terminal.

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022, dan Tahun 2023



Gambar III.17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020

Realisasi kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100% sedangkan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebesar 85% jika dibandingkan terhadap target kinerja tahun 2022 sebesar 85% maka capaian kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A sebesar 100%. Realisasi kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A pada tahun 2021 sebesar 85% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2021 sebesar 80%, maka capaian kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A sebesar 106% dan realisasi kinerja pada tahun 2020 sebesar 90% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2020 sebesar 90%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan dari 90% dengan target 90% menjadi 85% kemudian pada tahun 2022 memiliki nilai yang tetap yaitu sebesar 85%, namun di tahun 2023 mulai mengalami kenaikan menjadi 100%, untuk rincian capaian pada tahun 2020, 2021, 2022, dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.29 Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020

SK2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat						
No.	Tahun	IKP	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik / Turun
1.	2020	IKK 2.1	90	90	100%	Tetap
2.	2021	IKK 2.1	80	85	106%	Turun
3.	2022	IKK 2.1	85	85	100%	Tetap
4.	2023	IKK 2.1	100	100	100%	Naik

- **Justifikasi Narasi Realisasi Turun**

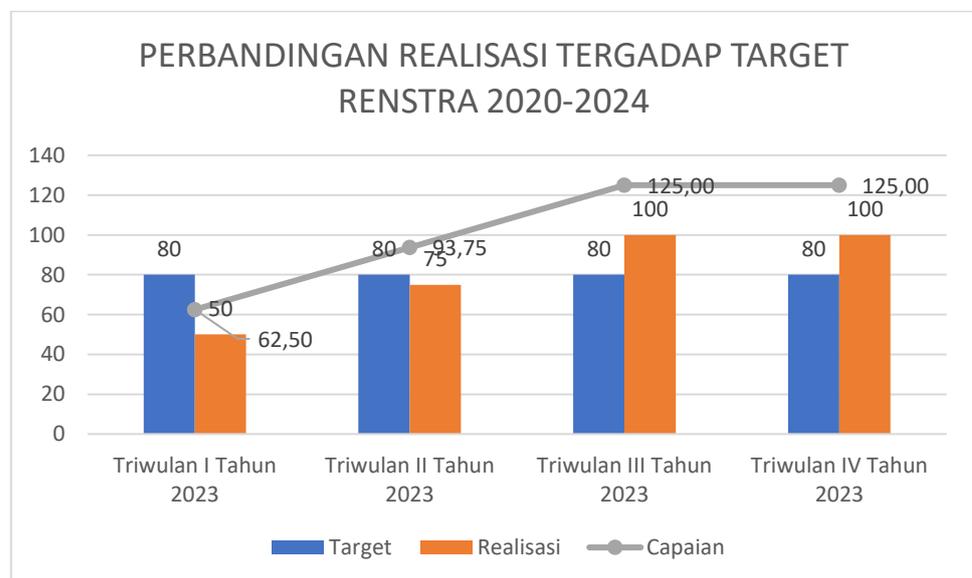
Pada tahun 2021 realisasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A sebesar 85%, realisasi turun dari tahun 2020 sebesar 90% dikarenakan masih adanya pelaksanaan operasional terminal Tipe-A yang belum sesuai

Standar Operasional Prosedur Pengoperasian Terminal Penumpang Tipe A yang telah ditetapkan.

- **Justifikasi Narasi Capaian Turun**

Pada tahun 2022 terjadi penurunan nilai capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A menjadi 100%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 terjadi kenaikan pada nilai target sebesar 85%, sehingga dengan nilai realisasi yang sama tetapi akan berbeda pada nilai capaiannya.

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2020-2024



Gambar III.18 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024

Realisasi kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024 sebesar 80% maka capaian kinerja mencapai 125%. Berikut ini merupakan capaian tahun 2023 terhadap target Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024.

Tabel III.30 Realiasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024

	Target Renstra 2020-2024	Realisasi	Capaian
Triwulan I Tahun 2023	80	50	62,5
Triwulan II Tahun 2023	80	75	93,75
Triwulan III Tahun 2023	80	100	125
Triwulan IV Tahun 2023	80	100	125

Capaian kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A tahun 2023 dalam rencana strategis BPTD Kelas II Sumatera Utara tahun 2020-2024 sebesar 125% jika dibandingkan dengan capaian terhadap perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar 100%, hal ini disebabkan target pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A pada renstra lebih rendah daripada target pada perjanjian kinerja maka capaian kinerja terhadap rencana strategis lebih besar nilainya sebesar 125%.

a.7). Benchmark Nasional

Untuk *benchmark* pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A Tahun 2023. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023, capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A Tahun 2023 adalah 100% dan 100%. Berikut perbandingan persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A BPTD Kelas II Sumut Tahun 2023 dengan rata-rata capaian nasional dipaparkan pada **Tabel III.31** di bawah ini.

Tabel III.31 *Benchmark* Nasional

No	Uraian	BPTD Kelas II Sumut	Rata-Rata Nasional
1	Persentase Capaian Kinerja	100%	97,33%

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian IKK persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A BPTD Kelas II Sumut memiliki nilai yang lebih tinggi dari rata-rata capaian secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A BPTD Kelas II Sumut sudah baik.

III.2.2.2. IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelabuhan Penyeberangan sebagai tempat pelayanan jasa angkutan penyeberangan, wajib juga memenuhi SPM yang telah ditentukan dalam ketentuan perundangan yang berlaku guna memastikan kenyamanan dan keamanan pengguna jasa. Adapun BPTD Sumatera Utara sebagai pengawas pemenuhan SPM di Pelabuhan SDP juga bersinergi dengan para operator Pelabuhan SDP yang ada di wilayah Sumatera Utara untuk memeriksa dan mengevaluasi pemenuhan SPM pada pelabuhan-pelabuhan SDP yang ada di wilayah Sumatera Utara tersebut.

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Realisasi kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP tahun 2023 pada triwulan IV sebesar 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.19** Grafik Capaian IKK Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2023 sebagai berikut:



Gambar III.19 Grafik Capaian IKK Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2023

Berikut ini rincian capaian setiap triwulan untuk persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023.

Tabel III.32 Target dan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP BPTD Kelas II Sumut Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Rincian	TW-I Tahun 2023	TW-II Tahun 2023	TW-III Tahun 2023	TW-IV Tahun 2023
1	Target	100	100	100	100
2	Realiasi	48,27	64,80	83,17	100
3	Capaian	48,27%	64,80%	83,17%	100%

Tabel diatas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP BPTD Kelas II Sumut terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang dihitung berdasarkan rumus persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- Pada triwulan I, target persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP pada triwulan

I sebesar 48,27%. Sehingga capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP sebesar 48,27%.

- Pada triwulan II, target persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP pada triwulan II sebesar 64,80%. Sehingga capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP sebesar 64,80%.
- Pada triwulan III, target persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP pada triwulan III sebesar 83,17%. Sehingga capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP sebesar 83,17%.
- Pada triwulan IV, target persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP pada triwulan IV sebesar 100%. Sehingga capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP sebesar 100%.

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP bisa dipedomani melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan.

- **Kronologi target pada Perjanjian Kinerja**

Target persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP dalam Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2020-2024 sebesar 85%, sesuai dengan arahan pimpinan untuk target dalam PK BPTD Kelas II Sumatera Utara tahun 2023 terkait persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP untuk

meningkatkan pelayanan transportasi darat dibuat sebesar 100% supaya dalam pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP diharapkan semakin optimal.

- **Faktor Keberhasilan**

1. Komitmen pemerintah pusat dalam program pengembangan dan peningkatan pelayanan Pelabuhan SDP;
2. Pelaksanaan operasional Pelabuhan SDP sesuai Standar Operasional Prosedur Pengoperasian Pelabuhan SDP yang telah ditetapkan;
3. Memberlakukan sanksi yang tegas dan memberikan efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan penyeberangan dalam mematuhi jam pelayanan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- **Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan**

1. SDM yang kurang memadai dan berkompoten;
2. Pelaksanaan operasional Pelabuhan SDP yang belum sesuai Standar Operasional Prosedur Pengoperasian Pelabuhan SDP yang telah ditetapkan;
3. Masih ditemukannya kendaraan ODOL (*Over Dimensi Over Load*) yang menggunakan fasilitas angkutan penyeberangan, sehingga dapat membahayakan kendaraan dan pengguna jasa lain.

- **Perhitungan Realisasi Kinerja**

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP digunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} IKK\ 2.3 &= \frac{\text{Jumlah pelabuhan yang memenuhi SPM}}{\text{Jumlah pelabuhan yang dipantau}} \times 100\% \\ &= \frac{6}{6} \times 100\% = 100 \end{aligned}$$

- **Perhitungan Capaian Kinerja**

$$\begin{aligned} \text{Capaian kinerja pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP} \\ &= \text{Realisasi/Target} \times 100\% \\ &= 100/100 \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

- **Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP Tahun 2023 yaitu sebagai berikut senilai **Rp 103.909.418.000,-** dengan realisasi hingga triwulan IV Tahun 2023 **Rp 102.156.915.850,-** atau mencapai 98,31% dengan nomenklatur POK : Prasarana Bidang Konektivitas Darat dengan kode anggaran (4637.RBP), Pelabuhan Penyeberangan direhabilitasi dengan kode anggaran (4638.CDP.042.061.A533111), dan Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dikelola dengan kode anggaran (4638.CDP.045.051).

a.4). Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan monitoring dan pengecekan secara rutin terhadap fasilitas dan pengoperasian yang ada di pelabuhan SDP;
2. Peningkatan keamanan dan ketertiban pelabuhan SDP;
3. Pemeriksaan kapal dalam rangka penerbitan persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan;
4. Menyelenggarakan diklat untuk mengembangkan keterampilan dan kompetensi petugas di pelabuhan SDP;
5. Melakukan sosialisasi kepada operator kapal terkait standar pelayanan minimal pelabuhan SDP.

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022, dan Tahun 2023



Gambar III.20 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020

Realisasi kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP tahun 2023 sebesar 97,37% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 97,37% sedangkan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebesar 85% jika dibandingkan terhadap target kinerja tahun 2022 sebesar 85% maka capaian kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP sebesar 100%. Realisasi kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP pada tahun 2021 sebesar 85% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2021 sebesar 85%, maka capaian kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP sebesar 100% dan realisasi kinerja pada tahun 2020 sebesar 90% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2020 sebesar 90%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan dari 90% dengan target 90% menjadi 85% kemudian pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 memiliki nilai realisasi yang sama sebesar 85%, dan pada tahun 2023 mengalami

kenaikan sebesar 100%. Untuk rincian capaian pada tahun 2020, 2021, 2022, dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.33 Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020

SK2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat						
No.	Tahun	IKP	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik / Turun
1.	2020	IKK 2.3	90	90	100%	Tetap
2.	2021	IKK 2.3	85	85	100%	Turun
3.	2022	IKK 2.3	85	85	100%	Tetap
4.	2023	IKK 2.3	100	100	100%	Naik

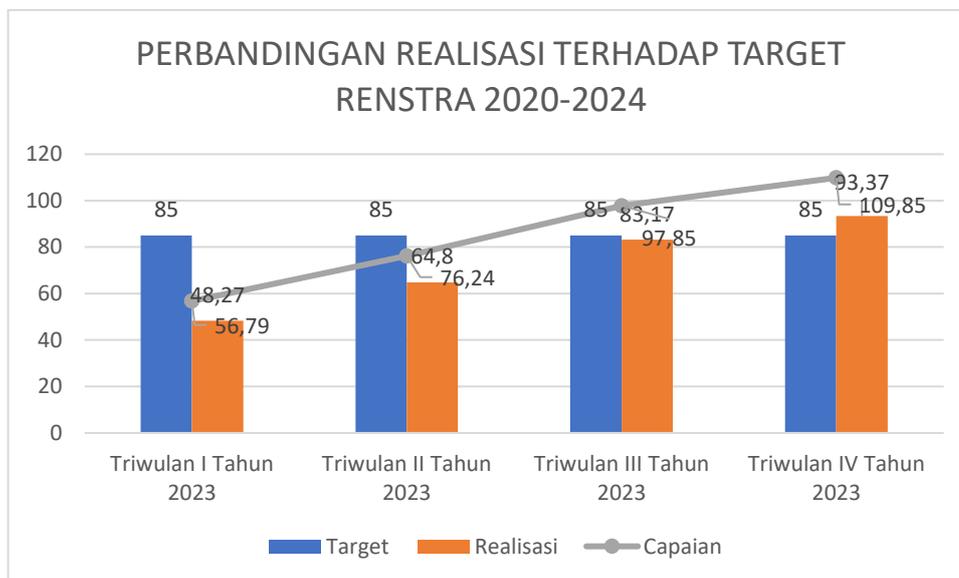
- **Justifikasi Narasi Realisasi Turun**

Pada tahun 2021 realisasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP sebesar 85%, realisasi turun dari tahun 2020 sebesar 90% dikarenakan masih adanya pelaksanaan operasional Pelabuhan SDP maupun kapal yang belum sesuai Standar Operasional Prosedur Pengoperasian Pelabuhan SDP yang telah ditetapkan.

- **Justifikasi Narasi Capaian Turun**

Pada tahun 2023 terjadi penurunan nilai capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP menjadi 97,37%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2023 terjadi kenaikan pada nilai target sebesar 100%, sehingga walaupun dengan nilai realisasi lebih besar dari tahun 2022 tetapi akan berbeda pada nilai capaiannya.

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2020-2024



Gambar III.21 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024

Realisasi kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024 sebesar 85% maka capaian kinerja mencapai 109,87%. Berikut ini merupakan capaian tahun 2023 terhadap target Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024.

Tabel III.34 Realiasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024

	Target Renstra 2020-2024	Realisasi	Capaian
Triwulan I Tahun 2023	85	48,27	56,79
Triwulan II Tahun 2023	85	64,8	76,24
Triwulan III Tahun 2023	85	83,17	97,85
Triwulan IV Tahun 2023	85	100	109,87

Capaian kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP tahun 2023 dalam rencana strategis BPTD Kelas II Sumatera Utara tahun 2020-2024 sebesar

109,87% jika dibandingkan dengan capaian terhadap perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar 100%, hal ini disebabkan karena target pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP pada renstra lebih rendah daripada target pada perjanjian kinerja maka capaian kinerja terhadap rencana strategis lebih besar nilainya sebesar 109,97%.

a.7). Benchmark Nasional

Untuk *benchmark* pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2023. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023, capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2023 adalah 100%. Berikut perbandingan persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023 dengan rata-rata capaian nasional dipaparkan pada **Tabel III.35** di bawah ini.

Tabel III.35 *Benchmark* Nasional

No	Uraian	BPTD Kelas II Sumut	Rata-Rata Nasional
1	Persentase Capaian Kinerja	100%	97,31%

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian IKK pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP BPTD Kelas II Sumatera Utara memiliki nilai yang lebih tinggi dari rata-rata capaian secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP BPTD Kelas II Sumatera Utara sudah cukup baik namun tetap perlu adanya perbaikan secara berkala supaya dapat mempertahankan nilai capaian di tahun 2023.

III.2.3. SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 diukur melalui 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal;
2. IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat;
3. IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan;
4. IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan;
5. IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor;
6. IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP.

III.2.3.1. IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Kebutuhan perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan merupakan perhitungan dari 9 (sembilan) item perlengkapan jalan dengan satuan yang berbeda. Adapun 9 (sembilan) item dimaksud meliputi:

1. Marka Jalan;
2. Rambu Lalu Lintas;
3. Patok Lalu Lintas;
4. Paku Jalan;
5. Pagar Pengaman Jalan;
6. Alat Penerangan Jalan;
7. Lampu Peringatan Pemakai Jalan;
8. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
9. Cermin Tikungan.

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian kinerja perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal tahun 2023 pada triwulan IV sebesar 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.22** Grafik Capaian IKK Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Tahun 2023 sebagai berikut:



Gambar III.22 Grafik Capaian IKK Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Tahun 2023

Berikut ini rincian capaian setiap triwulan untuk persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023.

Tabel III.36 Target dan Realisasi Kinerja Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal BPTD Kelas II Sumut Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Rincian	TW-I Tahun 2023	TW-II Tahun 2023	TW-III Tahun 2023	TW-IV Tahun 2023
1	Target	75	75	20	20
2	Realiasi	14	62,73	19,62	20
3	Capaian	18,67%	83,64%	98,10%	100%

Tabel diatas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang

terhadap kondisi ideal BPTD Kelas II Sumut terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang dihitung berdasarkan rumus persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- Pada triwulan I, target persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal yang ditetapkan sebesar 75%. Realisasi perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada triwulan I sebesar 14%. Sehingga capaian perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal sebesar 18,67%.
- Pada triwulan II, target persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal yang ditetapkan sebesar 75%. Realisasi perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada triwulan II sebesar 62,73%. Sehingga capaian perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal sebesar 83,64%.
- Pada triwulan III, target persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal yang ditetapkan sebesar 20%. Realisasi perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada triwulan III sebesar 19,62%. Sehingga capaian perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal sebesar 98,11%.
- Pada triwulan IV, target persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal yang ditetapkan sebesar 20%. Realisasi perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada triwulan IV sebesar 20%. Sehingga capaian perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal sebesar 100%.

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Perlengkapan jalan bisa dipedomani melalui Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor:

SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 Tanggal 14 November 2013
Tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan.

- **Kronologi target pada Perjanjian Kinerja**

Target persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal dalam Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2020-2024 sebesar 9%, namun pada bulan Agustus terjadi perubahan target pada IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal sebesar 20% dikarenakan adanya perubahan data kebutuhan perlengkapan jalan pada wilayah kerja.

- **Faktor Keberhasilan**

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pemasangan perlengkapan jalan yang terpasang terhadap kondisi ideal antara lain:

1. Komitmen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemasangan perlengkapan jalan;
2. Perencanaan yang matang dalam pemasangan perlengkapan jalan;
3. Kontrak pekerjaan tepat waktu;
4. Monitoring dan evaluasi yang rutin terhadap kondisi perlengkapan jalan yang telah terpasang dan perlengkapan jalan yang dibutuhkan.

- **Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan**

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pelaksanaan pemasangan perlengkapan jalan yang terpasang terhadap kondisi ideal antara lain:

1. Masih banyak perlengkapan jalan yang hilang dan dirusak masyarakat tidak bertanggungjawab;
2. Perencanaan yang belum tepat terhadap pemasangan perlengkapan jalan terhadap kondisi ideal.
3. Pekerjaan tidak selesai dengan waktu yang telah ditentukan;
4. Monitoring dan evaluasi yang masih kurang terhadap kondisi perlengkapan jalan yang telah terpasang dan perlengkapan jalan yang dibutuhkan.

- **Perhitungan Realisasi Kinerja**

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK\ 3.1 = \frac{\text{Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang}}{\text{Jumlah kebutuhan perlengkapan jalan}} \times 100\%$$

- **Perhitungan Capaian Kinerja**

Capaian kinerja persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{20}{20} 100\% = 100\%$$

- **Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan pemasangan perlengkapan jalan terhadap kondisi ideal Tahun 2023 yaitu sebagai berikut senilai **Rp 32.382.828.000,-** dengan realisasi hingga triwulan IV Tahun 2023 **Rp 32.162.990.000,-** atau mencapai 99,32%.

a.4). Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Komitmen antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam program pengembangan dan peningkatan perlengkapan jalan;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kondisi perlengkapan jalan yang telah terpasang dan perlengkapan jalan yang dibutuhkan secara berkala.

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022, dan Tahun 2023



Gambar III.23 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020

Realisasi persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal tahun 2023 sebesar 20% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 sebesar 20% maka capaian kinerja mencapai 100% sedangkan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebesar 9% jika dibandingkan terhadap target kinerja tahun 2022 sebesar 9% maka capaian perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal sebesar 100%. Realisasi perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada tahun 2021 sebesar 9% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2021 sebesar 9%, maka capaian perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal sebesar 100% dan realisasi kinerja pada tahun 2020 sebesar 80% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2020 sebesar 80%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan dari 80% dengan target 80% menjadi 9% kemudian pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 memiliki nilai realisasi yang sama sebesar 9%, dan pada tahun

2023 mengalami kenaikan sebesar 20%. Untuk rincian capaian pada tahun 2020, 2021, 2022, dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 37 Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020

SK4 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat						
No.	Tahun	IKP	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik / Turun
1.	2020	IKK 3.1	80	80	100%	Tetap
2.	2021	IKK 3.1	9	9	100%	Turun
3.	2022	IKK 3.1	9	9	100%	Tetap
4.	2023	IKK 3.1	20	20	100%	Naik

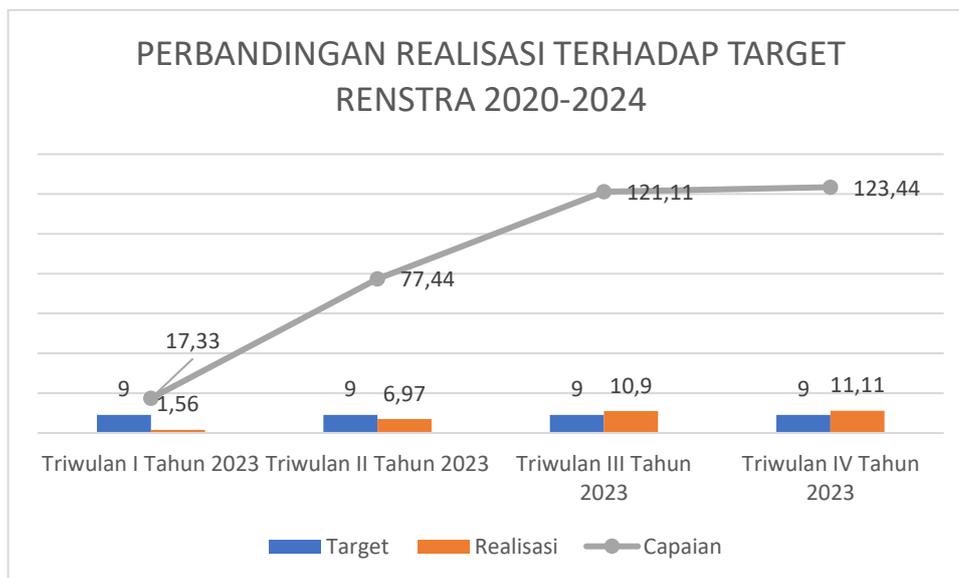
- **Justifikasi Narasi Realisasi Turun**

Pada tahun 2021 realisasi perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal sebesar 9%, realisasi turun dari tahun 2020 sebesar 80% hal dikarenakan terdapat perubahan jumlah kebutuhan perlengkapan jalan di wilayah kerja BPTD Kelas II Sumatera Utara.

- **Justifikasi Narasi Capaian Turun**

Selama 4 tahun terakhir untuk nilai capaian perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal memiliki nilai yang konsisten yaitu sebesar 100%. Sehingga tidak ada nilai capaian yang mengalami penurunan.

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2020-2024



Gambar III.24 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024

Realisasi perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal tahun 2023 sebesar 20% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024 sebesar 9% maka capaian kinerja mencapai 123,44%. Berikut ini merupakan capaian tahun 2023 terhadap target Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024.

Tabel III. 38 Realiasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024

	Target Renstra 2020-2024	Realisasi	Capaian
Triwulan I Tahun 2023	9	14	17,33
Triwulan II Tahun 2023	9	62,73	77,44
Triwulan III Tahun 2023	9	19,62	121,11
Triwulan IV Tahun 2023	9	20	123,44

Capaian kinerja perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal tahun 2023 dalam rencana strategis BPTD Kelas II Sumatera Utara tahun 2020-2024 sebesar

123,44% jika dibandingkan dengan capaian terhadap perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar 55,55%, hal ini disebabkan karena target perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada renstra lebih rendah daripada target pada perjanjian kinerja maka capaian kinerja terhadap rencana strategis lebih besar nilainya sebesar 123,44%.

a.7). Benchmark Nasional

Untuk *benchmark* perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Tahun 2023. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023, capaian persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal tahun 2023 adalah 100%. Berikut perbandingan persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023 dengan rata-rata capaian nasional dipaparkan pada **Tabel III.39** di bawah ini.

Tabel III.39 *Benchmark* Nasional

No	Uraian	BPTD Kelas II Sumut	Rata-Rata Nasional
1	Persentase Capaian Kinerja	100%	99,02%

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian IKK persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal BPTD Kelas II Sumatera Utara memiliki nilai yang lebih tinggi dari rata-rata capaian secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal BPTD Kelas II Sumatera Utara sudah tercukupi.

III.2.3.1. IKK 3.2 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat yang dimaksud adalah perbandingan antara jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran dengan jumlah kendaraan yang masuk dalam UPPKB itu sendiri. Adapun jenis pelanggaran yang disebut berupa pada kelengkapan administrasi, pemuatan, berat kendaraan beserta muatan dan dimensi kendaraan. Semakin besar persentase pelanggaran yang ditemukan, maka dinilai buruk. Sebaliknya jika kecil persentase pelanggaran, maka dinilai baik.

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Realisasi kinerja pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat tahun 2023 pada triwulan IV sebesar 35% sehingga nilai capaian mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.25** Grafik Capaian IKK Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2023 sebagai berikut:



Gambar III.25 Grafik Capaian IKK Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2023

Berikut ini rincian capaian setiap triwulan untuk persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023.

Tabel III.40 Target dan Realisasi Kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat BPTD Kelas II Sumut Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Rincian	TW-I Tahun 2023	TW-II Tahun 2023	TW-III Tahun 2023	TW-IV Tahun 2023
1	Target	35	35	35	35
2	Realiasi	27,75	35,65	63,66	35
3	Capaian	120,71%	98,14%	18,11%	100%

Tabel diatas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat BPTD Kelas II Sumut terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang dihitung berdasarkan rumus persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- Pada triwulan I, target persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat yang ditetapkan sebesar 35%. Realisasi pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat pada triwulan I sebesar 27,75%. Sehingga capaian pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat sebesar 120,71%.
- Pada triwulan II, target persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat yang ditetapkan sebesar 35%. Realisasi pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat pada triwulan II sebesar 35,65%. Sehingga capaian pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat sebesar 98,14%.
- Pada triwulan III, target persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat yang ditetapkan sebesar 35%. Realisasi pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat pada triwulan III sebesar 63,66%.

Sehingga capaian pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat sebesar 18,11%.

- Pada triwulan IV, target persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat yang ditetapkan sebesar 35%. Realisasi pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat pada triwulan IV sebesar 35%. Sehingga capaian pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat sebesar 100%.

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan bisa dipedomani melalui Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.736/AJ/108/DRJD/2017 Tanggal 21 Februari 2017 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

- **Narasi kronologi target pada Perjanjian Kinerja**

Target persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat dalam Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2020-2024 sebesar 35% sehingga dibuat target dalam PK BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023 sebesar 35%, selain itu juga harus memperhatikan pagu anggaran untuk kegiatan ini supaya nilai dalam pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan target yang ditentukan.

- **Faktor Keberhasilan**

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Kesadaran dari pihak perusahaan angkutan barang akan bahayanya *Over Dimension Over Load* (ODOL);
2. Adanya sifat kooperatif antara pengemudi dengan petugas pemeriksa;

3. Ketegasan petugas dalam melakukan pemeriksaan kendaraan.

- **Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan**

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pelaksanaan pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Para pengemudi yang kurang paham akan aturan yang berlaku;
2. Masih banyak kendaraan yang tidak memasuki UPPKB untuk melakukan pengecekan kelaikan kendaraan;
3. SDM yang kurang memadai.

- **Perhitungan Realisasi Kinerja**

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat digunakan rumus sebagai berikut:

IKK 3.2

$$= \frac{\text{Jumlah kendaraan barang yang melakukan pelanggaran}}{\text{Jumlah kendaraan yang masuk pada UPPKB}} \times 100\%$$

- **Perhitungan Capaian Kinerja**

Capaian kinerja pelanggaran pada UPPKB

$$= (\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})) / \text{Target} \times 100\% \\ = (35 - (35 - 35)) / 35 \times 100\% = 100\%$$

- **Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan**

Adapun anggaran terkait pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2023 yaitu sebagai berikut senilai **Rp 7.895.477.000,-** dengan realisasi hingga triwulan IV Tahun 2023 **Rp 7.881.469.099,-** atau mencapai 99,82% dengan nomenklatur POK : Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola dengan kode anggaran (4639.CDP.077 052).

a.4). Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang dilakukan upaya-upaya sebagai berikut, antara lain:

1. Menyelenggarakan Gakkum bersama Dinas Perhubungan setempat, anggota Polisi, serta Jasa Raharja;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelayanan UPPKB;
3. Mengadakan bimbingan teknis dan peningkatan kompetensi SDM terhadap petugas UPPKB;
4. Mengadakan sosialisasi terkait ODOL terhadap pemilik angkutan barang ataupun pihak-pihak perusahaan;
5. Melakukan pengawasan dengan tertib.

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022, dan Tahun 2023



Gambar III.26 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020

Realisasi persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat tahun 2023 sebesar 35% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 sebesar 35% maka capaian kinerja mencapai 100% sedangkan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebesar 35% jika dibandingkan terhadap target kinerja tahun 2022 sebesar 35% maka capaian pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat sebesar 100%. Realisasi pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat pada tahun 2021 sebesar 35% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2021 sebesar

35%, maka capaian pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat sebesar 100% dan realisasi kinerja pada tahun 2020 sebesar 80% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2020 sebesar 80%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan dari 80% dengan target 80% menjadi 35% dengan nilai target 35% kemudian pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 memiliki nilai realisasi yang sama sebesar 35%. Untuk rincian capaian pada tahun 2020, 2021, 2022, dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.41 Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020

SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat						
No.	Tahun	IKP	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik / Turun
1.	2020	IKK 3.2	80	80	100,00%	Tetap
2.	2021	IKK 3.2	35	35	100,00%	Turun
3.	2022	IKK 3.2	35	35	100,00%	Tetap
4.	2023	IKK 3.2	35	35	100,00%	Tetap

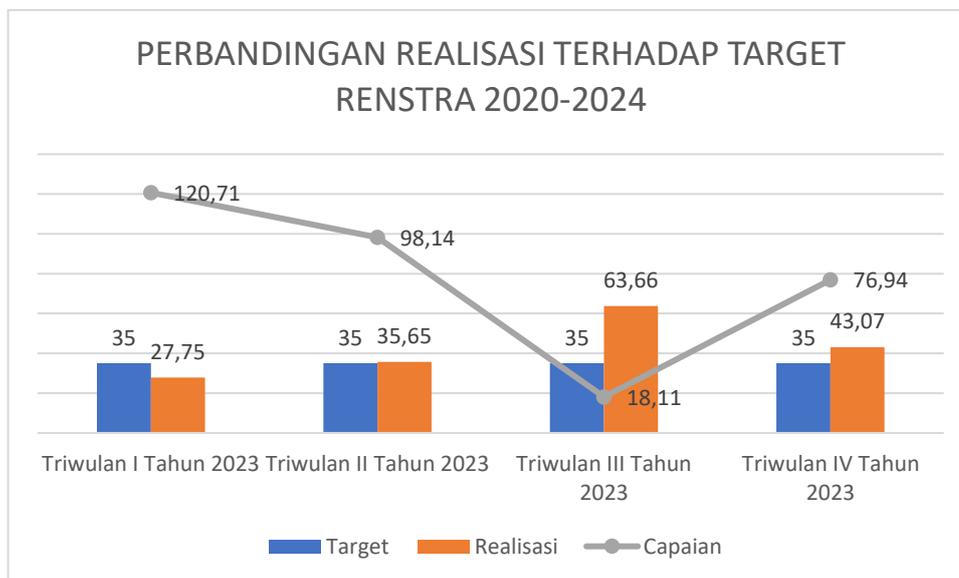
- **Justifikasi Narasi Realisasi Turun**

Pada tahun 2021 realisasi pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat sebesar 35%, realisasi turun dari tahun 2020 sebesar 80% hal dikarenakan jumlah kendaraan yang melakukan pelanggaran semakin sedikit sehingga nilai realisasi semakin kecil maka akan semakin baik.

- **Justifikasi Narasi Capaian Turun**

Selama empat tahun terakhir nilai capaian pada persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat memiliki nilai yang stabil yaitu 100%, sehingga tidak ada nilai capaian yang turun.

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2020-2024



Gambar III.27 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024

Realisasi pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat tahun 2023 terhadap target kinerja pada tahun 2023 dalam Renstra sebesar 35% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024 sebesar 35% maka capaian kinerja mencapai 100%. Berikut ini merupakan capaian tahun 2023 terhadap target Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024.

Tabel III.42 Realiasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024

	Target Renstra 2020-2024	Realisasi	Capaian
Triwulan I Tahun 2023	35	27,75	120,71
Triwulan II Tahun 2023	35	35,65	98,14
Triwulan III Tahun 2023	35	63,66	18,11
Triwulan IV Tahun 2023	35	35,00	100

Capaian kinerja pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat tahun 2023 dalam rencana strategis

BPTD Kelas II Sumatera Utara tahun 2020-2024 sebesar 100% memiliki nilai yang sama dengan capaian terhadap perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar 100%.

a.7). **Benchmark Nasional**

Untuk *benchmark* pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2023. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023, capaian persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat tahun 2023 adalah 100%. Berikut perbandingan persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023 dengan rata-rata capaian nasional dipaparkan pada **Tabel III.43** di bawah ini.

Tabel III.43 *Benchmark Nasional*

No	Uraian	BPTD Kelas II Sumut	Rata-Rata Nasional
1	Persentase Capaian Kinerja	100%	103,93

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian IKK persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat BPTD Kelas II Sumatera Utara memiliki nilai capaian yang lebih tinggi dari rata-rata capaian secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat masih perlu adanya perhatian terhadap kendaraan yang melanggar dan perlu adanya tindakan yang tegas dari pihak yang berwenang.

III.2.3.3. IKK 3.5 Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi. Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat). Jumlah masyarakat dihitung berdasarkan laporan pelaksanaan disetiap Balai Pengelola Transportasi Darat dan pelaksanaan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan. Sasaran peserta dari kegiatan Pekan Keselamatan Jalan yaitu mulai dari anak-anak TK hingga SMA,

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian kinerja jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan tahun 2023 pada triwulan IV sebesar 100%. Kegiatan Pekan Keselamatan Jalan Tahun 2023 telah dilaksanakan pada bulan Oktober. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.28** Grafik Capaian IKK Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2023 sebagai berikut:



Gambar III.28 Grafik Capaian IKK Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2023

Berikut ini rincian capaian setiap triwulan untuk persentase jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Darat BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023.

Tabel III.44 Target dan Realisasi Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan BPTD Kelas II Sumut Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Rincian	TW-I Tahun 2023	TW-II Tahun 2023	TW-III Tahun 2023	TW-IV Tahun 2023
1	Target	1000	1000	1000	1000
2	Realiasi	0	0	0	1000
3	Capaian	0%	0%	0%	100%

Tabel diatas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan BPTD Kelas II Sumut terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang dihitung berdasarkan rumus jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- Pada triwulan I, target jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan yang

ditetapkan sebesar 1000 orang. Realisasi jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan pada triwulan I sebesar 0 orang. Sehingga capaian jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan sebesar 0%.

- Pada triwulan II, target jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan yang ditetapkan sebesar 1000 orang. Realisasi jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan pada triwulan II sebesar 0 orang. Sehingga capaian jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan sebesar 0%.
- Pada triwulan III, target jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan yang ditetapkan sebesar 1000 orang. Realisasi jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan pada triwulan III sebesar 0 orang. Sehingga capaian jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan sebesar 0%.
- Pada triwulan IV, target jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan yang ditetapkan sebesar 1000 orang. Realisasi jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan pada triwulan IV sebesar 1000 orang. Sehingga capaian jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan sebesar 100%.

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Sosialisasi mengenai keselamatan transportasi jalan bisa dipedomani melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan.

- **Kronologi target pada Perjanjian Kinerja**

Target jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan dalam Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2020-2024 sebesar 3000 orang, sehingga untuk mencapai target PK di tahun 2023 maka dibuat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebesar 1000 orang. Selain itu juga harus memperhatikan pagu anggaran untuk kegiatan ini supaya nilai dalam pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan target yang ditentukan.

- **Faktor Keberhasilan**

Keberhasilan jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan dipengaruhi oleh:

1. Partisipasi yang tinggi dari masyarakat setempat dalam pelaksanaan sosialisasi keselamatan jalan;
2. Kerjasama yang baik antara BPTD dengan pihak sekolah;
3. Persiapan sosialisasi keselamatan transportasi yang matang serta acara yang menarik.

- **Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan**

Faktor kegagalan tidak tercapainya Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan antara lain dipengaruhi oleh:

1. Faktor cuaca yang sulit diprediksi;
2. Kurangnya dukungan dari instansi terkait dengan keselamatan transportasi jalan;
3. Sasaran masyarakat yang tersosialisasi kurang tepat.

- **Perhitungan Realisasi Kinerja**

IKK 3.5

= Jumlah kumulatif masyarakat yang mendapat sosialisasi pada PNKJ

= 1000 Orang

- **Perhitungan Capaian Kinerja**

Capaian kinerja jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan

= Realisasi/Target × 100%

= 1000/1000 x 100% = 100%

- **Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan**

Adapun anggaran terkait jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Tahun 2023 yaitu sebagai berikut senilai **Rp 300.000.000,-** dengan realisasi hingga triwulan IV tahun 2023 **Rp 2.991.47.220,-** atau mencapai 99,72% dengan nomenklatur POK : Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) dengan kode anggaran (4639.PEH.049 051).

a.4). Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya, antara lain:

1. Merencanakan kegiatan sosialisasi keselamatan transportasi jalan dengan matang;
2. Memberikan hiburan yang menarik dalam acara sosialisasi keselamatan transportasi jalan;
3. Menjalin kerjasama yang baik dengan instansi terkait demi terciptanya keberhasilan acara sosialisasi keselamatan transportasi jalan.

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022, dan Tahun 2023



Gambar III.29 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020

Realisasi jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan tahun 2023 sebesar 1000 orang, jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 sebesar 1000 orang maka capaian kinerja mencapai 100% sedangkan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebesar 1000 orang jika dibandingkan terhadap target kinerja tahun 2022 sebesar 1000 orang maka capaian jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan sebesar 100%. Realisasi jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan pada tahun 2021 sebesar 1000 orang jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2021 sebesar 1000 orang, maka capaian jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan sebesar 100% dan realisasi kinerja pada tahun 2020 sebesar 2000 orang jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2020 sebesar 2000 orang, maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan yaitu sebesar 1000 orang, kemudian pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 memiliki realisasi yang sama sebesar 1000 orang. Untuk rincian capaian pada tahun 2020, 2021, 2022, dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.45 Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020

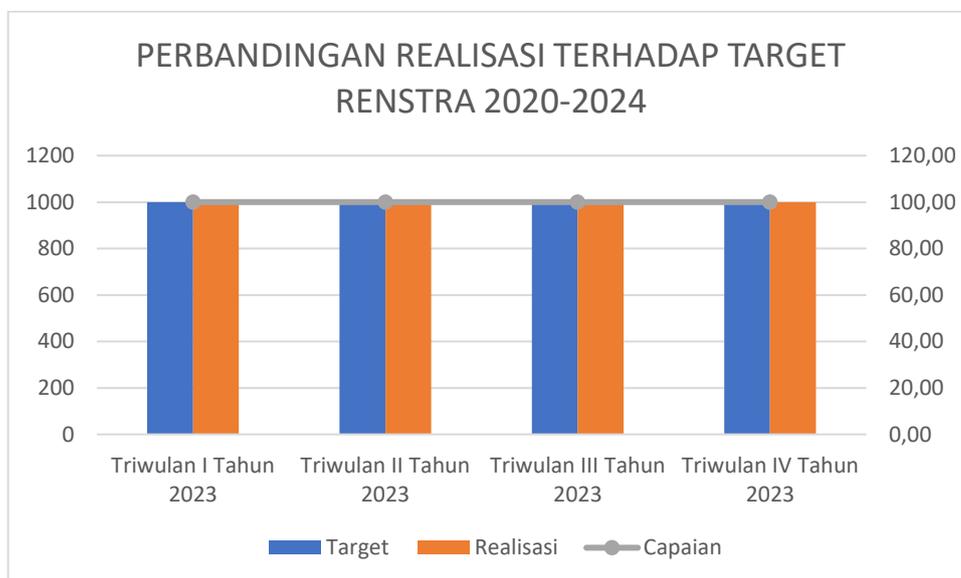
SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat						
No.	Tahun	IKP	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik / Turun
1.	2020	IKK 3.5	2000	2000	100%	Tetap
2.	2021	IKK 3.5	1000	1000	100%	Turun
3.	2022	IKK 3.5	1000	1000	100%	Tetap
4.	2023	IKK 3.5	1000	1000	100%	Tetap

- **Justifikasi Narasi Realisasi Turun**

Pada tahun 2021 realisasi jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan sebesar 1000 orang, realisasi turun dari tahun 2020 sebesar 2000

orang. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 terjadi penurunan target menjadi 1000 orang.

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2020-2024



Gambar III.30 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024

Realisasi jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan tahun 2023 terhadap target kinerja pada tahun 2023 dalam Renstra sebesar 1000 orang jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024 sebesar 1000 orang maka capaian kinerja mencapai 100%. Berikut ini merupakan capaian tahun 2023 terhadap target Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024.

Tabel III.46 Realiasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024

	Target Renstra 2020-2024	Realisasi	Capaian
Triwulan I Tahun 2023	1000	1000	100,00
Triwulan II Tahun 2023	1000	1000	100,00
Triwulan III Tahun 2023	1000	1000	100,00

	Target Renstra 2020-2024	Realisasi	Capaian
Triwulan IV Tahun 2023	1000	1000	100,00

Capaian kinerja jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan tahun 2023 dalam rencana strategis BPTD Kelas II Sumatera Utara tahun 2020-2024 sebesar 100%.

a.7). **Benchmark Nasional**

Untuk *benchmark* jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Tahun 2023. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023, persentase capaian jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan tahun 2023 adalah 100%. Berikut perbandingan persentase jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023 dengan rata-rata capaian nasional dipaparkan pada **Tabel III.47** di bawah ini.

Tabel III.47 *Benchmark Nasional*

No	Uraian	BPTD Kelas II Sumut	Rata-Rata Nasional
1	Persentase Capaian Kinerja	100%	111,22%

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian IKK jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan BPTD Kelas II Sumatera Utara tahun 2023 memiliki nilai yang lebih rendah dari rata-rata capaian secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh unit kerja Balai Pengelola Transportasi Darat telah melaksanakan kegiatan sosialisasi keselamatan transportasi jalan.

III.2.3.4. IKK 7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala

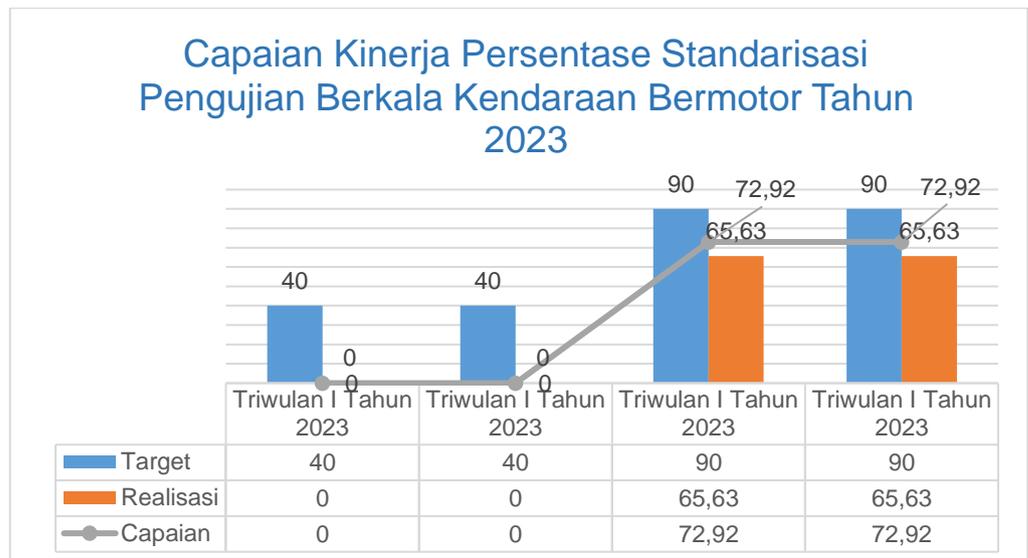
Kendaraan Bermotor

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pemberian akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan persentase jumlah kumulatif Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang telah terakreditasi baik milik pemerintah daerah maupun swasta sampai dengan tahun ke n dibandingkan dengan jumlah Pemerintah Daerah di wilayah Sumatera Utara dan jumlah Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) milik swasta. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah Pemda Seluruh Pemerintah Kota dan Seluruh Pemerintah Kabupaten di Sumatera Utara.

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian kinerja persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor tahun 2023 pada triwulan IV sebesar 72,92%. Jumlah UPUBKB di Sumatera Utara yang sudah terakreditasi sampai bulan Desember terdapat 21 unit dari 33 UPUBKB Kota/Kabupaten di Sumatera Utara. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.31** Grafik Capaian IKK Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2023 sebagai berikut:



Gambar III.31 Grafik Capaian IKK Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2023

Berikut ini rincian capaian setiap triwulan untuk persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023.

Tabel III.48 Target dan Realisasi Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor BPTD Kelas II Sumut Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Rincian	TW-I Tahun 2023	TW-II Tahun 2023	TW-III Tahun 2023	TW-IV Tahun 2023
1	Target	40	40	90	90
2	Realiasi	0	0	65,63	65,63
3	Capaian	0%	0%	72,92%	72,92%

Tabel diatas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor BPTD Kelas II Sumut terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang dihitung berdasarkan rumus persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- Pada triwulan I, target persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor yang ditetapkan sebesar 40%. Realisasi persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor pada triwulan I sebesar 0%. Sehingga

capaian persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor sebesar 0%.

- Pada triwulan II, target persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor yang ditetapkan sebesar 40%. Realisasi persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor pada triwulan II sebesar 0%. Sehingga capaian persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor sebesar 0%.
- Pada triwulan III, target persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor yang ditetapkan sebesar 90%. Realisasi persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor pada triwulan III sebesar 65,63%. Sehingga capaian persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor sebesar 72,92%.
- Pada triwulan IV, target persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor yang ditetapkan sebesar 90%. Realisasi persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor pada triwulan IV sebesar 65,63%. Sehingga capaian persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor sebesar 72,92%.

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor bisa dipedomani melalui Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020 Tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor tanggal 21 September 2020.

- **Kronologi target pada Perjanjian Kinerja**

Target persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor dalam Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2020-2024 sebesar 85%. Pada awal tahun 2023 dibuat target dalam PK sebesar 40% atas arahan pimpinan, namun setelah dilakukan evaluasi terkait capaian dan target PK selama triwulan II terdapat

perubahan usulan target dikarenakan adanya perbedaan perhitungan data pengujian berkala kendaraan bermotor yang telah terstandarisasi sehingga dalam revisi I PK tahun 2023 target persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor menjadi 90%.

- **Faktor Keberhasilan**

Keberhasilan tercapainya indikator standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor antara lain dipengaruhi oleh:

1. Permintaan dari Dishub Kab/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara;
2. Pelaksanaan standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai Standar Operasional Prosedur standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor yang telah ditetapkan;
3. Fasilitas pengujian berkala kendaraan bermotor yang memadahi.

- **Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan**

Faktor kegagalan tidak tercapainya indikator standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor antara lain dipengaruhi oleh:

1. Tidak memiliki gedung uji;
2. Kurangnya perawatan terhadap pelaratan pengujian berkala kendaraan bermotor;
3. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang belum memenuhi syarat akreditasi.

- **Perhitungan Realisasi Kinerja**

IKK 7a

$$= \frac{\text{Jumlah UPUBKB Pemda dan Swasta yang lulus akreditasi sampai dengan tahun } n}{\text{Jumlah Pemda (Kab + Jumlah UPUBKB Swasta)}}$$

× 100%

$$IKK 7a = \frac{21}{33} \times 100\% = 65,63\%$$

- **Perhitungan Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja Persentase Standarisasi

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

$$= \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

$$= 65,63/90 \times 100\% = 72,92\%$$

- **Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan**

Adapun anggaran terkait persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor tahun 2023 yaitu sebagai berikut senilai **Rp 526.329.000,-** dengan realisasi hingga triwulan IV Tahun 2023 **Rp 526.329.000,-** atau mencapai 100% dengan nomenklatur POK : Monitoring dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Hubdat dengan kode anggaran (4640.FAE.923.AL.524111).

a.4). Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya, antara lain:

1. Mengadakan bimbingan teknis dan peningkatan kompetensi SDM terhadap petugas penguji berkala kendaraan bermotor;
2. Monitoring dan evaluasi yang rutin terhadap pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
3. Rutin melakukan kalibrasi alat pengujian berkala kendaraan bermotor.

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022, dan Tahun 2023



Gambar III.32 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020

Realisasi persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor tahun 2023 sebesar 65,63%, jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 sebesar 90% maka capaian kinerja mencapai 73% sedangkan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebesar 90% jika dibandingkan terhadap target kinerja tahun 2022 sebesar 90% maka capaian persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor sebesar 100%. Realisasi persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor pada tahun 2021 sebesar 90% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2021 sebesar 90%, maka capaian persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor sebesar 100% dan realisasi kinerja pada tahun 2020 sebesar 90% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2020 sebesar 90%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 memiliki realisasi yang sama yaitu sebesar 90%, kemudian pada tahun 2023 ngalami penurunan pada realisasi menjadi 65,63%. Untuk rincian capaian pada tahun 2020,

2021, 2022, dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.49 Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020

SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat						
No.	Tahun	IKP	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik / Turun
1.	2020	IKK 7a	90	90	100%	Tetap
2.	2021	IKK 7a	90	90	100%	Tetap
3.	2022	IKK 7a	90	90	100%	Tetap
4.	2023	IKK 7a	90	65,63	73%	Turun

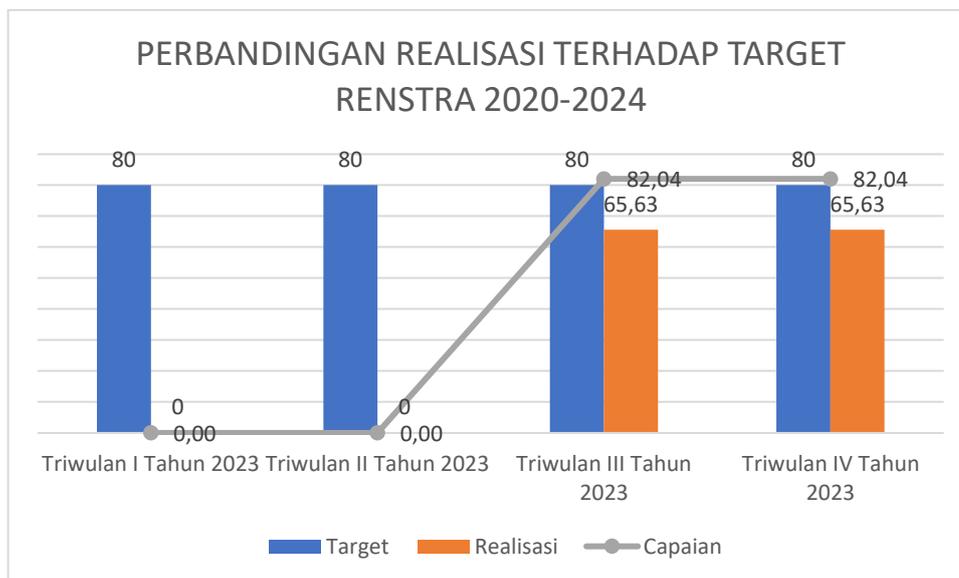
- **Justifikasi Narasi Realisasi Turun**

Pada tahun 2023 realisasi persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor sebesar 65,63%, realisasi turun dari tahun 2022 sebesar 90% hal ini dikarenakan pada tahun 2023 masih banyak UPUBKB di Sumatera Utara yang belum mengajukan akreditasi.pada pengujian.

- **Justifikasi Narasi Capaian Turun**

Pada tahun 2023 terjadi penurunan nilai capaian persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor menjadi 73%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2023 masih banyak UPUBKB yang belum melaksanakan akreditasi.

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2020-2024



Gambar III.33 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024

Realisasi persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor tahun 2023 terhadap target kinerja pada tahun 2023 dalam Renstra sebesar 65,63% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024 sebesar 80% maka capaian kinerja mencapai 82,04%. Berikut ini merupakan capaian tahun 2023 terhadap target Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024.

Tabel III.50 Realiasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024

	Target Renstra 2020-2024	Realisasi	Capaian
Triwulan I Tahun 2023	80	0	0,00
Triwulan II Tahun 2023	80	0	0,00
Triwulan III Tahun 2023	80	65,63	82,04
Triwulan IV Tahun 2023	80	65,63	82,04

Capaian kinerja persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor tahun 2023 dalam rencana strategis

BPTD Kelas II Sumatera Utara tahun 2020-2024 sebesar 82,04%.

a.7). Benchmark Nasional

Untuk *benchmark* persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor tahun 2023. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023, capaian persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor tahun 2023 adalah 72,92%. Berikut perbandingan persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023 dengan rata-rata capaian nasional dipaparkan pada **Tabel III.51** di bawah ini.

Tabel III.51 *Benchmark* Nasional

No	Uraian	BPTD Kelas II Sumut	Rata-Rata Nasional
1	Persentase Capaian Kinerja	72,92%	99,20%

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian IKK persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor BPTD Kelas II Sumatera Utara tahun 2023 memiliki nilai yang lebih rendah dari rata-rata capaian secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor BPTD Kelas II Sumatera Utara tahun 2023 masih terdapat kabupaten/kota di Sumatera Utara yang belum melaksanakan standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor.

III.2.3.5. IKK 7b Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Berdasarkan PM 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau, alur pelayaran adalah perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antara muara sungai yang merupakan satu kesatuan alur-pelayaran sungai dan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari. Alur pelayaran sungai dan danau ditetapkan melalui SK Menteri Perhubungan.

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Realisasi kinerja jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP Triwulan IV tahun 2023 sebesar 1 lokasi jika dibandingkan dengan target revisi I PK 2023 sebesar 1 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Perubahan target pada PK 2023 terjadi akibat adanya kegiatan dalam POK yang lebih merujuk kepada IKK7b sehingga dengan kesepakatan bersama atasan maka ditetapkan target untuk IKK7b menjadi 1 lokasi. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.34** Grafik Capaian IKK Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Pelayaran Alur Pelayaran SDP Tahun 2023 sebagai berikut:



Gambar III.34 Grafik Capaian IKK Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Pelayaran Alur Pelayaran SDP Tahun 2023

Berikut ini rincian capaian setiap triwulan untuk jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023.

Tabel III.52 Target dan Realisasi Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP BPTD Kelas II Sumut Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Rincian	TW-I Tahun 2023	TW-II Tahun 2023	TW-III Tahun 2023	TW-IV Tahun 2023
1	Target	0	0	1	1
2	Realiasi	0	0	1	1
3	Capaian	0%	0%	100%	100%

Tabel diatas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP BPTD Kelas II Sumut terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang dihitung berdasarkan rumus jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- Pada triwulan I, target jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP yang ditetapkan sebesar 0 lokasi. Realisasi jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP pada triwulan I sebesar 0 lokasi. Sehingga capaian jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP sebesar 0%.

- Pada triwulan II, target jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP yang ditetapkan sebesar 0 lokasi. Realisasi jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP pada triwulan II sebesar 0 lokasi. Sehingga capaian jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP sebesar 0%.
- Pada triwulan III, target jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP yang ditetapkan sebesar 1 lokasi. Realisasi jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP pada triwulan III sebesar 1 lokasi. Sehingga capaian jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP sebesar 100%.
- Pada triwulan IV, target jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP yang ditetapkan sebesar 1 lokasi. Realisasi jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP pada triwulan IV sebesar 1 lokasi. Sehingga capaian jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP sebesar 100%.

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, maka telah ditetapkan sebagai dasar pemasangan rambu sungai.

- **Kronologi target pada Perjanjian Kinerja**

Pada tahun 2023 Indikator Kinerja Kegiatan jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP terhadap keselamatan transportasi darat memiliki target 0 lokasi, namun pada revisi I PK tahun 2023 terjadi perubahan target pada indikator IKK7b sebesar 1 lokasi dimana hal tersebut diakibatkan adanya kegiatan dalam POK yang lebih merujuk kepada IKK7b sehingga dengan kesepakatan bersama pimpinan maka ditetapkan target pada jumlah

ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP menjadi 1 lokasi pada triwulan IV.

- **Faktor Keberhasilan**

Keberhasilan tercapainya indikator jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP antara lain dipengaruhi oleh:

1. Kondisi di lapangan yang mendukung, seperti cuaca;
2. Kontrak pekerjaan tepat waktu;
3. Kesesuaian dengan kebutuhan.

- **Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan**

Faktor kegagalan tidak tercapainya indikator jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP antara lain dipengaruhi oleh:

1. Kondisi alam yang tidak memungkinkan (cuaca buruk);
2. Pekerjaan tidak selesai dengan waktu yang telah ditentukan;
3. Perkiraan tidak sesuai dengan kebutuhan.

- **Perhitungan Realisasi Kinerja**

Kegiatan jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP di tahun 2023 sudah dilaksanakan mencapai 100% untuk kegiatan pengadaan dan pemasangan sistem pemantauan lalu lintas kapal di Danau Toba Provinsi Sumatera Utara Tahap II. Realisasi kinerja jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP dihitung berdasarkan jumlah fasilitas keselamatan yang terbangun s.d tahun (n), maka dari itu digunakan rumus sebagai berikut:

IKK 7b = Jumlah fasilitas keselamatan yang terbangun s.d tahun (n)

IKK 7a = 1 lokasi

- **Perhitungan Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian kinerja pada jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar:

Capaian Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP

$$= \text{Realisasi/Target} \times 100\% = 1/1 \times 100\% = 100\%$$

- **Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan**

Adapun anggaran terkait jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP tahun 2023 yaitu sebagai berikut senilai **Rp 4.900.539.000,-** dengan realisasi hingga triwulan IV Tahun 2023 **Rp 4.900.539.000,-** atau mencapai 100% dengan nomenklatur POK : Pengembangan Sistem Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan dengan kode anggaran (4638.CAC.028.053A.532111).

a.4). Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya, antara lain:

1. Mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan SDP;
2. Mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan SDP serta memberikan kemudahan bagi pengguna SDP dalam berlalu lintas;
3. Mewujudkan perairan yang berkeselamatan.

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022, dan Tahun 2023



Gambar III.35 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020

Realisasi jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP tahun 2023 sebesar 1 lokasi, jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 sebesar 1 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100% sedangkan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebesar 0 lokasi jika dibandingkan terhadap target kinerja tahun 2022 sebesar 0 lokasi maka capaian jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP sebesar 0%. Realisasi jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP pada tahun 2021 sebesar 0 lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2021 sebesar 0 lokasi, maka capaian jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP sebesar 0% dan realisasi kinerja pada tahun 2020 sebesar 12 lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2020 sebesar 12 lokasi, maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada tahun 2021 mulai mengalami penurunan realisasi menjadi 0 lokasi hingga tahun 2022, kemudian pada tahun 2023 mulai mengalami kenaikan realisasi menjadi 1 lokasi. Untuk rincian capaian pada tahun

2020, 2021, 2022, dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.53 Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020

SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat						
No.	Tahun	IKP	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik / Turun
1.	2020	IKK 7b	12	12	100%	Tetap
2.	2021	IKK 7b	0	0	0%	Turun
3.	2022	IKK 7b	0	0	0%	Tetap
4.	2023	IKK 7b	1	1	100%	Naik

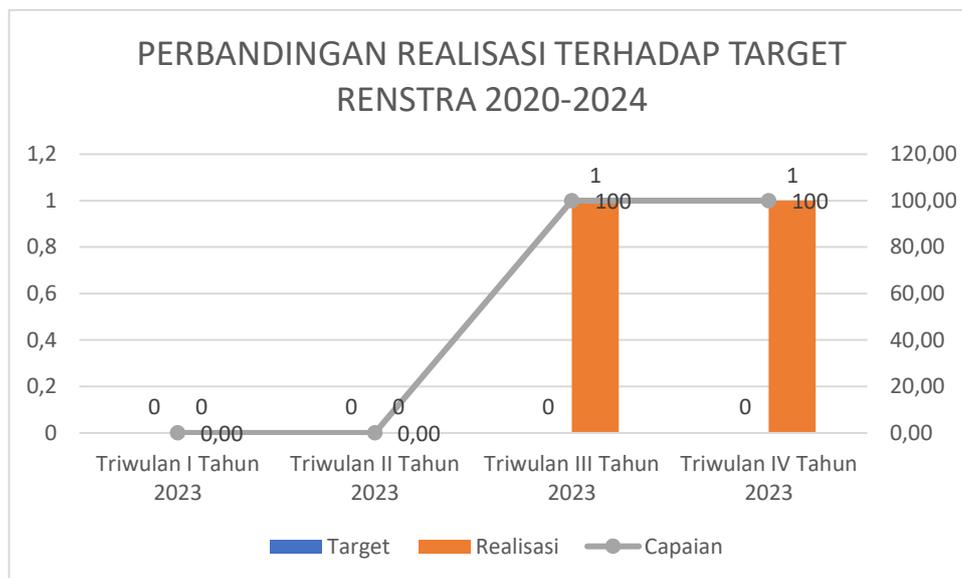
- **Justifikasi Narasi Realisasi Turun**

Pada tahun 2021 realisasi jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP sebesar 0 lokasi, realisasi turun dari tahun 2020 sebesar 12 lokasi. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 sudah tidak ada lagi kegiatan pembangunan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP hingga tahun 2022.

- **Justifikasi Narasi Capaian Turun**

Pada tahun 2021 terjadi penurunan nilai capaian jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP menjadi 0%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 dalam POK 2021 tidak ada kegiatan terkait jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP.

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2020-2024



Gambar III.36 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024

Realisasi jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP tahun 2023 terhadap target kinerja pada tahun 2023 dalam Renstra sebesar 1 lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024 sebesar 0 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Berikut ini merupakan capaian tahun 2023 terhadap target Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024.

Tabel III.54 Realiasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024

	Target Renstra 2020-2024	Realisasi	Capaian
Triwulan I Tahun 2023	0	0	0
Triwulan II Tahun 2023	0	0	0
Triwulan III Tahun 2023	0	1	100
Triwulan IV Tahun 2023	0	1	100

Capaian kinerja jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP tahun 2023 dalam rencana strategis

BPTD Kelas II Sumatera Utara tahun 2020-2024 sebesar 100%.

a.7). **Benchmark Nasional**

Untuk *benchmark* jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP tahun 2023. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023, persentase capaian jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP tahun 2023 adalah 100%. Berikut perbandingan jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023 dengan rata-rata capaian nasional dipaparkan pada **Tabel III.55** di bawah ini.

Tabel III.55 *Benchmark* Nasional

No	Uraian	BPTD Kelas II Sumut	Rata-Rata Nasional
1	Persentase Capaian Kinerja	100%	84,13%

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian IKK jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP BPTD Kelas II Sumatera Utara tahun 2023 memiliki nilai yang lebih tinggi dari rata-rata capaian secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua unit kerja Balai Pengelola Transportasi Darat melaksanakan kegiatan ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP karena tidak semua unit kerja Balai Pengelola Transportasi Darat terdapat pelabuhan SDP.

III.2.4. **SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat.

III.2.4.1. IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

- a) Aspek Perencanaan;
- b) Aspek Kepegawaian (SDM);
- c) Aspek Keuangan;
- d) Aspek Penyelenggaraan Perkantoran (umum).

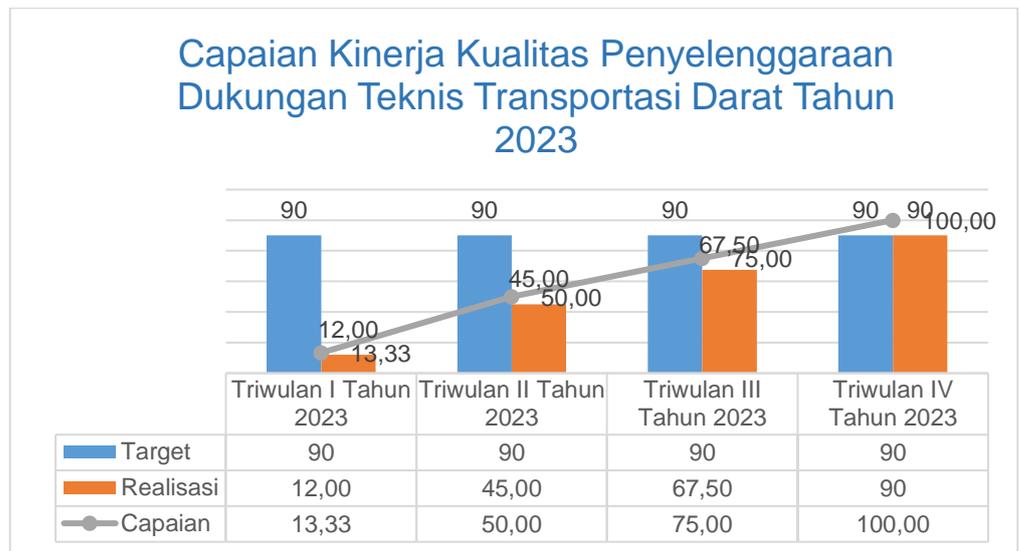
Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi e-performance.

Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja. Sedangkan, aspek penyelenggaraan perkantoran dinilai berdasarkan hasil survei indeks kepuasan pegawai satuan kerja terhadap penyelenggaraan perkantoran.

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Realisasi kinerja kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat tahun 2023 pada triwulan IV yaitu nilai 90 dengan nilai capaian sebesar 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.37** Grafik Capaian IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2023 sebagai berikut:



Gambar III.37 Grafik Capaian IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2023

Berikut ini rincian capain setiap triwulan untuk kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023.

Tabel III.56 Target dan Realisasi Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat BPTD Kelas II Sumut Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Rincian	TW-I Tahun 2023	TW-II Tahun 2023	TW-III Tahun 2023	TW-IV Tahun 2023
1	Target	90	90	90	90
2	Realiasi	12	45	67,50	90
3	Capaian	13,33%	50%	75%	100%

Tabel diatas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat BPTD Kelas II Sumut terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang dihitung berdasarkan rumus kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- Pada triwulan I, target kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat ditetapkan nilai 90. Realisasi kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat pada triwulan I dengan nilai 12. Sehingga capaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat sebesar 13,33%.

- Pada triwulan II, target kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat ditetapkan nilai 90. Realisasi kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat pada triwulan II dengan nilai 45. Sehingga capaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat sebesar 50%.
- Pada triwulan III, target kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat ditetapkan nilai 90. Realisasi kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat pada triwulan III dengan nilai 67,50. Sehingga capaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat sebesar 75%.
- Pada triwulan IV, target kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat ditetapkan nilai 90. Realisasi kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat pada triwulan IV dengan nilai 90. Sehingga capaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat sebesar 100%.

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 perubahan atas PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, maka telah ditetapkan sebagai dasar penyelenggaraan kinerja kualitas dukungan teknis transportasi darat.

- **Kronologi target pada Perjanjian Kinerja**

Pada tahun 2023, Indikator Kinerja Kegiatan kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terhadap kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat memiliki target senilai 90 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Penyelenggaraan kinerja kualitas dukungan teknis transportasi darat pada tahun 2023 telah dilakukan untuk kegiatan penunjang teknis. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu:

1. Penegakan hukum LLAJ;
2. Sosialisasi WBK/WBBM menuju Zona Integritas BPTD Kelas II Sumatera Utara;
3. Bimbingan teknis pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
4. Monitoring penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di UPPKB;
5. Pelaksanaan kehumasan di BPTD Kelas II Sumatera Utara;
6. Penyusunan bahan, rencana kerja dan anggaran;
7. Penyusunan SAKIP, SPIP, LAPTAH, dan Profil BPTD;
8. Monitoring dan pengawasan angkutan lebaran dan nataru;
9. Monitoring dan pengawasan pembangunan dan pengelolaan bidang perhubungan;
10. Monitoring dan pengawasan sarana dan prasarana Hubdat;
11. Monitoring dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana Ditjen Perhubungan Darat;
12. Monitoring dan pengawasan perlengkapan jalan di jalan nasional;
13. Monitoring dan pengawasan Andalalin
14. Bimbingan teknis dan sosialisasi (sosialisasi Spionam untuk angkutan barang, bimbingan teknis dan sosialisasi perizinan dan Spionam);
15. Manajemen rekayasa lalu lintas;
16. Pembentukan tim penilai Andalalin;
17. Pembentukan tim korps PPNS;
18. Pemeliharaan alat uji marka dan rambu;
19. Rampcheck angkutan danau dan penyeberangan di Provinsi Sumatera Utara;
20. Monitoring dan pengawasan TSDP;
21. Pemeriksaan keselamatan kapal (*marine inspektur*);

22. Pengukuran kapal SDP;
23. Monitoring AIS di Danau Toba;
24. Bimbingan teknis pelaksanaan operasional penimbangan kendaraan bermotor;
25. Sosialisasi peraturan perundangan bidang penimbangan kendaraan bermotor;
26. Surveillance ISO UPPKB;
27. Bimbingan teknis pelaksanaan operasional terminal tipe-A di Provinsi Sumatera Utara;
28. Sosialisasi reformasi birokrasi pegawai BPTD Kelas II.

- **Faktor Keberhasilan**

Keberhasilan tercapainya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat antara lain dipengaruhi oleh:

1. Kegiatan terlaksana dengan waktu yang sudah ditentukan;
2. Terkoordinasikannya kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan dengan stakeholder terkait;
3. SDM yang bersolidaritas.

- **Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan**

Faktor kegagalan tidak tercapainya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat antara lain dipengaruhi oleh:

1. Adanya pengurangan anggaran;
2. Kurangnya SDM yang ada.

- **Perhitungan Realisasi Kinerja**

Realisasi kinerja kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat dihitung berdasarkan nilai dari bobot setiap uraian pada formulir pada **Tabel III.57** di bawah ini:

Tabel III.57 Perhitungan Realisasi Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

NO	URAIAN		BOBOT	NILAI
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan		35%	
	I	SAKIP	20%	
	a	<i>Rencana Strategis (Renstra)</i>		4
		<i>Nilai 4 (empat) apabila selesai ≤ 60 hari setelah Renstra K/L ditetapkan</i>		
		<i>Nilai 2 (dua) apabila selesai 61-90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan</i>		

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
	Nilai 1 (satu) apabila selesai >90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
b	Rencana Kerja Tahunan (RKT)		2
	Nilai 2 (dua) apabila selesai >30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (maksimal 1 Desember)		
	Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 1-30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (2-31 Desember)		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai ≥1 hari setelah Awal Tahun Anggaran (≥1 Januari)		
c	Perjanjian Kinerja (PK)		4
	Nilai 4 (empat) apabila selesai ≤ 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (maksimal 20 Januari)		
	Nilai 2 (dua) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (21 Januari – 19 Februari)		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20 Februari)		
d	Rencana Aksi (Renaksi)		2
	Nilai 2 (dua) apabila selesai ≤ 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (maksimal 20 Januari)		
	Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (21 Januari – 19 Februari)		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20 Februari)		
e	Input Aplikasi e-Performance		2
	Nilai 2 (dua) apabila selalu tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
	Nilai 1 (satu) apabila tidak tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
f	Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I, II, III		2
	Nilai 2 (dua) apabila selalu tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-20 April, 1-20 Juli, 1-20 Oktober)		
	Nilai 1 (satu) apabila tidak tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-20 April, 1-20 Juli, 1-20 Oktober)		
g	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)		4
	Nilai 4 (empat) apabila selesai ≤25 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
	Nilai 2 (dua) selesai 25-55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
	Nilai 1 (satu) selesai >55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
2	Input Aplikasi e-Planning	15%	
a	Input Aplikasi e-Planning Pagu Kebutuhan		5
b	Input Aplikasi e-Planning Pagu Indikatif		5
c	Input Aplikasi e-Planning Pagu Definitif		5
B	Indeks Profesionalisme ASN	35%	
1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)		
2	Kompetensi		
3	Kinerja		
4	Disiplin		
C	Tingkat Pengelolaan Keuangan	30%	
1	Daya Serap Anggaran Satuan Kerja		10
	Nilai 10 (sepuluh) apabila status excellent atau capaian daya serap ≥100%		
	Nilai 8 (delapan) apabila status on-track atau capaian daya serap 80,1% sampai dengan 99,99%		
	Nilai 6 (enam) apabila status warning atau capaian daya serap 60,1% sampai dengan 80%		
	Nilai 5 (lima) apabila status alert atau capaian daya serap di bawah 60%		
2	Tingkat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)		10
	Nilai 10 (sepuluh) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
	Nilai 8 (delapan) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 60,1% sampai dengan 80%		

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
	Nilai 6 (enam) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
	Nilai 4 (empat) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 20,1% sampai dengan 40%		
	Nilai 2 (dua) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) di bawah 20%		
3	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut LHP dan LHA (Itjen dan BPK)		10
	Nilai 10 (sepuluh) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
	Nilai 8 (delapan) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 60,1% sampai dengan 80%		
	Nilai 6 (enam) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
	Nilai 4 (empat) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 20,1% sampai dengan 40%		
	Nilai 2 (dua) apabila Persentase TL Tuntas di bawah 20%		

- **Perhitungan Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

$$= \text{Realisasi/Target} \times 100\% = 90/90 \times 100\% = 100\%$$

- **Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan**

Adapun anggaran terkait kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2023 yaitu sebagai berikut senilai **Rp 7.548.273.000,-** dengan realisasi hingga triwulan IV Tahun 2023 **Rp 7.541.087.176,-** atau mencapai 99,90% dengan nomenklatur POK : Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan dengan kode anggaran (4640.FAE.923).

a.4). Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Memberikan *reward* sebagai bentuk penghargaan kepada pegawai teladan dan untuk memotivasi pegawai lainnya;
2. Rutin melakukan evaluasi secara internal terkait kinerja yang sedang berlangsung guna meminimalisir tidak tercapainya target kinerja tahun berjalan;
3. Melaksanakan tindak lanjut perbaikan atas hasil pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPTD Kelas II Sumatera Utara.

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022, dan Tahun 2023



Gambar III.38 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020

Realisasi kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat tahun 2023 dengan nilai 90, jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 nilai 90 maka capaian kinerja mencapai 100% sedangkan realisasi kinerja pada tahun 2022 nilai 97 jika dibandingkan terhadap target kinerja tahun 2022 nilai 90 maka capaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat sebesar 108%. Realisasi kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat pada tahun 2021 nilai 90 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2021 dengan nilai 90, maka capaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat sebesar 100% dan realisasi kinerja pada tahun 2020 dengan nilai 90 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2020 nilai 90, maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan, kemudian pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan pada realisasi menjadi nilai 90 kembali. Untuk rincian capaian pada tahun

2020, 2021, 2022, dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.58 Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020

SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat						
No.	Tahun	IKP	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik / Turun
1.	2020	IKK 5.1	90	90	100%	Tetap
2.	2021	IKK 5.1	90	90	100%	Tetap
3.	2022	IKK 5.1	90	97	108%	Naik
4.	2023	IKK 5.1	90	90	100%	Turun

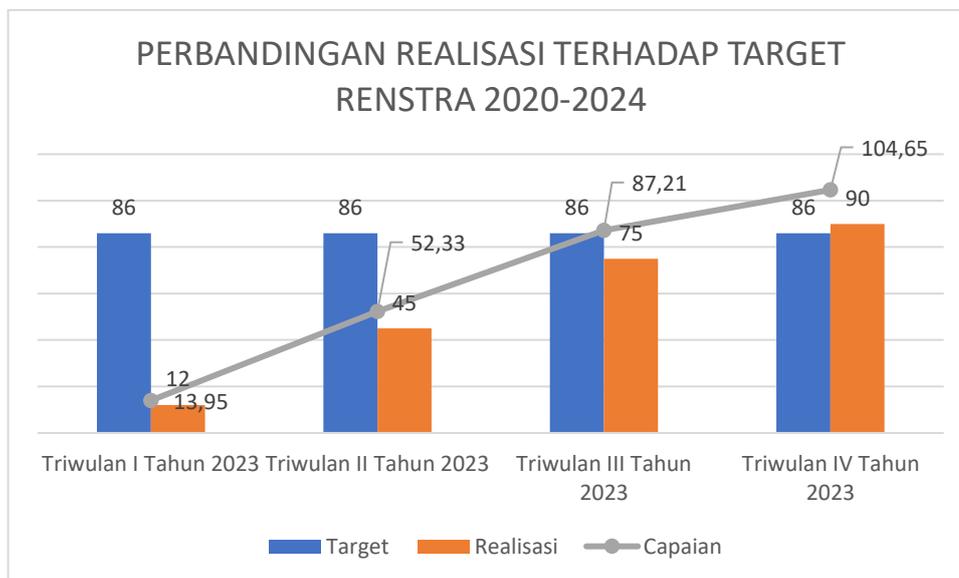
- **Justifikasi Narasi Realisasi Turun**

Pada tahun 2023 realisasi kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat dengan nilai 90, realisasi turun dari tahun 2022 dengan nilai 97. Penurunan nilai pada kualitas penyelenggaraan dukungan teknis ini disebabkan adanya alokasi anggaran pada beberapa kegiatan yang menyebabkan beberapa kegiatan yang menunjang dukungan teknis tidak terlaksana dengan baik.

- **Justifikasi Narasi Capaian Turun**

Pada tahun 2023 terjadi penurunan nilai capaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat menjadi 100%. Hal ini disebabkan karena menurunnya nilai realisasi pada tahun 2023 sehingga mempengaruhi nilai capaian pada tahun 2023.

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2020-2024



Gambar III.39 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024

Realisasi kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat tahun 2023 terhadap target kinerja pada tahun 2023 dalam Renstra sebesar nilai 90 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024 sebesar nilai 86 maka capaian kinerja mencapai 104,65%. Berikut ini merupakan capaian tahun 2023 terhadap target Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024.

Tabel III.59 Realiasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024

	Target Renstra 2020-2024	Realisasi	Capaian
Triwulan I Tahun 2023	86	12	13,95
Triwulan II Tahun 2023	86	45	52,33
Triwulan III Tahun 2023	86	75	87,21
Triwulan IV Tahun 2023	86	90	104,65

Capaian kinerja kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat tahun 2023 dalam rencana strategis BPTD Kelas II Sumatera Utara tahun 2020-2024 sebesar 104,65%.

a.7). **Benchmark Nasional**

Untuk *benchmark* kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat tahun 2023. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023, persentase capaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat tahun 2023 adalah 100%. Berikut perbandingan kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023 dengan rata-rata capaian nasional dipaparkan pada **Tabel III.60** di bawah ini.

Tabel III.60 *Benchmark Nasional*

No	Uraian	BPTD Kelas II Sumut	Rata-Rata Nasional
1	Persentase Capaian Kinerja	100%	101,39%

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian IKK kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat BPTD Kelas II Sumatera Utara tahun 2023 memiliki nilai lebih rendah dari rata-rata capaian secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh unit kerja Balai Pengelola Transportasi Darat sudah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat dengan baik.

III.2.5. SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat.

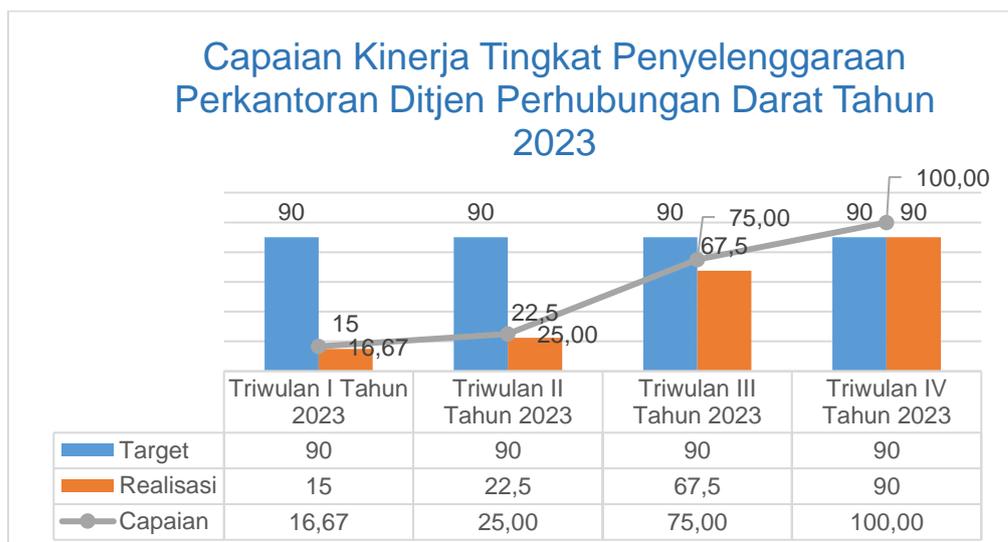
III.2.5.1. IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara perkantoran dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap pimpinan serta setiap pegawai pada unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk mendukung kinerja sebagai bentuk pelayanan prima.

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Realisasi kinerja tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat tahun 2023 pada triwulan IV sebesar nilai 90. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.40** Grafik Capaian IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2023 sebagai berikut:



Gambar III.40 Grafik Capaian IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2023

Berikut ini rincian capain setiap triwulan untuk tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023.

Tabel III.61 Target dan Realisasi Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat BPTD Kelas II Sumut Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Rincian	TW-I Tahun 2023	TW-II Tahun 2023	TW-III Tahun 2023	TW-IV Tahun 2023
1	Target	90	90	90	90
2	Realiasi	15	22,5	67,5	90
3	Capaian	16,67%	25%	75%	100%

Tabel diatas merupakan perbandingan target dan realisasi tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat BPTD Kelas II Sumut terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang dihitung berdasarkan rumus tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- Pada triwulan I, target tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat ditetapkan nilai 90. Realisasi tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat pada triwulan I dengan nilai 15. Sehingga capaian tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat sebesar 16,67%.
- Pada triwulan II, target tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat ditetapkan nilai 90. Realisasi tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat pada triwulan II dengan nilai 22,5. Sehingga capaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat sebesar 25%.
- Pada triwulan III, target tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat ditetapkan nilai 90. Realisasi tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat pada triwulan III dengan nilai 67,50. Sehingga capaian tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat sebesar 75%.

- Pada triwulan IV, target tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat ditetapkan nilai 90. Realisasi tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat pada triwulan IV dengan nilai 90. Sehingga capaian tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat sebesar 100%.

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 Kementerian Perhubungan, menargetkan sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
2. Birokrasi yang Kapabel
3. Pelayanan Publik yang Prima

- **Kronologi target pada Perjanjian Kinerja**

Pada tahun 2023, Indikator Kinerja Kegiatan tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terhadap meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel memiliki target bernilai 90 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di tahun sebelumnya dengan berdasarakan arahan pimpinan.

Tingkat penyelenggaraan perkantoran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara pada tahun 2023 telah dilakukan secara maksimal untuk tercapainya manajemen pelayanan perkantoran terhadap seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai di Lingkungan BPTD Kelas II Sumatera Utara. Adapun beberapa pelayanan perkantoran yang telah diserap yaitu:

1. Pengadaan perangkat pengolah data dan informasi;
2. Operasional dan pemeliharaan kantor;
3. Peningkatan gedung pelayanan BPTD Kelas II Sumatera Utara;
4. Gaji dan tunjangan.

- **Faktor Keberhasilan**

Keberhasilan tercapainya penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat antara lain dipengaruhi oleh:

1. Adanya SDM yang berkompeten;
2. Penyerapan anggaran yang maksimal dan tepat guna;
3. Evaluasi dilakukan setiap bulan.

- **Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan**

Faktor kegagalan tidak tercapainya penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat antara lain dipengaruhi oleh:

1. SDM yang kurang memadai;
2. Kerjasama yang kurang baik antar pegawai dalam mendukung penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat;
3. Adanya revisi anggaran.

- **Perhitungan Realisasi Kinerja**

1. Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran dibatasi di lingkup unsur K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
2. Indikator Kinerja Kegiatan diukur melalui nilai kuesioner yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%) dan tingkat ketersediaan fasilitas perkantoran.
3. Bobot:
 - Kuesioner tingkat kepuasan bagi pejabat tingkat Eselon III, dan Eselon IV (25%);
 - Kuesioner tingkat kepuasan bagi Staf (25%); dan
 - Tingkat Ketersediaan fasilitas perkantoran (50%).

Tabel III.62 Perhitungan Realisasi Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

NO	URAIAN		BOBOT	NILAI
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV		25%	21,8%
	1	Tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	15	12
	2	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	10	9,8

B	Tingkat Kepuasan Staf		25%	21,25%
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran		50%	47%
	1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20	20
	2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15	15
	3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15	12

Cara Perhitungan:

- A. Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon III dan IV diukur melalui kuesioner;
- B. Tingkat Kepuasan Staf diukur melalui kuissoner;
- C. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran:

1. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi

$$x = \frac{\text{Jumlah Kursi dan Meja di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf)}} \times 100\%$$

$$x = \frac{44}{44} \times 100\% = 100\%$$

2. Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop

$$y = \frac{\text{Jumlah PC atau Laptop di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf) di Kantor}^*} \times 100\%$$

$$y = \frac{22}{22} \times 100\% = 100\%$$

3. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet

$$z = \frac{\text{Rata – rata kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{**}}{\text{Standar Kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{***}} \times 100\%$$

$$z = \frac{80}{100} \times 100\% = 80\%$$

Note:

*) Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf di Kantor) = Jumlah Seluruh Pegawai – Pegawai Perbantuan
 Pegawai Perbantuan = Pegawai Kebersihan + Driver + Pramubakti + Security

***) Rata-rata kecepatan internet (unduh) di kantor merupakan rata-rata kecepatan pengunduhan (*download*) yang diukur

pada jam kantor (08-16), pada waktu tertentu dengan sample sekurang-kurangnya 5 lokasi/PC/Laptop di kantor
***) Standar Kecepatan Internet (unduh) di Kantor sebesar 5 Mbps

- **Perhitungan Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja Tingkat Penyelenggaraan

Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

$$= \text{Realisasi/Target} \times 100\% = 90/90 \times 100\%$$

$$= 90\%$$

- **Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan**

Adapun anggaran terkait tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2023 yaitu sebagai berikut senilai **Rp 51.807.024.000,-** dengan realisasi hingga triwulan IV Tahun 2023 **Rp 51.381.207.149,-** atau mencapai 99,18% dengan nomenklatur POK : Pengelolaan sistem informasi dan teknologi transportasi darat dengan kode anggaran (022.03.WA.4596), operasional dan pemeliharaan kantor dengan kode anggaran (4670.EBA.994.002), pembangunan Gedung kantor dengan kode anggaran (4670.EBB.971.091), serta layanan dukungan manajemen internal dengan kode anggaran (4671.EBA.994.001).

a.4). Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Pimpinan dapat melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing;
2. Dapat memberikan kesimpulan dalam bentuk umpan balik sehingga dapat terus mengarahkan pencapaian visi dan misi sasaran yang telah ditetapkan;

3. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi yang mampu menjamin arah pembangunan secara berkesinambungan.

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022, dan Tahun 2023



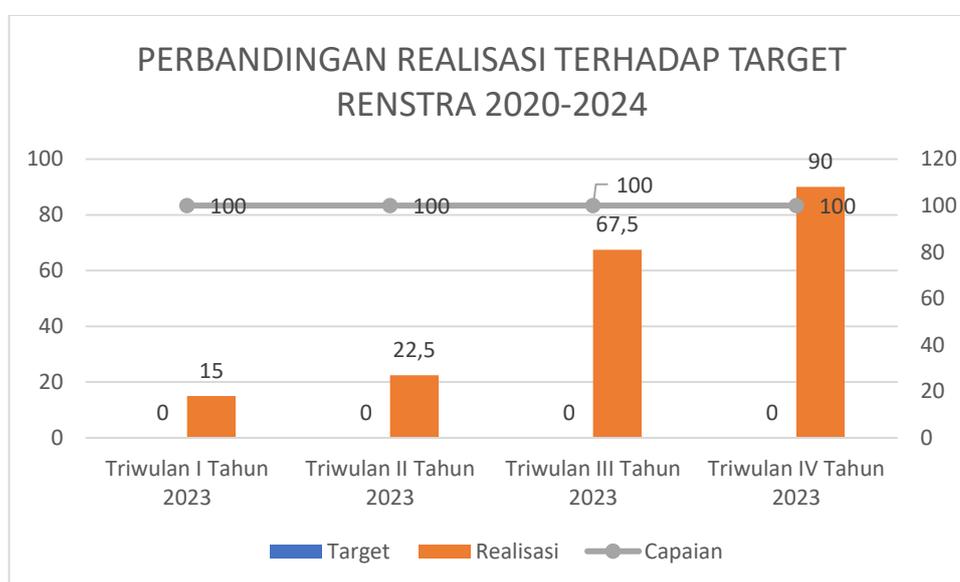
Gambar III.41 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020

Realisasi tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat tahun 2023 dengan nilai 90, jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 nilai 90 maka capaian kinerja mencapai 100% sedangkan realisasi kinerja pada tahun 2022 nilai 90 jika dibandingkan terhadap target kinerja tahun 2022 nilai 90 maka capaian tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat sebesar 100%. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 kegiatan tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat belum ada sehingga untuk nilai realisasi maupun capaian masih 0. Kegiatan tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat baru dilaksanakan pada awal tahun 2022 sampai sekarang. Untuk rincian capaian pada tahun 2020, 2021, 2022, dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.63 Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020

SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel						
No.	Tahun	IKP	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik / Turun
1.	2020	IKK 1	0	0	0	Tetap
2.	2021	IKK 1	0	0	0	Tetap
3.	2022	IKK 1	90	90	100%	Naik
4.	2023	IKK 1	90	90	100%	Tetap

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2020-2024



Gambar III.42 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024

Realisasi tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat tahun 2023 terhadap target kinerja pada tahun 2023 dalam Renstra sebesar nilai 90, namun dalam Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2020-2024 tidak terdapat indikator kinerja kegiatan tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat, sehingga untuk target bernilai 0. Berikut ini merupakan capaian tahun 2023 terhadap target Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024.

Tabel III.64 Realiasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Kelas II Sumatera Utara 2020-2024

	Target Renstra 2020-2024	Realisasi	Capaian
Triwulan I Tahun 2023	0	15	100
Triwulan II Tahun 2023	0	22,5	100
Triwulan III Tahun 2023	0	67,5	100
Triwulan IV Tahun 2023	0	90	100

Capaian kinerja tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat tahun 2023 dalam rencana strategis BPTD Kelas II Sumatera Utara tahun 2020-2024 sebesar 100%.

a.7). Benchmark Nasional

Untuk *benchmark* tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat tahun 2023. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023, persentase capaian tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat tahun 2023 adalah 100%. Berikut perbandingan tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023 dengan rata-rata capaian nasional dipaparkan pada **Tabel III.65** di bawah ini.

Tabel III.65 *Benchmark* Nasional

No	Uraian	BPTD Kelas II Sumut	Rata-Rata Nasional
1	Persentase Capaian Kinerja	100%	98,74%

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian IKK tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat BPTD Kelas II Sumatera Utara tahun 2023 memiliki nilai lebih tinggi dari rata-rata capaian secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tingkat penyelenggaraan

perkantoran Ditjen Perhubungan Darat BPTD Kelas II Sumatera Utara sudah cukup baik.

III.3. Realisasi Anggaran

III.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2023

III.3.1.1. Pagu Anggaran

Pagu Awal DIPA TA. 2023 sebesar **Rp. 291.508.219.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.66 Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2023

RM	Rp 139.863.180.000	47,98%
PNBP	Rp 108.271.278.000	37,14%
SBSN	Rp 43.373.761.000	14,88%
Total	Rp 291.508.219.000	100%

Tabel III.67 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2023

Belanja Pegawai	Rp 30.759.640.000	10,55%
Belanja Barang	Rp 61.318.275.000	21,03%
Belanja Modal	Rp 199.430.304.000	68,41%
Total	Rp 291.508.219.000	100%

Terdapat perubahan dan pergeseran pagu pada DIPA BPTD Kelas II Sumatera Utara TA. 2023 akibat adanya perubahan nomenklatur, pergantian pejabat struktural, serta adanya revisi pagu pada DIPA BPTD Kelas II Sumatera Utara TA. 2023 sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar **Rp. 289.219.049.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.68 Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu per Triwulan IV TA. 2023

RM	Rp 137.574.010.000	47,57%
PNBP	Rp 108.271.278.000	37,44%
SBSN	Rp 43.373.761.000	15,00%
Total	Rp 289.219.049.000	100%

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Sumut

Tabel III.69 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu per Triwulan IV TA. 2023

Belanja Pegawai	Rp 28.470.470.000	9,84%
Belanja Barang	Rp 61.318.275.000	21,20%
Belanja Modal	Rp 199.430.304.000	68,95%
Total	Rp 289.219.049.000	100%

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Sumut

Penambahan dan pergeseran anggaran tersebut sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran sebagai berikut:

- a. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-1030/AG/AG.3/2022 tanggal 27 Desember 2022 perihal Pengesahan Revisi Pencadangan Anggaran (Automatic Adjustment) pada DIPA Satker-Satker di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, TA 2023 (Revisi ke-1);
- b. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-88/AG/AG.3/2023 tanggal 22 Februari 2023 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Revisi ke-2);
- c. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-190/AG/AG.3/2023 tanggal 9 April 2023 perihal Pengesahan Revisi Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2023;
- d. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-195/AG/AG.3/2023 tanggal 12 April 2023 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun 2023 di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Revisi ke-4);
- e. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-225/AG/AG.3/2023 tanggal 2 Mei 2023 perihal Perubahan Nomenklatur Satker dan Kode Satker Baru di

- Lingkungan Ditjen Perhubungan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan;
- f. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-343/AG/AG.3/2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Tahun 2023 di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
 - g. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-452/AG/AG.3/2023 tanggal 2 Agustus 2023 perihal Pengesahan Revisi Pergeseran Anggaran Antar Eselon I untuk Memenuhi Kekurangan Belanja Pegawai, Kementerian Perhubungan TA 2023;
 - h. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-529/AG/AG.3/2023 tanggal 7 September 2023 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Tahun 2023 (Revisi 8);
 - i. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-608/AG/AG.3/2023 tanggal 5 Oktober 2023 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2023 (Revisi ke-9);
 - j. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-673/AG/AG.3/2023 tanggal 21 Oktober 2023 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Bersumber Dana PNBPD Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2023 (Revisi ke-10);
 - k. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-720/AG/AG.3/2023 tanggal 27 Oktober 2023 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2023 (Revisi ke-11).

III.3.1.2. Refocusing Anggaran Tahun 2023

Berdasarkan dengan adanya revisi DIPA BPTD Kelas II Sumatera Utara yang dilakukan penyesuaian anggaran sebanyak 20 (dua puluh) kali revisi DIPA. Berikut adalah rincian histori revisi per sumber dana dan jenis belanja.

Tabel III.70 Rincian Revisi per Sumber Dana TA 2023

	SUMBER DANA			TOTAL
	RM	PNBP	SBSN	
PAGU AWAL	139.863.180.000	108.271.278.000	43.373.761.000	291.508.219.000
REVISI KE-1	139.863.180.000	108.271.278.000	43.373.761.000	291.508.219.000
REVISI KE-2	139.863.180.000	108.271.278.000	43.373.761.000	291.508.219.000
REVISI KE-3	139.863.180.000	108.271.278.000	43.373.761.000	291.508.219.000
REVISI KE-4	139.863.180.000	108.271.278.000	43.373.761.000	291.508.219.000
REVISI KE-5	139.863.180.000	108.271.278.000	43.373.761.000	291.508.219.000
REVISI KE-6	139.863.180.000	108.271.278.000	43.373.761.000	291.508.219.000
REVISI KE-7	137.574.010.000	108.271.278.000	43.373.761.000	289.219.049.000
REVISI KE-8	137.574.010.000	108.271.278.000	43.373.761.000	289.219.049.000
REVISI KE-9	137.574.010.000	108.271.278.000	43.373.761.000	289.219.049.000
REVISI KE-10	138.480.090.000	111.771.278.000	43.373.761.000	293.625.129.000
REVISI KE-11	138.480.090.000	111.771.278.000	43.373.761.000	293.625.129.000
REVISI KE-12	138.480.090.000	111.771.278.000	43.373.761.000	293.625.129.000
REVISI KE-13	136.980.090.000	111.771.278.000	43.373.761.000	292.125.129.000
REVISI KE-14	134.608.808.000	111.771.278.000	43.373.761.000	289.753.847.000
REVISI KE-15	135.389.200.000	111.771.278.000	43.373.761.000	290.534.239.000
REVISI KE-16	135.389.200.000	111.771.278.000	43.373.761.000	290.534.239.000
REVISI KE-17	135.389.200.000	111.771.278.000	43.373.761.000	290.534.239.000
REVISI KE-18	135.389.200.000	111.771.278.000	43.373.761.000	290.534.239.000
REVISI KE-19	135.389.200.000	111.771.278.000	43.373.761.000	290.534.239.000
REVISI KE-20	135.389.200.000	111.771.278.000	43.373.761.000	290.534.239.000

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Sumatera Utara

Tabel III.71 Rincian Revisi per Jenis Belanja TA 2023

	JENIS BELANJA			TOTAL
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
PAGU AWAL	30.759.640.000	61.318.275.000	199.430.304.000	291.508.219.000
REVISI KE-1	30.759.640.000	61.318.275.000	199.430.304.000	291.508.219.000
REVISI KE-2	30.759.640.000	61.318.275.000	199.430.304.000	291.508.219.000
REVISI KE-3	30.759.640.000	61.318.275.000	199.430.304.000	291.508.219.000
REVISI KE-4	30.759.640.000	61.318.275.000	199.430.304.000	291.508.219.000
REVISI KE-5	30.759.640.000	61.318.275.000	199.430.304.000	291.508.219.000
REVISI KE-6	30.759.640.000	61.318.275.000	199.430.304.000	291.508.219.000
REVISI KE-7	28.470.470.000	61.318.275.000	199.430.304.000	289.219.049.000
REVISI KE-8	28.470.470.000	61.318.275.000	199.430.304.000	289.219.049.000
REVISI KE-9	28.470.470.000	61.318.275.000	199.430.304.000	289.219.049.000
REVISI KE-10	28.470.470.000	61.318.275.000	203.836.384.000	293.625.129.000
REVISI KE-11	28.470.470.000	61.318.275.000	203.836.384.000	293.625.129.000
REVISI KE-12	28.470.470.000	61.318.275.000	203.836.384.000	293.625.129.000
REVISI KE-13	28.470.470.000	59.818.275.000	203.836.384.000	292.125.129.000
REVISI KE-14	28.470.470.000	58.654.760.000	202.628.617.000	289.753.847.000
REVISI KE-15	29.250.861.000	58.654.760.000	202.628.618.000	290.534.239.000
REVISI KE-16	29.250.861.000	58.825.071.000	202.458.307.000	290.534.239.000
REVISI KE-17	29.250.861.000	58.825.071.000	202.458.307.000	290.534.239.000

	JENIS BELANJA			TOTAL
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
REVISI KE-18	29.250.861.000	58.825.071.000	202.458.307.000	290.534.239.000
REVISI KE-19	29.250.861.000	58.825.071.000	202.458.307.000	290.534.239.000
REVISI KE-20	29.250.861.000	58.825.071.000	202.458.307.000	290.534.239.000

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Sumatera Utara

Tabel III.72 Rincian Realokasi per Sumber Dana dan per Jenis Belanja TA 2023

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN I	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN II	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN III	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN IV
Belanja Pegawai	30.759.640.000	-	30.759.640.000	-	30.759.640.000	-2.289.170.000	28.470.470.000	780.391.000	29.250.861.000
Belanja Barang	61.318.275.000	-	61.318.275.000	-	61.318.275.000	-	61.318.275.000	-2.493.755.000	58.824.520.000
· RM	61.318.275.000	-	61.318.275.000	-	61.318.275.000	-	61.318.275.000	2.493.755.000	58.824.520.000
· PNBPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Modal	199.430.304.000	-	199.430.304.000	-	199.430.304.000	-	199.430.304.000	3.028.554.000	202.458.858.000
· RM	47.785.265.000	-	47.785.265.000	-	47.785.265.000	-	47.785.265.000	471.446.000	47.313.819.000
· PNBPN	108.271.278.000	-	108.271.278.000	-	108.271.278.000	-	108.271.278.000	3.500.000.000	111.771.278.000
· SBSN	43.373.761.000	-	43.373.761.000	-	43.373.761.000	-	43.373.761.000	-	43.373.761.000
TOTAL	291.508.219.000	-	291.508.219.000	-	291.508.219.000	-2.289.170.000	289.219.049.000	1.315.190.000	290.534.239.000

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Sumatera Utara

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

Tabel III.73 Rincian Program-Program Kegiatan DIPA TA 2023

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	TRIWULAN I		PAGU PER TRIWULAN II	TRIWULAN II		PAGU PER TRIWULAN III	TRIWULAN III		PAGU PER TRIWULAN IV	TRIWULAN IV	
				REALISASI	%		REALISASI	%		REALISASI	%		REALISASI	%
022.03.2.403842	BPTD Kelas II Sumatera Utara	291.508.219.000	291.508.219.000	31.957.373.384	10,96%	291.508.219.000	100.202.008.335	34,37%	289.219.049.000	163.694.596.325	56,60%	290.534.239.000	#####	99,11%
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	238.192.416.000	238.192.416.000	21.377.174.701	8,97%	238.192.416.000	77.956.660.241	32,73%	238.192.416.000	130.973.087.131	54,99%	238.727.215.000	#####	99,09%
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	105.583.119.000	105.583.119.000	14.524.364.277	13,76%	105.583.119.000	43.157.357.866	40,88%	105.583.119.000	78.708.457.302	74,55%	99.977.696.000	99.658.982.202	99,68%
4638	Pelayanan Transportasi Darat	40.606.733.000	40.606.733.000	2.986.629.574	7,36%	40.606.733.000	8.477.516.959	20,88%	40.606.733.000	11.636.706.405	28,66%	38.937.180.000	37.338.885.725	95,90%
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	84.758.253.000	84.758.253.000	3.081.942.105	3,64%	84.758.253.000	23.260.014.430	27,44%	84.758.253.000	36.335.259.502	42,87%	83.952.066.000	83.717.367.319	99,72%
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	7.244.311.000	7.244.311.000	784.238.745	10,83%	7.244.311.000	3.061.770.986	42,26%	7.244.311.000	4.292.663.922	59,26%	15.860.273.000	15.840.577.376	99,88%
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	53.315.803.000	53.315.803.000	10.580.198.683	19,84%	53.315.803.000	22.245.348.094	41,72%	51.026.633.000	32.721.509.194	64,13%	51.807.024.000	51.381.207.149	99,18%
4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	1.061.250.000	1.061.250.000	17.112.200	1,61%	1.061.250.000	447.668.200	42,18%	1.061.250.000	609.501.050	57,43%	1.061.250.000	1.045.161.050	98,48%
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	21.494.913.000	21.494.913.000	3.041.975.880	14,15%	21.494.913.000	5.169.931.381	24,05%	21.494.913.000	9.273.245.372	43,14%	21.494.913.000	21.486.015.195	99,96%
4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	30.759.640.000	30.759.640.000	7.521.110.603	24,45%	30.759.640.000	16.627.748.513	54,06%	28.470.470.000	22.838.762.772	80,22%	29.250.861.000	28.850.030.904	98,63%

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Sumatera Utara

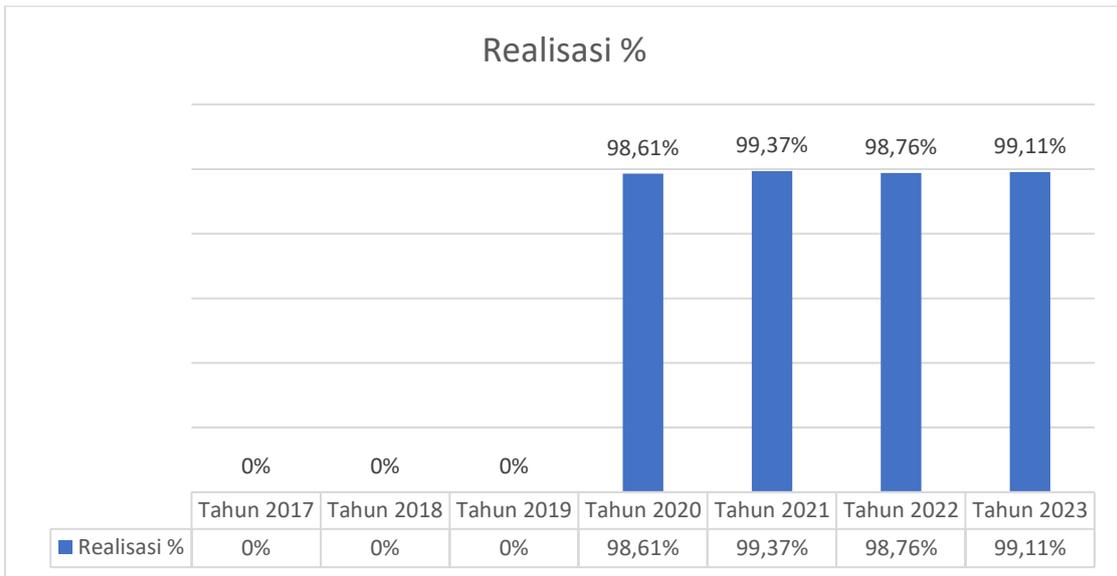
III.3.1.3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2023

Adapun data perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2017-2023, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.74 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2023

No	Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	
		Rp.	Rp.	Rp.	%
1	2017	0	0	0	0
2	2018	0	0	0	0
3	2019	0	0	0	0
4	2020	439.448.113.000	455.329.267.000	448.996.604.047	98,61%
5	2021	408.801.289.000	277.187.383.000	275.430.682.861	99,37%
6	2022	274.668.876.000	248.111.425.000	245.044.388.273	98,76%
7	2023	291.508.219.000	290.534.239.000	287.937.019.771	99,11%

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Sumut



Gambar III.43 Grafik Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2023

Berdasarkan data di atas dapat diketahui nilai pagu awal, pagu akhir, dan realisasi setiap tahunnya, sehingga diketahui masing-masing dana yang terserap setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2022 anggaran yang terserap sebesar Rp. 245.044.388.273,- atau mencapai 98,76% dari pagu akhir Rp. 248.111.425.000,-. Sedangkan pada tahun 2023 serapan anggaran sebesar Rp. 287.937.019.771,- atau mencapai 99,11% dari pagu akhir Rp. 290.534.239.000,-.

III.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2023

III.3.2.1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2023

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

Tabel III.75 Kegiatan yang ada Dalam DIPA 2023

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	TRIWULAN I		PAGU PER TRIWULAN II	TRIWULAN II		PAGU PER TRIWULAN III	TRIWULAN III		PAGU PER TRIWULAN IV	TRIWULAN IV	
				REALISASI I	%		REALISASI	%		REALISASI	%		REALISASI I	%
022.03.2.403842	BPTD Kelas II Sumatera Utara	291.508.219.000	291.508.219.000	31.957.373.384	10,96%	291.508.219.000	100.202.008.335	34,37%	289.219.049.000	163.694.596.325	56,60%	290.534.239.000	#####	99,11%
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	238.192.416.000	238.192.416.000	21.377.174.701	8,97%	238.192.416.000	77.956.660.241	32,73%	238.192.416.000	130.973.087.131	54,99%	238.727.215.000	#####	99,09%
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	105.583.119.000	105.583.119.000	14.524.364.277	13,76%	105.583.119.000	43.157.357.866	40,88%	105.583.119.000	78.708.457.302	74,55%	99.977.696.000	99.658.982.202	99,68%
4638	Pelayanan Transportasi Darat	40.606.733.000	40.606.733.000	2.986.629.574	7,36%	40.606.733.000	8.477.516.959	20,88%	40.606.733.000	11.636.706.405	28,66%	38.937.180.000	37.338.885.725	95,90%
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	84.758.253.000	84.758.253.000	3.081.942.105	3,64%	84.758.253.000	23.260.014.430	27,44%	84.758.253.000	36.335.259.502	42,87%	83.952.066.000	83.717.367.319	99,72%
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	7.244.311.000	7.244.311.000	784.238.745	10,83%	7.244.311.000	3.061.770.986	42,26%	7.244.311.000	4.292.663.922	59,26%	15.860.273.000	15.840.577.376	99,88%
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	53.315.803.000	53.315.803.000	10.580.198.683	19,84%	53.315.803.000	22.245.348.094	41,72%	51.026.633.000	32.721.509.194	64,13%	51.807.024.000	51.381.207.149	99,18%
4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	1.061.250.000	1.061.250.000	17.112.200	1,61%	1.061.250.000	447.668.200	42,18%	1.061.250.000	609.501.050	57,43%	1.061.250.000	1.045.161.050	98,48%
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	21.494.913.000	21.494.913.000	3.041.975.880	14,15%	21.494.913.000	5.169.931.381	24,05%	21.494.913.000	9.273.245.372	43,14%	21.494.913.000	21.486.015.195	99,96%
4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	30.759.640.000	30.759.640.000	7.521.116.063	24,45%	30.759.640.000	16.627.748.513	54,06%	28.470.470.000	22.838.762.772	80,22%	29.250.861.000	28.850.030.904	98,63%

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Sumut

Realisasi penyerapan anggaran triwulan IV Tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 287.937.019.771,-** atau mencapai **99,11%** dari total pagu sebesar **Rp. 290.534.239.000,-**.

III.3.2.2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada tahun 2023 yang sudah di analisis per Triwulan I/II/III/IV, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.76 Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Triwulan IV Tahun 2023

NO	JENIS BELANJA	PAGU AWAL	PAGU ALOKASI (TW I)			PAGU ALOKASI (TW II)			PAGU ALOKASI (TW III)			PAGU ALOKASI (TW IV)		
			Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	%
1	Belanja Pegawai	30.759.640.000	30.759.640.000	7.521.110.603	24,45	30.759.640.000	16.627.748.513	54,06	28.470.470.000	22.838.762.772	80,22	29.250.861.000	28.850.030.904	98,63
2	Belanja Barang	61.318.275.000	61.318.275.000	9.207.003.694	15,02	61.318.275.000	21.106.335.079	34,42	61.318.275.000	30.181.136.896	49,22	58.824.520.000	58.649.230.137	99,70
3	Belanja Modal	199.430.304.000	199.430.304.000	15.229.259.087	7,64	199.430.304.000	62.467.924.743	31,32	199.430.304.000	110.950.983.920	55,63	202.458.858.000	200.437.758.730	99,00
TOTAL		291.508.219.000	291.508.219.000	31.957.373.384	10,96	291.508.219.000	100.202.008.335	34,37	289.219.049.000	163.970.883.588	56,69	290.534.239.000	287.937.019.771	99,11

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Sumatera Utara

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi penyerapan anggaran Triwulan IV Tahun 2023 per jenis belanja adalah sebesar Rp 287.937.019.771,- atau mencapai 99,11% dari pagu akhir Rp 290.534.239.000,-.

III.3.2.3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2023

Adapun data realisasi anggaran per sumber dana pada tahun 2022 yang sudah di analisis per Triwulan I/II/III/IV, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.77 Realisasi Anggaran per Jenis Sumber Dana Triwulan IV Tahun 2023

NO	SUMBER DANA	PAGU AWAL	PAGU ALOKASI (TW I)			PAGU ALOKASI (TW II)			PAGU ALOKASI (TW III)			PAGU ALOKASI (TW IV)		
			Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	%
1	RM	139.863.180.000	139.863.180.000	19.807.991.297	14,16	139.863.180.000	53.283.029.694	38,10	137.574.010.000	87.935.710.720	63,92	135.389.200.000	134.555.396.571	99,38
2	PNBP	108.271.278.000	108.271.278.000	12.028.357.800	11,11	108.271.278.000	38.537.863.160	35,59	108.271.278.000	64.122.179.200	59,22	111.771.278.000	110.007.862.200	98,42
3	SBSN	43.373.761.000	43.373.761.000	121.024.287	0,28	43.373.761.000	8.381.115.481	19,32	43.373.761.000	11.912.993.668	27,47	43.373.761.000	43.373.761.000	100,00
TOTAL		291.508.219.000	291.508.219.000	31.957.373.384	10,96	291.508.219.000	100.202.008.335	34,37	289.219.049.000	163.970.883.588	56,69	290.534.239.000	287.937.019.771	99,11

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Sumatera Utara

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi penyerapan anggaran Triwulan IV Tahun 2023 per sumber dana adalah sebesar Rp 287.937.019.771,- atau mencapai 99,11% dari pagu akhir Rp 290.534.239.000,-.

III.3.2.4. Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja

Berikut merupakan data dari dana yang tidak terserap oleh unit kerja berdasarkan per jenis belanja, per sumber dana, dan sisa anggaran pada tahun 2023, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.78 Sisa Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2023

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Belanja Pegawai	29.250.861.000	28.850.030.904	400.830.096
2	Belanja Barang	58.824.520.000	58.649.230.137	175.289.863
3	Belanja Modal	202.458.858.000	200.437.758.730	2.021.099.270
TOTAL		290.534.239.000	287.937.019.771	2.597.219.229

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Sumatera Utara

Tabel III.79 Sisa Anggaran per Sumber Dana Tahun 2023

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Rupiah Murni	135.389.200.000	134.555.396.571	833.803.429
2	PNBP	111.771.278.000	110.007.862.200	1.763.415.800
3	SBSN	43.373.761.000	43.373.761.000	0
TOTAL		290.534.239.000	287.937.019.771	2.597.219.229

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Sumatera Utara

Tabel III.80 Rincian Sisa Anggaran Tahun 2023

No	SISA ANGGARAN	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA ANGGARAN
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kegiatan yang tidak Terlaksana	-	-	-
2	Kegiatan yang Terblokir	-	-	-
3	Sisa Kontraktual			
	a. Belanja Barang	24.283.170.000	24.147.388.408	135.781.592
	b. Belanja Modal	200.062.056.000	198.078.730.200	1.983.325.800
4	Sisa Non Kontraktual			
	a. Belanja Barang	34.541.350.000	34.501.841.729	39.508.271
	b. Belanja Modal	2.396.802.000	2.359.028.530	37.773.470
5	Sisa Belanja Pegawai	29.250.861.000	28.850.030.904	400.830.096
TOTAL				2.597.219.229

Dari total pagu anggaran akhir Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023 sebesar Rp 290.534.239.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang dapat terealisasi sebesar Rp 287.937.019.771,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu

Rupiah) atau sebesar 99,11% sehingga total dana yang tidak terserap di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara adalah sebesar Rp 2.597.219.229,- (Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 0,89%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tidak ada kegiatan yang tidak terlaksana;
2. Tidak ada kegiatan yang terblokir;
3. Sisa kontraktual sebesar Rp 2.597.219.229,-
 - a. Sisa belanja modal sebesar Rp 1.983.325.800,- berasal dari sisa kontrak yang sudah tidak dapat di realokasi dikarenakan mengacu pada PMK tentang tata cara revisi (untuk revisi DIPA antar sumber belanja dan jenis belanja merupakan wewenang DJA yang maksimal pengajuan hanya sampai 31 Oktober), sedangkan sisa belanja modal baru diketahui saat akhir tahun;
 - b. Sisa belanja barang sebesar Rp 135.781.592,- berasal dari beberapa ritase subsidi yang tidak tercapai;
4. Sisa Non Kontraktual sebesar Rp 77.281.741,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Rupiah);
 - a. Sisa belanja modal sebesar Rp 37.773.470,- berasal dari sisa kegiatan belanja Peralatan dan mesin pada satuan pelayanan Terminal dan UPPKB;
 - b. Sisa belanja barang sebesar Rp 39.508.271,- berasal dari sisa kegiatan operasional serta penunjang pada tiap satker;
5. Sisa sumber dana PNBPN sebesar Rp. 1.763.415.800,- berasal dari belanja modal di akhir tahun dan tidak dapat dilakukan optimalisasi dikarenakan nilai sisa dana yang bersumber dari PNBPN terlalu kecil sehingga tidak dapat direalokasi;
6. Sisa sumber dana SBSN nol rupiah karena realisasi mencapai 100%;
7. Sisa Belanja Pegawai Rp 400.830.096,- (Empat Ratus Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah). Terdapat sisa belanja pegawai yang disebabkan realisasi P3D yang kurang dari target.

III.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran berdasarkan sasaran program per Triwulan I – IV Tahun 2023.

- **Efisiensi Sumber Daya Manusia**

Jumlah kompetensi penguji kendaraan bermotor di BPTD Sumatera Utara masih belum sebanding dengan kebutuhan di masing-masing satuan pelayanan atau unit kerja dan jenjang kompetensi penguji tidak merata di setiap satuan pelayanan, sehingga dalam pelaksanaan operasional satuan pelayanan yang tidak memiliki kompetensi penguji kendaraan bermotor dapat berkoordinasi dengan satuan pelayanan untuk meminta perbantuan personil dalam pelaksanaan tugas.

Selanjutnya BPTD Sumatera Utara memberikan kesempatan kepada pegawai yang ingin meningkatkan jenjang kompetensinya dengan mengikuti diklat kenaikan tingkat jenjang kompetensi dan membuka kesempatan bagi pegawai yang ingin mengikuti kompetensi penguji. Hal ini dilakukan sebagai Upaya untuk memenuhi kebutuhan SDM dan mengoptimalkan terlaksananya tupoksi BPTD Sumatera Utara. Berikut merupakan data persebaran jabatan penguji kendaraan bermotor di BPTD Sumatera Utara:

Tabel III. 81 Tabel Persebaran Jabatan Penguji Kendaraan Bermotor 2023

NO	NAMA	NIP	GOLONGAN	JENJANG KOMPETENSI						UNIT KERJA	
				PEMBANTU PENGUJI	PENGUJI PEMULA	PENGUJI TINGKAT 1	PENGUJI TINGKAT 2	PENGUJI TINGKAT 3	PENGUJI TINGKAT 4		PENGUJI TINGKAT 5
1	AULIA ROBBYANSYAH	19951031 202203 1 006	II/a								Terminal Tipe A Amplas
2	PARLINDUNGAN SARAGIH, ST										Terminal Tipe A Amplas

NO	NAMA	NIP	GOLONGAN	JENJANG KOMPETENSI						UNIT KERJA	
				PEMBANTU PENGUJI	PENGUJI PEMULA	PENGUJI TINGKAT 1	PENGUJI TINGKAT 2	PENGUJI TINGKAT 3	PENGUJI TINGKAT 4		PENGUJI TINGKAT 5
3	RICHARD TOGA MANURUNG, A.Ma.PKB	19900920 202321 1 013	VI								Terminal Tipe A Amplas
4	HANUM AZIZATUN RAKHMAH, A.Md.T.	20000422 202112 2 001	II/c								Terminal Tipe A Amplas
5	FHERNANDO VICTORY ADI PUTRA MANALU, SE										Terminal Tipe A Amplas
6	ROLAND TUMBUR HASIOLAN SIAGIAN, S.ST										Terminal Tipe A Pinang Baris
7	MUHAMMAD RIFAI ANGKAT	19730305 199203 1 002	III/b								Terminal Tipe A Pinang Baris
8	HORAS PAKPAHAN, S.Kom										UPPKB Dolok Parmonangan
9	ARVIAN DWIKY PRASETYO, A.Md.T	20000403 202210 1 001	II/c								Terminal Tipe A Tanjung Pinggir
10	KELVIN HIDAYAT, A.Md.T.	20000921 202210 1 001	II/c								Terminal Tipe A Tanjung Pinggir
11	ANTONIUS SUGENG ARUAN, SH	19850325 201001 1 011	III/b								Terminal Tipe A Madya Tarutung
12	AKHMAD FAHMI	19760726 200701 1 003	III/a								Pelabuhan Penyeberangan Sibolga
13	AZWAN WALDIAN ALI, A. Md. PKB										Terminal Tipe A Pinang Baris
14	ARFIN TOGAP TUA L TOBING	19710410 199312 1 001	III/b								Terminal Tipe A Amplas

NO	NAMA	NIP	GOLONGAN	JENJANG KOMPETENSI							UNIT KERJA
				PEMBANTU PENGUJI	PENGUJI PEMULA	PENGUJI TINGKAT 1	PENGUJI TINGKAT 2	PENGUJI TINGKAT 3	PENGUJI TINGKAT 4	PENGUJI TINGKAT 5	
15	ENDI YUSRAN KURNIA RITONGA	19890626 201612 1 001	II/c								UPPKB Jembatan Merah
16	SABAR MANGELEK SARAGIH										UPPKB Dolok Estate
17	EKA PRASETIA PANCAKARSA KRISMES MARANATA										UPPKB Dolok Estate
18	FAJAR SETIAWAN	19960730 202203 1 007	II/a								UPPKB Mambang Muda
19	ZAINUL HAMDI ARITONANG										UPPKB Aek Batu
20	LABADIA PUTRA WUNGSU LUMBANBATU, S.S.T(TD)										Seksi Prasarana Jalan SDP
21	MUHAMMAD AGUNG NUGROHO, S.I.Kom										Seksi Lalu Lintas Jalan SDPP
22	ADLI HAZMI, S.Kom	19920627 202321 1 021	V								Seksi Lalu Lintas Jalan SDPP
23	SAIDINA RAHMAN SEMBIRING, A.Ma.PKB	19901231 202321 1 034	VI								Seksi Sarana dan Angkutan Jalan SDP
24	JOSEPHINE GEASICETA EKANIA PUTRI, A.Ma PKB	19990329 202102 2 001	II/b								Seksi Sarana dan Angkutan Jalan SDP
25	IRVAN EFENDI, A.Md PKB										Seksi Lalu Lintas Jalan SDPP
26	SRI ENDAH SUDARMI, A.Md. PKB.	19951007 202203 2 018	II/c								Seksi Sarana dan Angkutan Jalan SDP

NO	NAMA	NIP	GOLONGAN	JENJANG KOMPETENSI							UNIT KERJA	
				PEMBANTU PENGUJI	PENGUJI PEMULA	PENGUJI TINGKAT 1	PENGUJI TINGKAT 2	PENGUJI TINGKAT 3	PENGUJI TINGKAT 4	PENGUJI TINGKAT 5		
27	M. HAFIZ BASHARI, A.Md.T.	20000423 202112 1 003	II/c									Seksi Sarana dan Angkutan Jalan SDP
28	PERMADI PANGGAH WASKITHO, A.Md. PKB	19980406 202012 1 004	II/c									Seksi Sarana dan Angkutan Jalan SDP
Jumlah				9	1	1	3	11	1			

- **Efisiensi Penggunaan Anggaran**

Berikut merupakan tabel efisiensi penggunaan anggaran di tahun 2023:

Tabel III.82 Tabel Efisiensi Anggaran

No	Sasaran Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		% Capaian Rata- Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan I)	% Capaian Rata- Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan II)	% Capaian Rata- Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan III)	% Capaian Rata- Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan IV)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	61,68%	13,34%	48,34%	74,86%	30,75%	44,11%	82,82%	46,89%	35,93%	96,67%	99,11%	-2,44%
2	SK2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat	49,13%	13,54%	35,59%	69,90%	39,38%	30,52%	91,59%	61,21%	30,37%	100,00%	98,77%	1,23%

No	Sasaran Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan I)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan II)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan III)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan IV)
3	SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	46,47%	7,91%	38,56%	90,89%	38,59%	52,30%	72,29%	62,95%	9,33%	94,58%	98,72%	-4,13%
4	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	13,33%	6,22%	7,11%	50,00%	42,22%	7,78%	75,00%	59,26%	15,74%	100,00%	99,90%	0,10%
5	SK1 Meningkatnya Brirokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	16,67%	13,23%	3,43%	25,00%	22,49%	2,51%	75,00%	55,38%	19,62%	100,00%	99,26%	0,74%
Rata-Rata		37,46%	10,85%	26,61%	62,13%	34,69%	27,44%	79,34%	57,14%	22,20%	98,25%	99,15%	-0,90%

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 98,25%, dengan realisasi anggaran sebesar 99,15% menunjukkan adanya ketidak-efisiensi anggaran sebesar -0,90%. Hal ini disebabkan karena adanya 2 kegiatan dalam tahun 2023 yang tidak tercapai yaitu kegiatan Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda dan kegiatan Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan karena adanya pengurangan trayek subsidi angkutan KSPN yang melayani simpul KSPN Danau Toba akibat rendahnya load factor serta dalam penentuan target persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terlalu tinggi sehingga capaian kinerja tidak tercapai pada tahun 2023.

III.3.4. Hambatan dan Kendala

Beberapa Hambatan/Kendala masih rendahnya realisasi daya serap anggaran antara lain:

1. Terdapat hambatan pencapaian kinerja pada beberapa indikator kinerja yang menyebabkan realisasi tidak mencapai target yang sudah direncanakan. Akibatnya perlu dilaksanakan revisi PK, namun dalam proses revisi PK memerlukan waktu dan persetujuan dari masing-masing pimpinan;
2. Proses pengumpulan kinerja dari masing-masing seksi masih sering terlambat, karena kurangnya koordinasi;
3. Seksi kurang peduli terhadap capaian kinerja di unit kerjanya, akibatnya laporan pelaksanaan capaian kinerja maupun hambatan dalam pelaksanaan capaian kinerja tidak tersampaikan pada tim sakin sehingga tim sakin mengalami kesulitan dalam menganalisis keberhasilan capaian;
4. Adanya potensi deviasi perencanaan dan penganggaran di setiap tahapan jika tidak dilakukan koordinasi dan pengendalian yang kuat;
5. Pelaksanaan kegiatan sering mengabaikan jadwal dalam DIPA karena kurangnya kesiapan pada awal tahun anggaran. Jadwal pencairan dana dalam DIPA tidak dijadikan paduan untuk melakukan penarikan dana;
6. Adanya pagu alokasi anggaran yang diblokir mengakibatkan anggaran tersebut tidak dapat dicairkan.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

IV.1. Ringkasan Capaian

Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Kegiatan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sebagai penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja tahun 2023, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan Tahun 2023 ini terdapat **12 (Dua Belas)** Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah/lebih dari target yang telah ditentukan yaitu, persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan, jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi, persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan, jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi, persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A, Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP, Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal, Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat, jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan, jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP, kualitas penyelenggaraan dukungan tekknis transportasi darat, serta tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat;
2. Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun selanjutnya, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara akan melakukan proses yang lebih selektif terhadap pengusulan target Renstra dengan menerapkan skala prioritas untuk peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dengan pertimbangan ketersediaan anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara juga akan meningkatkan koordinasi dengan melakukan monitoring keselamatan dan

keamanan transportasi darat dan penyeberangan agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju *zero accident*.

IV.2. Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Adapun hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel IV.1 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

No	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK 2023	TRIWULAN IV			*EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
						T	R	C			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100	100	100 %	Tercapai	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut.	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
			IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	6	6	5	83,33%	Belum Tercapai	Mengevaluasi pelaksanaan subsidi KSPN terkait demand serta trayek yang dilayani	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
			IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	0	5	5	100%	Tercapai	Melakukan sosialisasi kepada organda serta masyarakat pengguna angkutan umum untuk turut serta meramaikan terminal yang sudah ada	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

No	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK 2023	TRIWULAN IV			*EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
						T	R	C			
			IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	100	100	100%	Tercapai	Melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
			IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4	6	6	100%	Tercapai	Mewujudkan pembangunan pelabuhan yang terpadu dengan moda transportasi lainnya	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	100	100	100 %	Tercapai	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi kepada perusahaan angkutan jalan terkait standar pelayanan minimal angkutan jalan; Memberikan apresiasi kepada perusahaan angkutan jalan yang telah memberikan pelayanan angkutan terbaik kepada masyarakat melalui kegiatan pemilihan PO terbaik. 	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
			IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	100	100	100%	Tercapai	<ol style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan stakeholder terkait supaya lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan; Melakukan pengawasan secara periodik terhadap ketepatan jadwal di lapangan; 	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan

No	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK 2023	TRIWULAN IV			*EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
						T	R	C			
										<p>3. Melakukan rapat evaluasi efektifitas pengaturan jadwal;</p> <p>4. Memberlakukan sanksi yang tegas dan pemberian efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan penyeberangan dlm mematuhi jam pelayanan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	
3	SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	75	20	20	100%	Tercapai	<p>1. Menginventaris kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan</p> <p>2. Membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan jalan</p> <p>3. Melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpasang</p>	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
			IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35	35	35	100%	Tercapai	Mengadakan sosialisasi terkait ODOL terhadap pemilik angkutan barang ataupun pihak-pihak perusahaan	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
			IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000	1000	1000	100%	Tercapai	Memberikan hiburan yang menarik dalam acara sosialisasi keselamatan transportasi jalan	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
			IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	40	90	65,63	72,92%	Belum Tercapai	Pemanfaatan peminjaman alat pemeriksaan kelaikan jalan kendaraan bermotor nonstatis kepada	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan,

No	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK 2023	TRIWULAN IV			*EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
						T	R	C			
										UPUPKB yang belum menyelenggarakan pengujian	dan Pengawasan
	SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	0	1	1	100%	Tercapai	Melakukan monitoring terhadap fasilitas SDP yang telah terpasang	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	90	90,00	100 %	Tercapai	Rutin melakukan evaluasi secara internal terkait kinerja yang sedang berlangsung guna meminimalisir tidak tercapainya target kinerja tahun berjalan	<ul style="list-style-type: none"> • Subbagian Tata Usaha • Seksi Lalin & Pengawasan • Seksi Sarana & Angkutan • Seksi Prasarana
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	90	90,00	100 %	Tercapai	Melaksanakan manajemen terhadap SDM pegawai BPTD Kelas II Sumatera Utara	Subbagian Tata Usaha
<p>KETERANGAN:</p> <p>T = TARGET KINERJA</p> <p>R = REALISASI KINERJA</p> <p>C = CAPAIAN KINERJA</p> <p>*Kolom Evaluasi diisi dengan Tercapai atau Tidak Tercapai</p>											



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

Dapat di akses pada link di bawah ini:



Lampiran 2

Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023

Dapat di akses pada link di bawah ini:



Lampiran 3

Rencana Aksi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Tahun 2023

Dapat di akses pada link di bawah ini:



Lampiran 4

Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023

Dapat di akses pada link di bawah ini:



Lampiran 5

Revisi I Rencana Aksi BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023

Dapat di akses pada link di bawah ini:



Lampiran 6

Revisi II Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023

Dapat di akses pada link di bawah ini:



Lampiran 7

Revisi II Rencana Aksi BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023

Dapat di akses pada link di bawah ini:



Lampiran 8

Monitoring Rencana Aksi BPTD Kelas II Sumatera Utara Tahun 2023

Dapat di akses pada link di bawah ini:





Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan RI